



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

DRAF EKSPOSUR

PSAK 118: **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN**

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 28 Februari 2025.

Draf EKSPOSUR

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur ini akan dipertimbangkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur ini paling lambat diterima pada **28 Februari 2025**.

Tanggapan dikirimkan kepada:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id.

Hak Cipta © 2024 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke DSAK IAI. Penggandaan Draf Eksposur ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan

Draf EKSPOSUR

PENGANTAR AMENDEMEMEN

Draf Eksposur (DE) PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 26 November 2024. DE PSAK 118 merujuk pada IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* yang berlaku efektif 1 Januari 2027.

Contoh yang melengkapinya, namun bukan merupakan bagian dari, DE PSAK 118, merupakan contoh-contoh yang dirujuk dari IFRS 18. Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan praktik di Indonesia.

Jakarta, 26 November 2024
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

Draf EKSPOSUR

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas pengaturan dan paragraf dalam DE tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. DE PSAK 118 mensyaratkan entitas untuk menyajikan **subtotal** baru dalam laporan laba rugi, yakni:
 - (a) laba (rugi) operasi;
 - (b) laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan; dan
 - (c) laba (rugi),serta memberikan definisi laba (rugi) operasi dan laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan (paragraf 69 – 71 dan Lampiran A).

Dalam menerapkan subtotal tersebut, entitas mengklasifikasikan **penghasilan dan beban** dalam laporan laba rugi ke satu dari **lima kategori** berikut (paragraf 47):

- (a) kategori operasi;
- (b) kategori investasi;
- (c) kategori pendanaan;
- (d) kategori pajak penghasilan; dan
- (e) kategori operasi yang dihentikan.

DE PSAK 118 juga menjelaskan penghasilan dan beban yang masuk ke dalam masing-masing kategori (paragraf 52 – 68), termasuk klasifikasi bagi entitas dengan aktivitas bisnis tertentu. Entitas mempertimbangkan aktivitas bisnis utamanya ketika menerapkan persyaratan klasifikasi penyajian penghasilan dan beban ke dalam kategori dalam laporan laba rugi.

Pertanyaan 1 – Subtotal dalam laporan laba rugi

DE PSAK 118 paragraf 69 mensyaratkan entitas untuk menyajikan subtotal, termasuk laba (rugi) operasi, dalam laporan laba rugi.

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya. Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

Pertanyaan 2 – Klasifikasi penghasilan dan beban ke dalam kategori operasi

DE PSAK 118 paragraf 52 mensyaratkan entitas untuk menyajikan dalam kategori operasi seluruh penghasilan dan beban yang tidak diklasifikasikan dalam kategori lainnya.

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya. Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

Pertanyaan 3 – Klasifikasi kategori penghasilan dan beban ke dalam kategori investasi

DE PSAK 118 paragraf 53-54 mengatur mengenai klasifikasi penghasilan dan beban ke dalam kategori investasi.

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya.
Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

Pertanyaan 4 – Klasifikasi kategori penghasilan dan beban ke dalam kategori pendanaan

DE PSAK 118 paragraf 59-61 mengatur mengenai klasifikasi penghasilan dan beban ke dalam kategori pendanaan.

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya.
Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

Pertanyaan 5 – Klasifikasi kategori penghasilan dan beban bagi entitas dengan aktivitas bisnis tertentu

DE PSAK 118 paragraf 55-58 dan paragraf 65-66 mengatur mengenai klasifikasi penghasilan dan beban bagi entitas dengan aktivitas bisnis utama tertentu.

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya.
Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

2. DE PSAK 118 menjelaskan mengenai peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan serta prinsip serta persyaratan mengenai agregasi dan disagregasi informasi. Prinsip tersebut berlaku baik dalam penyajian di laporan keuangan utama maupun dalam pengungkapan di catatan atas laporan keuangan.

Pertanyaan 6 – Peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan, agregasi dan disagregasi

DE PSAK 118 paragraf 15-18 serta paragraf 41-43 dan PP16-PP23 menjelaskan mengenai peran laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, serta prinsip dan persyaratan agregasi dan disagregasi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban atau arus kas.

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya.
Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

3. DE PSAK 118 mengatur penyajian dan pengungkapan beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi serta menjelaskan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan entitas dalam menentukan penyajian beban operasi. Beban tersebut diklasifikasikan dan disajikan dalam pos laporan laba rugi, yang menyediakan ringkasan terstruktur yang paling berguna atas beban-beban

tersebut. Beban operasi dapat disajikan berdasarkan karakteristik sifat atau fungsinya, namun dalam beberapa kasus entitas dapat mengklasifikasikan dan menyajikan sebagian beban operasi berdasarkan sifat dan sebagian lainnya berdasarkan fungsi jika hal tersebut menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna.

Pertanyaan 7 – Analisis beban operasi

DE PSAK 118 paragraf 78-85 dan paragraf PP80-PP84 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan beban operasi.

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya. Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

4. DE PSAK 118 mengatur ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM – *management-defined performance measure (MPM)*) dengan memberikan definisi serta mensyaratkan pengungkapannya dalam satu catatan atas laporan keuangan. DE PSAK 118 menjelaskan secara spesifik informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan mengenai UKTM, termasuk rekonsiliasi UKTM ke total atau subtotal terdekat terbandingkan dalam laporan laba rugi yang ditentukan dalam SAK Indonesia.

Pertanyaan 8 – Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM)

DE PSAK 118 paragraf 117-125 mengatur mengenai definisi dan persyaratan pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM).

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya. Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

5. Sejalan dengan DE PSAK 118, PSAK 207: *Laporan Arus Kas* akan diamendemen antara lain:
- (a) mensyaratkan entitas untuk menggunakan subtotal laba (rugi) operasi sebagai titik awal untuk pelaporan arus kas metode tidak langsung dari aktivitas operasi (paragraf 18(b);
 - (b) mengurangi alternatif penyajian yang saat ini diperkenankan untuk bunga dan dividen dalam klasifikasi arus kas seperti berikut ini (paragraf 33-34D):

Arus kas	Entitas umumnya	Entitas khusus ^(a)
Pembayaran bunga	Aktivitas pendanaan	Pilihan kebijakan akuntansi, bergantung pada klasifikasi penghasilan dan beban terkait dalam laporan laba rugi
Penerimaan bunga	Aktivitas investasi	
Penerimaan dividen	Aktivitas investasi	
Pembayaran dividen	Aktivitas pendanaan	
^(a) entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama atau melakukan investasi pada aset yang menghasilkan imbal hasil yang secara individual dan sebagian besar tergantung pada sumber daya entitas lainnya.		

Pertanyaan 9 – Laporan arus kas

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan pengaturan terkait penggunaan laba (rugi) operasi sebagai titik awal untuk pelaporan arus kas metode tidak langsung dari aktivitas operasi, dan penyajian bunga dan dividen dalam laporan arus kas tersebut? Mohon agar dijelaskan alasannya.

Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

6. **Pertanyaan 10 – Tanggal efektif dan ketentuan transisi**

Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan usulan tanggal efektif 1 Januari 2027 dengan opsi penerapan dini beserta ketentuan tanggal transisi pada DE PSAK 118 Lampiran C? Mohon agar dijelaskan alasannya.

Jika tidak setuju, alternatif apa yang diusulkan dan alasannya?

7. **Pertanyaan 11 – Lain-lain**

Apakah anda mempunyai masukan atau tanggapan lain terkait:

- (a) DE PSAK 118 beserta Lampiran A, B, C dan D;
- (b) Contoh Ilustratif;
- (c) Materi Pendukung; dan
- (d) Lampiran – Amendemen pada panduan dalam PSAK/ISAK lain dan pada Panduan Praktik SAK – *Membuat Pertimbangan Materialitas?*

Mohon agar dijelaskan alasannya.

PERBEDAAN DENGAN IFRS ACCOUNTING STANDARDS

DE PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* merujuk pada seluruh pengaturan dalam IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* yang berlaku efektif 1 Januari 2027, kecuali:

1. DE PSAK 118 paragraf 02a tentang ruang lingkup menambahkan pengaturan bahwa PSAK 118 tidak berlaku untuk entitas syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 401: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
2. DE PSAK 118 Lampiran A tentang definisi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan mengakomodir peran Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI sebagai penyusun standar akuntansi keuangan, serta regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Draf EKSPOSUR

Draf EKSPOSUR

PERBEDAAN ANTARA DE PSAK 118: *PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN* DENGAN PSAK 201: *PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN*

Berikut ini beberapa perbedaan antara DE PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* dengan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan seluruh perbedaan yang ada di antara keduanya.

1. Peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan

DE PSAK 118 mengatur mengenai peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang sebelumnya tidak diatur dalam PSAK 201. Peran laporan keuangan utama dan CALK digunakan entitas untuk menentukan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama atau dalam CALK.

2. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama

Dalam DE PSAK 118 diatur secara lebih rinci dengan memberikan referensi pengaturan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, untuk masing-masing laporan laba rugi, laporan penyajian penghasilan komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

3. Prinsip agregasi dan disagregasi

DE PSAK 118 mengatur prinsip agregasi dan disagregasi dalam penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam PSAK 201. Dalam penyajian pos laporan keuangan, entitas mengklasifikasikan dan mengagregasikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban atau arus kas berdasarkan kesamaan karakteristik, mendisagregasikan unsur berdasarkan karakteristik takserupa dalam rangka memenuhi peran laporan keuangan utama dalam menyediakan ringkasan terstruktur berguna serta pengungkapan informasi dalam CALK untuk memenuhi peran CALK dalam menyediakan informasi material. Terkait dengan hal tersebut, entitas memberikan label dan mendeskripsikan unsur dalam laporan keuangan utama dan dalam CALK yang merepresentasikan secara tepat karakteristik unsur tersebut.

4. Kategori dalam laporan laba rugi

DE PSAK 118 mengatur bahwa entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam satu dari lima kategori berikut: a) kategori operasi; b) kategori investasi; c) kategori pendanaan; d) kategori pajak penghasilan; dan e) kategori operasi yang dihentikan. Dalam mengklasifikasikan penghasilan dan beban, entitas menilai apakah entitas memiliki aktivitas bisnis utama tertentu.

5. Total dan subtotal dalam laporan laba rugi

DE PSAK 118 mengatur total dan subtotal yang disajikan dalam laporan laba rugi yakni: a) laba (rugi) operasi; b) laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan; dan c) laba (rugi), serta unsur apa saja yang tercakup dalam masing-masing total dan subtotal tersebut, yang sebelumnya tidak diatur dalam PSAK 201. DE PSAK 118 juga mengatur persyaratan bagaimana entitas menggunakan pertimbangannya dalam menyajikan pos tambahan dalam laporan laba rugi atau mengungkapkannya dalam CALK.

6. Ukuran kinerja tetapan manajemen

DE PSAK 118 mengatur mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM – *management-defined performance measures*) yang sebelumnya tidak diatur dalam PSAK 201. DE PSAK 118 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi UKTM dan mengungkapkannya dalam CALK serta antara lain melakukan rekonsiliasi UKTM ke subtotal terdekat yang terdapat dalam laporan laba rugi atau ke total atau subtotal yang disyaratkan spesifik untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia.

7. Tanggung jawab atas laporan keuangan

DE PSAK 118 tidak mengatur persyaratan mengenai tanggung jawab manajemen atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang sebelumnya diatur dalam PSAK 201.

IKHTISAR

Draf Eksposur (DE) PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* merujuk pada IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* (yang akan berlaku efektif 1 Januari 2027 menggantikan IAS 1 *Presentation of Financial Statements*). DE PSAK 118 ini diterbitkan untuk meningkatkan bagaimana informasi dikomunikasikan dalam laporan keuangan, terutama dalam pengomunikasian informasi kinerja keuangan entitas.

DE PSAK 118 mencakup badan pengaturan beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DE PSAK 118 sebagai berikut:

1. Lampiran A – Daftar Istilah,
2. Lampiran B – Pedoman Penerapan,
3. Lampiran C – Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi, dan
4. Lampiran D – Amendemen PSAK/ISAK lain (karena konsekuensi penerbitan DE PSAK 118).

DE PSAK 118 diusulkan untuk berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027 dengan penerapan dini diperkenankan.

DE PSAK 118 akan berdampak pada penyajian laporan keuangan entitas yang menerapkan SAK Indonesia dalam penyusunan laporan keuangannya, yang dampaknya dapat berbeda antar entitas. Dampak tersebut dapat disimpulkan dari informasi mengenai perbedaan antara DE PSAK 118 dan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*.

DE PSAK 118 ini dilengkapi dengan lampiran lainnya yang bukan merupakan bagian dari DE PSAK 118 yaitu:

1. Contoh Ilustratif,
2. Materi Pendukung, dan
3. Lampiran – Amendemen pada panduan dalam PSAK/ISAK lain dan pada Panduan Praktik SAK – *Membuat Pertimbangan Materialitas*.

Draf EKSPOSUR

DAFTAR ISI

	Paragraf
TUJUAN	01
RUANG LINGKUP	02-08
PERSYARATAN UMUM UNTUK LAPORAN KEUANGAN	09-40
Tujuan laporan keuangan	09
Laporan keuangan lengkap	10-14
Peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan	15-24
Identifikasi laporan keuangan	25-27
Frekuensi pelaporan	28-29
Konsistensi penyajian, pengungkapan dan klasifikasi	30
Informasi komparatif	31-40
AGREGASI DAN DISAGREGASI	41-45
Prinsip agregasi dan disagregasi	41-43
Saling hapus	44-45
LAPORAN LABA RUGI	46-85
Kategori dalam laporan laba rugi	47-68
Total dan subtotal yang disajikan dalam laporan laba rugi	69-74
Unsur yang disajikan dalam laporan laba rugi atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	75-85
LAPORAN PENYAJIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	86-95
Penghasilan komprehensif lain	88-95
LAPORAN POSISI KEUANGAN	96-106
Klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang	96-102
Unsur yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	103-106
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	107-112
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas	107-108
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	109-112
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	113-132
Struktur	113-116
Ukuran kinerja tetapan manajemen	117-125
Modal	126-129
Pengungkapan lain	130-132

LAMPIRAN A – DEFINISI ISTILAH

LAMPIRAN B – PEDOMAN PENERAPAN

LAMPIRAN C – TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

**LAMPIRAN D – AMENDEMEN PADA PSAK ATAU ISAK LAIN DALAM
SAK INDONESIA**

CONTOH ILUSTRATIF

Draf EKSPOSUR

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 118 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Draf Eksposur (DE) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan terdiri dari paragraf 01-132 serta Lampiran A–D. DE PSAK 118 dilengkapi dengan Contoh Ilustratif, Materi Pendukung, serta Lampirannya yang menyertai namun bukan merupakan bagian dari DE PSAK 118. Seluruh paragraf dalam DE Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. DE PSAK 118 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

TUJUAN

01. Pernyataan ini mengatur persyaratan untuk penyajian dan pengungkapan informasi dalam *laporan keuangan bertujuan umum* (laporan keuangan*) untuk membantu memastikan laporan keuangan menyediakan informasi relevan yang merepresentasikan secara tepat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas.

RUANG LINGKUP

02. **Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK Indonesia.**

02a. Pernyataan ini tidak berlaku untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah.

03. Pernyataan ini mengatur persyaratan umum dan khusus untuk penyajian informasi dalam laporan kinerja keuangan, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Pernyataan ini juga mengatur persyaratan untuk pengungkapan informasi dalam *catatan atas laporan keuangan*. PSAK 207: *Laporan Arus Kas* mengatur persyaratan untuk penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Namun, persyaratan umum untuk laporan keuangan dalam paragraf 09–43 dan 113–114 diterapkan untuk laporan arus kas.

04. PSAK atau ISAK lain dalam SAK Indonesia mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain.

05. Pernyataan ini tidak diterapkan pada penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 234: *Laporan Keuangan Interim*. Akan tetapi, paragraf 41-45 dan 117-125 diterapkan pada laporan keuangan interim tersebut.

06. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor privat atau sektor publik menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos, kategori, subtotal, atau total tertentu dalam laporan keuangan dan untuk laporan keuangan itu sendiri.

07. Serupa dengan hal tersebut, entitas yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian* (contohnya beberapa reksa dana) dan entitas yang modal sahamnya bukan ekuitas (contohnya beberapa entitas koperasi) mungkin perlu menyesuaikan penyajian laporan keuangan kepentingan peserta atau pemegang unit.

* Dalam PSAK 118 ini, kecuali judul PSAK 234, seluruh kata “laporan keuangan” adalah terjemahan dari kata “*financial statements*”.

08. Banyak entitas menyediakan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen (lihat paragraf 10), yang mendeskripsikan dan menjelaskan fitur utama kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapinya. Kajian tersebut berada di luar ruang lingkup SAK Indonesia.

PERSYARATAN UMUM UNTUK LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Laporan Keuangan

09. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai prospek arus kas bersih masa depan yang masuk ke entitas dan dalam menilai pewartikelolaan manajemen atas sumber daya ekonomik entitas.

Laporan Keuangan Lengkap

10. *Laporan keuangan lengkap terdiri dari:*
- (a) *laporan kinerja keuangan selama periode pelaporan (lihat paragraf 12);*
 - (b) *laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan;*
 - (c) *laporan perubahan ekuitas selama periode pelaporan;*
 - (d) *laporan arus kas selama periode pelaporan;*
 - (e) *catatan atas laporan keuangan selama periode pelaporan;*
 - (f) *informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 31-32; dan*
 - (g) *laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya jika disyaratkan oleh paragraf 37.*

11. Laporan yang tercantum dalam paragraf 10(a)–10(d) (dan informasi komparatifnya) disebut sebagai *laporan keuangan utama*. Entitas dapat menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam Pernyataan ini. Misalnya, entitas dapat menggunakan judul “neraca” daripada “laporan posisi keuangan”. Selain itu, meskipun Pernyataan ini menggunakan istilah seperti “*penghasilan komprehensif lain*”, “*laba (rugi)*”, dan “*penghasilan komprehensif total*”, entitas dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan total, subtotal, dan pos yang disyaratkan Pernyataan ini sepanjang total, subtotal, dan pos tersebut diberi label dengan cara yang benar-benar merepresentasikan karakteristik unsur tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 43. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah “*penghasilan neto*” untuk mendiskripsikan “*laba (rugi)*”.

12. Entitas menyajikan laporan kinerja keuangannya baik sebagai:
- (a) satu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tunggal, dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Jika opsi ini yang dipilih, entitas menyajikan terlebih dahulu bagian laba rugi diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain; atau
 - (b) laporan laba rugi dan laporan penyajian penghasilan komprehensif terpisah yang dimulai dengan laba rugi. Jika opsi ini yang dipilih, laporan laba rugi disajikan mendahului laporan penyajian penghasilan komprehensif.

13. Di dalam Pernyataan ini:
- (a) bagian laba rugi yang dijelaskan dalam paragraf 12(a) dan laporan laba rugi yang dijelaskan dalam paragraf 12(b) disebut sebagai laporan laba rugi; dan
 - (b) bagian penghasilan komprehensif lain yang dijelaskan dalam paragraf 12(a) dan laporan penyajian penghasilan komprehensif yang dijelaskan dalam paragraf 12(b) disebut sebagai laporan penyajian penghasilan komprehensif.

14. Entitas menyajikan setiap laporan keuangan utama dengan prominensi yang setara dalam suatu laporan keuangan lengkap.

Peran Laporan Keuangan Utama dan Catatan atas Laporan Keuangan

15. Untuk mencapai tujuan laporan keuangan (lihat paragraf 09), entitas menyajikan informasi dalam laporan keuangan utama dan mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas hanya perlu menyajikan atau mengungkapkan informasi material (lihat paragraf 19 dan PP01-PP05).

16. Peran laporan keuangan utama adalah untuk menyediakan ringkasan terstruktur atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang diakui entitas pelapor, yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk:

- (a) memperoleh tinjauan terpadu atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang diakui entitas;
- (b) membuat perbandingan antarentitas, dan antarperiode pelaporan untuk entitas yang sama; dan
- (c) mengidentifikasi unsur atau aspek di mana pengguna laporan keuangan mungkin ingin mendapatkan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan.

17. Peran catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi material yang dibutuhkan:

- (a) untuk membuat pengguna laporan keuangan memahami pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama (lihat paragraf PP06); dan
- (b) untuk melengkapi laporan keuangan utama dengan informasi tambahan untuk mencapai tujuan laporan keuangan (lihat paragraf PP07).

18. Entitas menggunakan peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan, yang dijelaskan dalam paragraf 16-17, untuk menentukan apakah akan menyertakan informasi dalam laporan keuangan utama atau dalam catatan atas laporan keuangan. Peranan yang berbeda dari laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan berarti bahwa tingkat informasi yang disyaratkan dalam catatan atas laporan keuangan berbeda dari yang ada dalam laporan keuangan utama. Perbedaan tersebut berarti bahwa:

- (a) untuk menyediakan ringkasan terstruktur yang dijelaskan dalam paragraf 16, informasi yang disediakan dalam laporan keuangan utama lebih teragregasi daripada informasi yang disediakan dalam catatan atas laporan keuangan; dan
- (b) untuk menyediakan informasi yang dijelaskan dalam paragraf 17, informasi lebih rinci atas aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas, termasuk *disagregasi* informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, disediakan dalam catatan atas laporan keuangan.

Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Keuangan Utama Atau Diungkapkan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

19. PSAK atau ISAK tertentu dalam SAK Indonesia menentukan informasi yang disyaratkan untuk disajikan dalam laporan keuangan utama atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak perlu menyediakan penyajian atau pengungkapan spesifik yang disyaratkan SAK Indonesia jika informasi yang dihasilkan dari penyajian atau pengungkapan tersebut tidak material. Hal ini juga berlaku meskipun SAK Indonesia mencakup daftar persyaratan spesifik atau mendeskripsikannya sebagai persyaratan minimum.

20. Entitas mempertimbangkan untuk menyediakan pengungkapan tambahan ketika kepatuhan atas persyaratan spesifik dari SAK Indonesia tidak cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi, kejadian dan kondisi lain terhadap laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Utama

21. Paragraf 16 menetapkan bahwa peran laporan keuangan utama adalah untuk menyediakan ringkasan terstruktur yang berguna untuk tujuan yang ditentukan dalam paragraf tersebut (selanjutnya disebut sebagai *ringkasan*

terstruktur berguna). Entitas menggunakan peran laporan keuangan utama untuk menentukan informasi material apa yang akan disajikan dalam laporan tersebut, sebagaimana diatur dalam paragraf 22–24.

22. *Untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna dalam laporan keuangan utama, entitas mematuhi persyaratan spesifik yang menentukan struktur laporan tersebut. Persyaratan spesifik tersebut adalah:*

- (a) untuk laporan laba rugi, persyaratan dalam paragraf 47, 69, 76, dan 78;*
- (b) untuk laporan penyajian penghasilan komprehensif, persyaratan dalam paragraf 86-88;*
- (c) untuk laporan posisi keuangan, persyaratan dalam paragraf 96 dan 104;*
- (d) untuk laporan perubahan ekuitas, persyaratan dalam paragraf 107; dan*
- (e) untuk laporan arus kas, persyaratan dalam PSAK 207 paragraf 10.*

23. *Beberapa PSAK atau ISAK dalam SAK Indonesia mensyaratkan pos spesifik untuk disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan utama (sebagai contoh paragraf 75 dan 103 pada Pernyataan ini). Entitas tidak perlu menyajikan secara terpisah suatu pos dalam laporan keuangan utama jika penyajian terpisah tersebut tidak diperlukan agar laporan menyediakan ringkasan terstruktur berguna. Hal ini berlaku meskipun SAK Indonesia mencakup daftar pos yang disyaratkan secara spesifik atau mendeskripsikan pos tersebut sebagai persyaratan minimum (lihat paragraf PP08).*

24. *Entitas menyajikan pos dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut diperlukan laporan keuangan utama untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna. Ketika entitas menyajikan pos atau subtotal tambahan, maka pos atau subtotal tersebut (lihat paragraf PP09):*

- (a) berisi jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan SAK Indonesia;*
- (b) sesuai dengan struktur laporan yang dibuat berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam paragraf 22;*
- (c) konsisten dari suatu periode ke periode yang lain, sesuai dengan paragraf 30;*
- (d) disajikan tidak lebih dominan daripada total dan subtotal yang disyaratkan SAK Indonesia.*

Identifikasi Laporan Keuangan

25. *Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama (lihat paragraf PP10).*

26. SAK Indonesia berlaku hanya untuk laporan keuangan, dan tidak untuk informasi lain yang disediakan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK Indonesia dengan informasi lain yang mungkin berguna bagi pengguna tetapi bukan subjek yang disyaratkan dalam SAK Indonesia.

27. *Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan secara dominan, dan mengulanginya jika dibutuhkan agar informasi yang disediakan dapat dipahami:*

- (a) nama entitas pelapor atau identitas lain, dan setiap perubahan atas informasi tersebut dari akhir periode pelaporan terdekat sebelumnya;*
- (b) apakah laporan keuangan merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;*
- (c) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup laporan keuangan;*
- (d) mata uang penyajian, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing; dan*
- (e) level pembulatan yang digunakan untuk jumlah dalam laporan keuangan (lihat paragraf PP11).*

Frekuensi Pelaporan

28. *Entitas menyediakan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan. Ketika entitas mengubah akhir periode pelaporan keuangan dan menyediakan laporan keuangan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, maka entitas mengungkapkan, sebagai tambahan dari periode yang dicakup laporan keuangan:*

- (a) alasan penggunaan periode yang lebih panjang atau lebih pendek; dan
- (b) fakta bahwa jumlah yang dicakup dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya dapat dibandingkan.

29. Umumnya entitas secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode satu tahun. Akan tetapi, untuk alasan praktis, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh, untuk periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik tersebut.

Konsistensi Penyajian, Pengungkapan dan Klasifikasi

30. Entitas mempertahankan penyajian, pengungkapan, dan klasifikasi unsur dalam laporan keuangan dari satu periode pelaporan ke periode pelaporan berikutnya, kecuali:

- (a) setelah perubahan signifikan dalam sifat operasi entitas atau setelah kajian atas laporan keuangannya, terlihat jelas bahwa penyajian, pengungkapan, atau klasifikasi yang lain akan lebih tepat dengan mempertimbangkan kriteria untuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lihat paragraf PP12); atau
- (b) SAK Indonesia mensyaratkan perubahan dalam penyajian, pengungkapan, atau klasifikasi.

Informasi Komparatif

31. Kecuali jika SAK Indonesia memperkenankan atau mensyaratkan lain, entitas menyediakan informasi komparatif (yakni, informasi untuk periode pelaporan terdekat sebelumnya) untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode kini. Entitas memasukkan informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif jika diperlukan untuk pemahaman atas laporan keuangan periode kini (lihat paragraf PP13).

32. Entitas menyajikan pelaporan periode kini dan periode terdekat sebelumnya dalam setiap laporan keuangan utama dan dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf PP14-PP15 mengatur persyaratan terkait tambahan informasi komparatif.

Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi, Penyajian Kembali Retrospektif atau Reklasifikasi

33. Jika entitas mengubah penyajian, pengungkapan, atau klasifikasi unsur dalam laporan keuangannya, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan (termasuk pada awal periode terdekat sebelumnya):

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap unsur atau kelas unsur yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

34. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan:

- (a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan
- (b) sifat penyesuaian yang seharusnya akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

35. Peningkatan daya banding informasi antarperiode membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik, khususnya karena memungkinkan penilaian informasi tren untuk tujuan prediktif. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis dilakukan untuk periode pelaporan lalu tertentu untuk mencapai konsistensi dengan periode kini. Sebagai contoh, entitas mungkin belum mengumpulkan data dalam periode lalu yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk membuat ulang informasi tersebut.

36. PSAK 208 mengatur penyesuaian terhadap informasi komparatif yang disyaratkan ketika entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan.

37. *Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas informasi komparatif yang disyaratkan dalam paragraf 31-32 jika:*

- (a) *entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali secara retrospektif atas unsur dalam laporan keuangan, atau mereklasifikasi unsur dalam laporan keuangannya; dan*
- (b) *penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.*

38. Dalam keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 37, entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan, satu laporan posisi keuangan pada:

- (a) akhir periode pelaporan kini;
- (b) akhir periode terdekat sebelumnya; dan
- (c) awal periode terdekat sebelumnya.

39. Ketika entitas disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga dengan menerapkan paragraf 37, maka entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan paragraf 33-36 dan PSAK 208. Akan tetapi, entitas tidak perlu menyediakan catatan atas laporan keuangan terkait laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

40. Tanggal laporan posisi keuangan ketiga adalah tanggal awal periode terdekat sebelumnya terlepas apakah laporan keuangan entitas menyediakan informasi komparatif untuk periode yang lebih dini (sebagaimana diperkenankan dalam paragraf PP14-PP15).

AGREGASI DAN DISAGREGASI

Prinsip Agregasi dan Disagregasi

41. *Untuk tujuan Pernyataan ini, suatu unsur adalah aset, liabilitas, instrumen atau cadangan ekuitas, penghasilan, beban, atau arus kas, atau agregasi atau disagregasi atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, atau arus kas tersebut. Suatu pos adalah unsur yang disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan utama. Informasi material lain mengenai unsur diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kecuali jika penerapan hal tersebut akan menafikan persyaratan spesifik agregasi atau disagregasi dalam SAK Indonesia, maka entitas (lihat paragraf PP16-PP23):*

- (a) *mengklasifikasikan dan mengagregasikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban atau arus kas ke dalam unsur berdasarkan kesamaan karakteristik;*
- (b) *mendisagregasikan unsur berdasarkan karakteristik yang tidak sama;*
- (c) *mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur untuk menyajikan pos dalam laporan keuangan utama yang memenuhi peran laporan keuangan utama dalam memberikan ringkasan terstruktur berguna (lihat paragraf 16);*
- (d) *mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur untuk mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memenuhi peran catatan atas laporan keuangan dalam memberikan informasi material (lihat paragraf 17); dan*
- (e) *memastikan bahwa agregasi dan disagregasi dalam laporan keuangan tidak mengaburkan informasi material (lihat paragraf PP03).*

42. Dengan menerapkan prinsip dalam paragraf 41, entitas mendisagregasikan unsur ketika informasi yang dihasilkan material. Jika, dengan menerapkan paragraf 41(c), entitas tidak menyajikan informasi material dalam laporan keuangan utama, maka entitas mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf PP79 dan PP111 memerinci contoh penghasilan, beban, aset, liabilitas, dan unsur ekuitas yang mungkin memiliki karakteristik cukup takserupa sehingga penyajiannya dalam laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk menyediakan informasi material.

43. *Entitas memberi label dan mendeskripsikan unsur yang disajikan dalam laporan keuangan utama (yaitu, total, subtotal, dan pos) atau unsur yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan cara yang secara tepat merepresentasikan karakteristik unsur tersebut (lihat paragraf PP24-PP26). Untuk*

merepresentasikan suatu unsur dengan tepat, entitas menyediakan seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami unsur tersebut. Dalam beberapa kasus, entitas mungkin perlu memasukkan dalam deskripsi dan penjelasan arti istilah yang digunakan entitas dan informasi tentang bagaimana entitas telah melakukan agregasi atau disagregasi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas.

Saling Hapus

44. *Entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan SAK Indonesia (lihat paragraf PP27-PP28).*

45. Entitas melaporkan secara terpisah aset dan liabilitas, serta penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan kinerja keuangan atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan untuk memahami transaksi, peristiwa atau kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian—sebagai contoh, penyisihan keusangan atas persediaan dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan—bukan merupakan saling hapus.

LAPORAN LABA RUGI

46. *Entitas memasukkan seluruh unsur penghasilan dan beban pada suatu periode pelaporan dalam laporan laba rugi kecuali SAK Indonesia mensyaratkan atau mengizinkan lain (lihat paragraf 88-95 dan PP86).*

Kategori dalam Laporan Laba Rugi

47. *Entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang tercakup dalam laporan laba rugi ke dalam satu dari lima kategori (lihat paragraf PP29):*

- (a) kategori operasi (lihat paragraf 52);*
- (b) kategori investasi (lihat paragraf 53-58);*
- (c) kategori pendanaan (lihat paragraf 59-66);*
- (d) kategori pajak penghasilan (lihat paragraf 67); dan*
- (e) kategori operasi yang dihentikan (lihat paragraf 68).*

48. Paragraf 52–68 mengatur persyaratan untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dalam kategori operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Sebagai tambahan, paragraf PP65–PP76 mengatur persyaratan tentang bagaimana selisih kurs, keuntungan atau kerugian posisi moneter neto, serta keuntungan dan kerugian atas derivatif dan instrumen lindung nilai yang ditetapkan diklasifikasikan dalam kategori tersebut.

Entitas dengan Aktivitas Bisnis Utama Spesifik

49. Untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan, entitas menilai apakah entitas memiliki aktivitas bisnis utama spesifik—yaitu aktivitas bisnis utama (lihat paragraf PP30–PP41):

- (a) melakukan investasi pada jenis aset tertentu, yang selanjutnya disebut sebagai berinvestasi pada aset (lihat paragraf 53); atau
- (b) memberikan pendanaan kepada pelanggan.

50. Dengan menerapkan paragraf 55–58 dan 65–66, entitas dengan aktivitas bisnis utama spesifik mengklasifikasikan dalam kategori operasi sejumlah penghasilan dan beban yang seharusnya diklasifikasikan dalam kategori investasi atau pendanaan jika aktivitas tersebut bukan merupakan aktivitas bisnis utama.

51. Jika entitas:
- (a) berinvestasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.
 - (b) menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.
 - (c) mengidentifikasi hasil yang berbeda dari penilaian mengenai apakah entitas berinvestasi pada aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama (lihat paragraf PP41), maka entitas mengungkapkan:
 - (i) fakta bahwa hasil penilaian telah berubah dan tanggal perubahan tersebut.
 - (ii) jumlah dan klasifikasi unsur penghasilan dan beban sebelum dan sesudah tanggal perubahan hasil penilaian pada periode kini dan jumlah serta klasifikasi pada periode lalu untuk unsur yang klasifikasinya berubah karena perubahan hasil penilaian, kecuali jika tidak praktis untuk melakukan pengungkapan tersebut. Jika entitas tidak mengungkapkan informasi tersebut karena tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Kategori Operasi

52. ***Entitas mengklasifikasikan dalam kategori operasi seluruh penghasilan dan beban yang termasuk dalam laporan laba rugi yang tidak diklasifikasikan dalam (lihat paragraf PP42):***

- (a) ***kategori investasi;***
- (b) ***kategori pendanaan;***
- (c) ***kategori pajak penghasilan; atau***
- (d) ***kategori operasi yang dihentikan.***

Kategori Investasi

53. ***Kecuali sebagaimana dipersyaratkan dalam paragraf 55-58 untuk entitas yang memiliki aktivitas bisnis utama spesifik, entitas mengklasifikasikan dalam kategori investasi, penghasilan dan beban yang ditentukan pada paragraf 54 dari:***

- (a) ***investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi (lihat paragraf PP43-PP44);***
- (b) ***kas dan setara kas; dan***
- (c) ***aset lain jika aset tersebut menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas (lihat paragraf PP45-PP49).***

54. ***Penghasilan dan beban dari aset yang diidentifikasi dalam paragraf 53 yang entitas klasifikasikan ke dalam kategori investasi terdiri dari jumlah yang termasuk dalam laporan laba rugi (lihat paragraf PP47) atas:***

- (a) ***penghasilan yang dihasilkan aset tersebut;***
- (b) ***penghasilan dan beban yang timbul dari pengukuran awal dan selanjutnya aset tersebut, termasuk penghentian pengakuan aset tersebut; dan***
- (c) ***beban inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi dan pelepasan aset—sebagai contoh, biaya transaksi dan biaya untuk menjual aset.***

Entitas dengan Aktivitas Bisnis Utama Spesifik

55. Untuk aset yang ditentukan dalam paragraf 53(a) (yaitu, investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi) yang diinvestasikan oleh entitas sebagai aktivitas bisnis utama (lihat paragraf PP38), entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang ditentukan dalam paragraf 54:

- (a) dalam kategori investasi jika aset tersebut dicatat dengan menerapkan metode ekuitas (lihat paragraf PP43(a) dan PP44(a)); atau
- (b) dalam kategori operasi jika aset tersebut tidak dicatat dengan menerapkan metode ekuitas (lihat paragraf PP43(b)–(c) dan PP44(b)–(c)).

56. Untuk aset yang ditentukan dalam paragraf 53(b) (yaitu, kas dan setara kas), entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang ditentukan dalam paragraf 54 ke dalam kategori investasi kecuali:

- (a) entitas berinvestasi sebagai aktivitas bisnis utama pada aset keuangan dalam ruang lingkup paragraf 53(c)—dalam hal ini entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dalam kategori operasi.
- (b) entitas tidak memenuhi persyaratan pada (a) namun menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama—dalam hal ini entitas mengklasifikasikan:
 - (i) penghasilan dan beban dari kas dan setara kas yang berkaitan dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan, sebagai contoh kas dan setara kas yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan peraturan terkait — dalam kategori operasi.
 - (ii) penghasilan dan beban dari kas dan setara kas yang tidak terkait dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan—dengan menerapkan pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban sebagaimana dimaksud dalam paragraf 54 ke dalam kategori operasi atau kategori investasi. Pilihan kebijakan akuntansi tersebut konsisten dengan pilihan yang dibuat oleh entitas untuk tujuan kebijakan akuntansi terkait atas penghasilan dan beban dari liabilitas pada paragraf 65(a)(ii).

57. Jika entitas yang menerapkan paragraf 56(b) tidak dapat membedakan antara kas dan setara kas yang dijelaskan dalam paragraf 56(b)(i) dan 56(b)(ii), maka entitas menerapkan pilihan kebijakan akuntansi dalam paragraf 56(b)(ii) untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh kas dan setara kas ke dalam kategori operasi.

58. Untuk aset yang ditentukan dalam paragraf 53(c) (yaitu, aset lain jika aset tersebut menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas) yang diinvestasikan oleh entitas sebagai aktivitas bisnis utama (lihat paragraf PP40), entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban sebagaimana dimaksud dalam paragraf 54 ke dalam kategori operasi.

Kategori Pendanaan

59. Untuk menentukan penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori pendanaan, entitas membedakan antara:

- (a) liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana (lihat paragraf PP50-PP51); dan
- (b) liabilitas selain yang dijelaskan pada (a)—yaitu, liabilitas yang timbul dari transaksi yang tidak hanya melibatkan penggalangan dana (lihat paragraf PP53).

60. Untuk liabilitas yang ditentukan dalam paragraf 59(a) (yaitu, liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana), kecuali yang diatur dalam paragraf 63–66, entitas mengklasifikasikan dalam kategori pendanaan jumlah yang termasuk dalam laporan laba rugi untuk:

- (a) penghasilan dan beban yang timbul dari pengukuran awal dan selanjutnya dari liabilitas, termasuk penghentian pengakuan liabilitas (lihat paragraf PP52); dan
- (b) beban inkremental yang secara langsung dapat diatribusikan pada penerbitan dan pengakhiran liabilitas—misalnya, biaya transaksi.

61. Untuk liabilitas yang ditentukan dalam paragraf 59(b) (yaitu, liabilitas yang timbul dari transaksi yang tidak hanya melibatkan penggalangan dana), kecuali seperti yang diatur dalam paragraf 63–64, entitas mengklasifikasikan dalam kategori pendanaan:

- (a) penghasilan dan beban bunga, namun hanya jika entitas mengidentifikasi penghasilan dan beban tersebut untuk tujuan penerapan persyaratan lain dalam SAK Indonesia; dan
- (b) penghasilan dan beban yang timbul dari perubahan suku bunga, namun hanya jika entitas mengidentifikasi penghasilan dan beban tersebut untuk tujuan penerapan persyaratan lain dalam SAK Indonesia.

62. Paragraf PP56–PP57 mengatur bagaimana entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 59–61 untuk kontrak hibrida (*hybrid contract*) yang mengandung kontrak utama yang merupakan liabilitas.

63. Persyaratan dalam paragraf 60–61 tidak berlaku untuk keuntungan dan kerugian atas derivatif dan instrumen lindung nilai yang ditetapkan. Entitas menerapkan paragraf PP70–PP76 untuk mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian tersebut.

64. Entitas mengeluarkan dari kategori pendanaan dan mengklasifikasikan dalam kategori operasi:
- (a) penghasilan dan beban dari kontrak investasi yang diterbitkan dengan fitur partisipasi yang diakui dengan menerapkan PSAK 109: *Instrumen Keuangan* (lihat paragraf PP58); dan
 - (b) penghasilan dan beban keuangan asuransi yang termasuk dalam laporan laba rugi dengan menerapkan PSAK 117: *Kontrak Asuransi*.

Entitas dengan Aktivitas Bisnis Utama Spesifik

65. Jika entitas menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, maka entitas tersebut mengklasifikasikan penghasilan dan beban (lihat paragraf PP59):

- (a) dari liabilitas yang ditentukan dalam paragraf 59(a) (yaitu, liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana):
 - (i) jika liabilitas tersebut berkaitan dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan—dalam kategori operasi.
 - (ii) jika liabilitas tersebut tidak berkaitan dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan—dengan menerapkan pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang ditentukan dalam paragraf 60 dalam kategori operasi atau kategori pendanaan. Pilihan kebijakan akuntansi tersebut konsisten dengan yang dibuat oleh entitas untuk tujuan kebijakan akuntansi terkait untuk penghasilan dan beban dari kas dan setara kas dalam paragraf 56(b)(ii).
- (b) dari liabilitas yang ditentukan dalam paragraf 59(b) (yaitu, liabilitas yang timbul dari transaksi yang tidak hanya melibatkan penggalangan dana):
 - (i) jika penghasilan dan beban ditentukan dalam paragraf 61—dalam kategori pendanaan; atau
 - (ii) jika penghasilan dan beban tidak ditentukan dalam paragraf 61—dalam kategori operasi.

66. Jika entitas yang menerapkan paragraf 65(a) tidak dapat membedakan antara liabilitas yang dijelaskan dalam paragraf 65(a)(i) dan 65(a)(ii), maka entitas menerapkan pilihan kebijakan akuntansi dalam paragraf 65(a)(ii) untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh liabilitas tersebut dalam kategori operasi.

Kategori Pajak Penghasilan

67. Entitas mengklasifikasikan dalam kategori pajak penghasilan, beban atau penghasilan pajak yang termasuk dalam laporan laba rugi dengan menerapkan PSAK 212: *Pajak Penghasilan*, dan selisih kurs yang terkait (lihat paragraf PP65–PP68).

Kategori Operasi yang Dihentikan

68. Entitas mengklasifikasikan dalam kategori operasi yang dihentikan, penghasilan dan beban dari operasi yang dihentikan, sebagaimana dipersyaratkan PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*.

Total dan Subtotal yang Disajikan Dalam Laporan Laba Rugi

69. **Entitas menyajikan total dan subtotal dalam laporan laba rugi untuk:**
- (a) **laba (rugi) operasi (lihat paragraf 70);**
 - (b) **laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan (lihat paragraf 71), tergantung pada paragraf 73; dan**
 - (c) **laba (rugi) (lihat paragraf 72).**

70. Laba (rugi) operasi terdiri dari seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi.

71. Laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan terdiri dari:
- (a) laba (rugi) operasi; dan
 - (b) seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori investasi.

72. Laba (rugi) merupakan total penghasilan dikurangi beban yang termasuk dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, laba (rugi) terdiri dari seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam seluruh kategori dalam laporan laba rugi (lihat paragraf 47).

73. Entitas tidak menerapkan paragraf 69(b) jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam paragraf 65(a)(ii) untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari liabilitas yang tidak terkait dengan ketentuan pendanaan kepada pelanggan ke dalam kategori operasi. Akan tetapi, entitas tersebut menerapkan paragraf 24 untuk menentukan apakah akan menyajikan subtotal tambahan setelah laba operasi dan sebelum kategori pendanaan. Sebagai contoh, entitas akan menyajikan subtotal laba (rugi) operasi serta penghasilan dan beban dari investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas jika entitas menentukan bahwa penyajian tersebut diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna dari penghasilan dan beban.

74. Jika entitas yang dideskripsikan dalam paragraf 73 menyajikan subtotal tambahan yang terdiri dari laba (rugi) operasi dan seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori investasi, maka entitas tidak memberi label subtotal tersebut dengan cara yang menyiratkan bahwa subtotal tersebut tidak termasuk jumlah pendanaan, seperti "laba sebelum pendanaan". Dengan menerapkan paragraf 43, entitas memberi label subtotal tersebut dengan cara yang merepresentasikan secara tepat jumlah yang tercakup dalam subtotal.

Unsur yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi atau Diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

75. *Entitas menyajikan dalam laporan laba rugi, pos untuk (lihat paragraf PP77):*
- (a) *jumlah yang disyaratkan Pernyataan ini, yaitu:*
 - (i) *pendapatan, menyajikan secara terpisah pos yang dideskripsikan dalam (b)(i) dan (c)(i);*
 - (ii) *beban operasi, menyajikan secara terpisah pos yang disyaratkan paragraf 78 dan 82(a);*
 - (iii) *bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;*
 - (iv) *beban atau penghasilan pajak penghasilan; dan*
 - (v) *jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat PSAK 105)*
 - (b) *jumlah yang disyaratkan PSAK 109, yaitu:*
 - (i) *pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif;*
 - (ii) *kerugian penurunan nilai (termasuk pembalikan kerugian penurunan nilai atau keuntungan penurunan nilai) yang ditentukan sesuai dengan PSAK 109 Bagian 5.5;*
 - (iii) *keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;*
 - (iv) *keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih antara nilai wajar aset keuangan dan biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dari aset tersebut pada tanggal reklasifikasi dari pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi ke pengukuran pada nilai wajar melalui laba rugi; dan*
 - (v) *keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi pada tanggal reklasifikasi aset keuangan dari pengukuran pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke pengukuran pada nilai wajar melalui laba rugi; dan*
 - (c) *jumlah yang disyaratkan PSAK 117, yaitu:*
 - (i) *pendapatan asuransi;*
 - (ii) *beban jasa asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup PSAK 117;*
 - (iii) *penghasilan atau beban dari kontrak reasuransi milikan;*
 - (iv) *penghasilan atau beban keuangan asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup PSAK 117;*
 - (v) *penghasilan atau beban keuangan dari kontrak reasuransi milikan.*

76. **Entitas menyajikan dalam laporan laba rugi (di luar seluruh kategori yang dideskripsikan pada paragraf 47) suatu alokasi laba (rugi) untuk periode pelaporan yang dapat diatribusikan kepada:**

- (a) **kepentingan nonpengendali; dan**
- (b) **pemilik entitas induk.**

77. Paragraf PP78–PP79 mengatur persyaratan bagaimana suatu entitas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah akan menyajikan pos tambahan dalam laporan laba rugi atau mengungkapkan unsur dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Beban yang Diklasifikasikan dalam Kategori Operasi

78. **Dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, entitas mengklasifikasikan dan menyajikan beban ke dalam pos dengan cara yang menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna, dengan menggunakan satu atau kedua karakteristik berikut (lihat paragraf PP80-PP85):**

- (a) **sifat beban; atau**
- (b) **fungsi beban dalam entitas.**

79. Setiap pos individual berisi beban operasi diagregasikan berdasarkan hanya satu dari karakteristik berikut, tetapi karakteristik yang sama tidak harus digunakan sebagai dasar agregasi untuk seluruh pos (lihat paragraf PP81).

80. Dalam mengklasifikasikan beban berdasarkan sifat ('beban sifat'), entitas menyediakan informasi mengenai beban operasi terkait dengan sifat sumber daya ekonomik yang dikonsumsi untuk menyelesaikan aktivitas entitas tanpa merujuk pada aktivitas yang terkait dengan sumber daya ekonomik tersebut dikonsumsi. Informasi tersebut termasuk informasi mengenai beban bahan baku, beban imbalan kerja, depresiasi dan amortisasi.

81. Dalam mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi dalam entitas, suatu entitas mengalokasikan dan mengagregasikan beban operasi berdasarkan aktivitas yang terkait dengan sumber daya yang dikonsumsi. Sebagai contoh, biaya pokok penjualan (*cost of sales*) merupakan fungsi pos yang menggabungkan beban terkait dengan produksi entitas atau aktivitas penghasil pendapatan lainnya seperti: beban bahan baku, beban imbalan kerja, depresiasi dan amortisasi. Oleh karena itu, ketika mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi, entitas dapat:

- (a) mengalokasikan ke beberapa pos fungsi (seperti biaya pokok penjualan dan penelitian dan pengembangan) beban yang terkait dengan sumber daya ekonomik dari sifat yang sama (seperti beban imbalan kerja); dan
- (b) memasukkan dalam satu pos fungsi tunggal, suatu alokasi beban yang terkait dengan sumber daya ekonomik dari beberapa sifat (seperti beban bahan baku, beban imbalan kerja, depresiasi dan amortisasi).

82. Jika entitas menyajikan satu atau lebih pos yang mencakup beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, maka entitas:

- (a) menyajikan pos terpisah untuk biaya pokok penjualan, jika entitas mengklasifikasikan beban operasi berdasarkan fungsi yang mencakup fungsi biaya pokok penjualan. Pos tersebut mencakup total beban persediaan yang dideskripsikan dalam PSAK 202: *Persediaan* paragraf 38.
- (b) mengungkapkan deskripsi kualitatif dari sifat beban yang termasuk dalam setiap pos fungsi.

83. **Entitas yang menyajikan satu atau lebih pos yang mencakup beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, juga mengungkapkan dalam satu catatan atas laporan keuangan tunggal:**

- (a) **total untuk masing-masing:**
 - (i) **depresiasi, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh PSAK 216: Aset Tetap paragraf 73(e)(vii), PSAK 240: Properti Investasi paragraf 79(d)(iv) dan PSAK 116: Sewa paragraf 53(a);**
 - (ii) **amortisasi, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh PSAK 238: Aset Takberwujud paragraf 118(e)(vi);**

- (iii) *imbalan kerja, terdiri dari jumlah imbalan kerja yang diakui entitas dengan menerapkan PSAK 219: Imbalan Kerja dan jumlah untuk jasa yang diterima dari pekerja yang diakui entitas dengan menerapkan PSAK 102: Pembayaran Berbasis Saham;*
 - (iv) *kerugian penurunan nilai dan pembalikan penurunan nilai, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh PSAK 236: Penurunan Nilai Aset paragraf 126(a) dan 126(b); dan*
 - (v) *penurunan nilai dan pembalikan penurunan nilai persediaan, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh PSAK 202 paragraf 36(e) dan 36(f); dan*
- (b) *untuk setiap total yang tercantum dalam (a)(i)–(v):*
- (i) *jumlah yang terkait dengan setiap pos dalam kategori operasi (lihat paragraf PP84); dan*
 - (ii) *daftar setiap pos di luar kategori operasi yang juga mencakup jumlah terkait dengan total tersebut.*

84. Paragraf 41 mensyaratkan entitas untuk mendisagregasikan unsur dalam rangka menyediakan informasi material. Akan tetapi, entitas yang menerapkan paragraf 83 dikecualikan dari pengungkapan:

- (a) terkait dengan pos fungsi yang disajikan dalam kategori operasi pada laporan laba rugi –informasi disagregasian mengenai jumlah beban sifat yang termasuk dalam setiap pos, di luar jumlah yang ditentukan dalam paragraf 83; dan
- (b) terkait dengan beban sifat yang secara spesifik disyaratkan dalam SAK Indonesia untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan –informasi disagregasian mengenai jumlah beban yang termasuk dalam setiap pos fungsi yang disajikan dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, di luar jumlah yang ditetapkan pada paragraf 83.

85. Pengecualian dalam paragraf 84 berkaitan dengan disagregasi beban operasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengecualikan entitas dari penerapan persyaratan pengungkapan spesifik terkait dengan beban tersebut dalam SAK Indonesia.

LAPORAN PENYAJIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

86. *Entitas menyajikan dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif, total untuk:*
- (a) *laba (rugi);*
 - (b) *penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf PP86–PP87); dan*
 - (c) *penghasilan komprehensif, yang merupakan total dari laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain.*

87. *Entitas menyajikan alokasi penghasilan komprehensif dalam suatu periode pelaporan yang dapat diatribusikan pada:*

- (a) *kepentingan nonpengendali; dan*
- (b) *pemilik entitas induk.*

Penghasilan Komprehensif Lain

88. *Entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang termasuk dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif dalam satu dari dua kategori:*

- (a) *penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi spesifik dipenuhi; dan*
- (b) *penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.*

89. *Entitas menyajikan, dalam setiap kategori laporan penyajian penghasilan komprehensif, pos untuk:*

- (a) *bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas; dan*
- (b) *unsur lain dari penghasilan komprehensif lain.*

90. *Entitas menyajikan penyesuaian reklasifikasi terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif atau mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan (lihat paragraf PP88-PP-89).*

91. PSAK lain menentukan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya tercakup dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi tersebut dalam Pernyataan ini disebut sebagai penyesuaian reklasifikasi. Entitas memasukkan suatu penyesuaian reklasifikasi dengan komponen penghasilan komprehensif lain terkait pada periode penyesuaian tersebut direklasifikasikan ke laba rugi. Entitas mungkin telah memasukkan jumlah tersebut dalam penghasilan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode kini atau periode lalu. Entitas mengurangi jumlah tersebut dari penghasilan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam penghasilan komprehensif total.

92. Entitas yang mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan unsur penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif.

93. *Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap unsur penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif atau mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan (lihat PSAK 212 paragraf 61A dan 63).*

94. Entitas dapat menyajikan unsur penghasilan komprehensif lain, baik:

- secara neto dari dampak pajak terkait, atau
- sebelum dampak pajak terkait, disertai satu jumlah yang menunjukkan jumlah agregat pajak penghasilan yang terkait dengan unsur tersebut.

95. Jika entitas memilih alternatif dalam paragraf 94(b), maka entitas mengalokasikan pajak pada kategori yang diatur dalam paragraf 88.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Klasifikasi Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

96. *Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 99-102, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan ringkasan terstruktur lebih berguna. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas (lihat paragraf PP90-PP93).*

97. *Apa pun metode penyajian yang digunakan, entitas mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan:*

- tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan, dan*
- lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.*

98. *Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangannya, maka entitas tidak mengklasifikasi aset (liabilitas) pajak tangguhan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek).*

Aset lancar

99. *Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika (lihat paragraf PP94-PP95):*

- entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;*
- entitas memiliki aset terutama untuk tujuan diperdagangkan;*
- entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau*
- aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 207) kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.*

100. Entitas mengklasifikasikan seluruh aset selain yang disebutkan dalam paragraf 99 sebagai aset tidak lancar.

Liabilitas jangka pendek

101. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:
- (a) entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal (lihat paragraf PP96 dan PP107-PP108);
 - (b) entitas memiliki liabilitas tersebut terutama untuk tujuan diperdagangkan (lihat paragraf PP97);
 - (c) liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf PP97-PP98 dan PP107-PP108); atau
 - (d) entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf PP99-PP108).

102. Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas selain yang disebutkan dalam paragraf 101 sebagai liabilitas jangka panjang.

Unsur yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

103. Entitas menyajikan dalam laporan posisi keuangan, pos untuk:
- (a) aset tetap;
 - (b) properti investasi;
 - (c) aset takberwujud;
 - (d) goodwill;
 - (e) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (g), (j), dan (k));
 - (f) portofolio kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117 yang merupakan aset, didisagregasikan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 117 paragraf 78;
 - (g) investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
 - (h) aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 241: Agrikultur;
 - (i) persediaan;
 - (j) piutang usaha dan piutang lain;
 - (k) kas dan setara kas;
 - (l) total aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105;
 - (m) utang usaha dan utang lain;
 - (n) provisi;
 - (o) liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (m) dan (n));
 - (p) portofolio kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117 yang merupakan liabilitas, didisagregasikan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 117 paragraf 78;
 - (q) liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 212;
 - (r) liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 212;
 - (s) liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105.

104. Entitas menyajikan dalam laporan posisi keuangan:
- (a) kepentingan nonpengendali; dan
 - (b) modal saham diterbitkan dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

105. Paragraf PP109–PP111 mengatur persyaratan bagaimana entitas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah menyajikan pos tambahan dalam laporan posisi keuangan atau mengungkapkan unsur dalam catatan atas laporan keuangan.

106. Tergantung pada paragraf 96, Pernyataan ini tidak mengatur urutan atau format penyajian unsur oleh entitas dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, deskripsi yang digunakan dan urutan unsur atau agregasi unsur serupa dapat diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas dan ekuitas entitas. Sebagai contoh, institusi keuangan dapat mengubah deskripsi di paragraf 103 dalam rangka memberikan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu institusi keuangan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

107. *Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas mencakup:*

- (a) *penghasilan komprehensif total selama periode pelaporan, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;*
- (b) *untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 208; dan*
- (c) *untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah (paling sedikit) menyajikan perubahan yang timbul dari:*
 - (i) *laba rugi;*
 - (ii) *penghasilan komprehensif lain; dan*
 - (iii) *transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan dalam bagian-kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian.*

108. PSAK 208 mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi, sepanjang praktis, kecuali jika ketentuan transisi dalam PSAK lain mensyaratkan sebaliknya. PSAK 208 juga mensyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif, sepanjang praktis. Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas tetapi merupakan penyesuaian atas saldo laba awal, kecuali jika suatu PSAK mensyaratkan penyesuaian retrospektif terhadap komponen ekuitas lainnya. Paragraf 107(b) mensyaratkan entitas untuk menyajikan dalam laporan perubahan ekuitas penyesuaian total atas setiap komponen ekuitas yang diakibatkan dari perubahan kebijakan akuntansi dan, secara terpisah, dari koreksi atas kesalahan. Entitas menyajikan penyesuaian tersebut untuk setiap periode pelaporan lalu dan pada awal periode tersebut.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas atau Diungkapkan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

109. *Untuk setiap komponen ekuitas, entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain per unsur (lihat paragraf 107(c)(ii)).*

110. *Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode pelaporan, dan jumlah dividen per saham terkait.*

111. Dalam paragraf 107, komponen ekuitas termasuk, sebagai contoh, setiap kelas modal disetor, saldo akumulasi dari setiap kelas penghasilan komprehensif lain, dan saldo laba.

112. Perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode tersebut. Kecuali untuk perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik (seperti kontribusi ekuitas, perolehan kembali instrumen ekuitas entitas, dan dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung terkait dengan transaksi tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas selama suatu periode merepresentasikan jumlah total penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, yang dihasilkan dari aktivitas entitas selama periode tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur

113. *Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:*
- (a) *informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan (lihat PSAK 208 paragraf 6A-6N) dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan (lihat PSAK 208 paragraf 27A-27I);*
 - (b) *informasi yang disyaratkan SAK Indonesia yang tidak disajikan dalam laporan keuangan utama; dan*
 - (c) *informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan utama, tetapi diperlukan untuk memahami laporan keuangan utama tersebut (lihat paragraf 20).*

114. *Entitas, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis (lihat paragraf PP112). Dalam menentukan penyajian secara sistematis, entitas mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas membuat referensi silang atas setiap unsur dalam laporan keuangan utama pada informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Jika jumlah yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dicakup dalam satu atau lebih pos dalam laporan keuangan utama, maka entitas mengungkapkan pos yang mencakup jumlah tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.*

115. *Entitas dapat mengungkapkan catatan yang memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan dalam bagian terpisah dalam laporan keuangan.*

116. *Jika tidak diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan, entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:*

- (a) *domisili dan bentuk legal entitas, negara tempat pendirian dan alamat kantor terdaftar (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor terdaftar);*
- (b) *deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas;*
- (c) *nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha; dan*
- (d) *bagi entitas yang memiliki umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas.*

Ukuran Kinerja Tetap Manajemen

Identifikasi Ukuran Kinerja Tetap Manajemen

117. *Ukuran kinerja tetap manajemen adalah subtotal penghasilan dan beban yang (lihat paragraf PP113–PP122):*

- (a) *digunakan entitas dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan;*
- (b) *digunakan entitas untuk mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan; dan*
- (c) *tidak tercantum dalam paragraf 118, atau disyaratkan secara spesifik untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia.*

118. *Subtotal penghasilan dan beban yang bukan merupakan ukuran kinerja tetap manajemen adalah:*

- (a) *laba (rugi) bruto (pendapatan dikurangi biaya pokok penjualan) dan subtotal serupa (lihat paragraf PP123);*
- (b) *laba (rugi) operasi sebelum depresiasi, amortisasi dan penurunan nilai dalam ruang lingkup PSAK 236;*
- (c) *laba (rugi) operasi serta penghasilan dan beban dari seluruh investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas;*
- (d) *untuk entitas yang menerapkan paragraf 73, subtotal yang mencakup laba (rugi) operasi serta seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori investasi;*
- (e) *laba (rugi) sebelum pajak penghasilan; dan*
- (f) *laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan.*

119. *Entitas beranggapan bahwa subtotal penghasilan dan beban yang digunakannya dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan, kecuali, dengan menerapkan paragraf 120, entitas membantah anggapan tersebut.*

120. Entitas diperkenankan untuk membantah anggapan yang dideskripsikan dalam paragraf 119 dan menegaskan bahwa suatu subtotal tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan, namun hanya jika entitas memiliki informasi wajar dan didukung yang tersedia dan menunjukkan dasar penegasan tersebut (lihat paragraf PP124–PP131).

Pengungkapan Ukuran Kinerja Tetap Manajemen

121. *Tujuan pengungkapan ukuran kinerja tetap manajemen adalah agar entitas menyediakan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami:*

- (a) aspek kinerja keuangan yang, dalam pandangan manajemen, dikomunikasikan melalui ukuran kinerja tetap manajemen; dan*
- (b) bagaimana ukuran kinerja tetap manajemen dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam SAK Indonesia.*

122. *Entitas mengungkapkan informasi mengenai seluruh ukuran yang memenuhi definisi ukuran kinerja tetap manajemen di paragraf 117 dalam satu catatan atas laporan keuangan tunggal (lihat paragraf PP132–PP133). Catatan atas laporan keuangan ini termasuk pernyataan bahwa ukuran kinerja tetap manajemen menyajikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan dan belum tentu dapat dibandingkan dengan ukuran yang memiliki label atau deskripsi serupa yang disajikan oleh entitas lain.*

123. *Entitas memberi label dan mendeskripsikan setiap ukuran kinerja tetap manajemen dengan cara yang jelas dan dapat dipahami yang tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan (lihat paragraf PP134–PP135). Untuk setiap ukuran kinerja tetap manajemen, entitas mengungkapkan:*

- (a) deskripsi aspek kinerja keuangan yang, menurut pandangan manajemen, dikomunikasikan melalui ukuran kinerja tetap manajemen. Deskripsi ini mencakup penjelasan mengapa, dalam pandangan manajemen, ukuran kinerja tetap manajemen menyediakan informasi yang berguna mengenai kinerja keuangan entitas.*
- (b) bagaimana perhitungan ukuran kinerja tetap manajemen.*
- (c) rekonsiliasi antara ukuran kinerja tetap manajemen dengan subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum pada paragraf 118 atau dengan total atau subtotal yang secara spesifik disyaratkan untuk disajikan atau diungkaplan oleh SAK Indonesia (lihat paragraf PP136–PP140).*
- (d) dampak pajak penghasilan (yang ditentukan dengan menerapkan paragraf PP141) dan dampak kepentingan nonpengendali untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi yang disyaratkan oleh (c).*
- (e) deskripsi bagaimana entitas menerapkan paragraf PP141 untuk menentukan dampak pajak penghasilan yang disyaratkan oleh (d).*

124. Jika entitas mengubah cara perhitungan ukuran kinerja tetap manajemen, menambah ukuran kinerja tetap manajemen baru, berhenti menggunakan ukuran kinerja tetap manajemen yang sebelumnya telah diungkapkan, atau mengubah cara penentuan dampak pajak penghasilan atas unsur rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 123(d), maka entitas mengungkapkan:

- (a) penjelasan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami perubahan, penambahan atau penghentian dan dampaknya.*
- (b) alasan perubahan, penambahan, atau penghentian.*
- (c) penyajian kembali informasi komparatif untuk mencerminkan perubahan, penambahan, atau penghentian kecuali tidak praktis untuk melakukannya. Pilihan entitas atas ukuran kinerja tetap manajemen bukan merupakan pilihan kebijakan akuntansi. Namun demikian, dalam menilai apakah menyajikan kembali informasi komparatif adalah tidak praktis, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 208 paragraf 50–53.*

125. Jika entitas tidak mengungkapkan penyajian kembali informasi komparatif yang disyaratkan paragraf 124(c) karena tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Modal

126. ***Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal dalam catatan atas laporan keuangan.***

127. Untuk memenuhi paragraf 126, entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
- (a) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal, termasuk:
 - (i) deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal;
 - (ii) ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut dimasukkan dalam pengelolaan modal; dan
 - (iii) bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola modal.
 - (b) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. Sebagian entitas menganggap liabilitas keuangan tertentu (contohnya bentuk tertentu utang subordinasi) sebagai bagian dari modal. Entitas lain menganggap modal tidak termasuk komponen ekuitas tertentu (contohnya komponen yang timbul dari lindung nilai arus kas).
 - (c) setiap perubahan dalam (a) dan (b) dari periode pelaporan terdekat sebelumnya.
 - (d) apakah selama periode pelaporan entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal yang berlaku bagi entitas.
 - (e) ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut.

128. Entitas mendasarkan pengungkapan catatan pada paragraf 127 pada informasi yang disediakan secara internal kepada personel manajemen kunci.

129. Entitas dapat mengelola modal dengan berbagai cara dan tunduk pada sejumlah persyaratan permodalan yang berbeda. Sebagai contoh, entitas konglomerasi mungkin mencakup entitas yang melakukan aktivitas asuransi dan aktivitas perbankan dan entitas tersebut mungkin melakukan kegiatan operasi di beberapa yurisdiksi. Ketika pengungkapan agregat atas persyaratan modal dan bagaimana modal dikelola tidak menyediakan informasi yang berguna atau akan mengacaukan pemahaman pengguna laporan keuangan atas sumber daya permodalan entitas, maka entitas mengungkapkan informasi terpisah untuk setiap persyaratan modal yang berlaku bagi masing-masing entitas.

Pengungkapan Lain

130. ***Entitas menyajikan baik dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:***

- (a) ***untuk setiap kelas modal saham:***
 - (i) ***jumlah saham modal dasar;***
 - (ii) ***jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;***
 - (iii) ***nilai nominal per saham, atau pernyataan bahwa saham tersebut tidak memiliki nilai nominal;***
 - (iv) ***rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode pelaporan;***
 - (v) ***hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pembayaran kembali modal;***
 - (vi) ***saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh entitas asosiasi; dan***
 - (vii) ***saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk persyaratan dan jumlah; dan***
- (b) ***deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap cadangan dalam ekuitas***

131. ***Entitas tanpa modal saham, seperti persekutuan atau unit perwalian, mengungkapkan informasi yang setara dengan yang disyaratkan oleh paragraf 130(a), yang memperlihatkan perubahan selama periode pelaporan dari setiap kategori kepentingan ekuitas, serta hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kategori kepentingan ekuitas.***

132. *Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:*
- (a) *jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode pelaporan, serta jumlah terkait dividen per lembar saham; dan*
 - (b) *jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.*

LAMPIRAN A DEFINISI ISTILAH

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Draf Eksposur PSAK 118.

Agregasi. Penggabungan atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban atau arus kas yang memiliki kesamaan karakteristik dan yang termasuk dalam klasifikasi yang sama.

Catatan atas laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan (*financial statements*) yang disediakan sebagai tambahan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama.

Disagregasi. Pemisahan suatu unsur menjadi bagian komponen yang memiliki karakteristik yang tidak sama.

Informasi material. Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan (*financial statements*) bertujuan umum atas dasar laporan keuangan (*financial statements*) tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

Klasifikasi. Pengurutan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas berdasarkan kesamaan karakteristik.

Laba (rugi). Total penghasilan dikurangi beban yang termasuk dalam laporan laba rugi.

Laba (rugi) operasi. Total seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi.

Laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan. Total laba (rugi) operasi dan seluruh penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori investasi.

Laporan keuangan (financial reports) bertujuan umum. Laporan (*report*) yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi pengguna utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut melibatkan keputusan mengenai:

- (a) pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang;
- (b) penyediaan atau penjualan pinjaman dan bentuk kredit lainnya; atau
- (c) pelaksanaan hak suara atas, atau memengaruhi, tindakan manajemen entitas yang berdampak pada penggunaan sumber daya ekonomik entitas.

Laporan keuangan (*financial reports*) bertujuan umum termasuk – namun tidak terbatas pada – laporan keuangan (*financial statements*) bertujuan umum entitas dan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan.

Laporan keuangan (financial statements) bertujuan umum. Bentuk tertentu laporan keuangan (*financial reports*) bertujuan umum yang menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas pelapor.

Laporan keuangan utama. Laporan kinerja keuangan, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Pemilik. Pemegang atas klaim yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Penghasilan komprehensif total. Perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Penghasilan komprehensif lain. Unsur penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang diakui di luar laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK Indonesia.

Penyesuaian reklasifikasi. Jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi pada periode pelaporan kini yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode kini atau periode lalu.

Ringkasan terstruktur berguna. Ringkasan terstruktur dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas pelapor yang disediakan dalam laporan keuangan utama, yang berguna untuk:

- (a) memperoleh tinjauan terpadu atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas;
- (b) membuat perbandingan antar entitas, dan antar periode pelaporan untuk entitas yang sama; dan
- (c) mengidentifikasi unsur atau aspek di mana pengguna laporan keuangan (*financial statements*) mungkin ingin mendapatkan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan.

SAK Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Ukuran kinerja tetapan manajemen. Subtotal atas penghasilan dan beban yang:

- (a) digunakan entitas dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan (*financial statements*);
- (b) digunakan entitas untuk mengomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan (*financial statements*); dan
- (c) tidak tercantum di PSAK 118 paragraf 118, atau disyaratkan secara spesifik untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia.

LAMPIRAN B

PEDOMAN PENERAPAN

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Draf Eksposur PSAK 118. Lampiran ini menjelaskan penerapan paragraf 01-132 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK.

PERSYARATAN UMUM UNTUK LAPORAN KEUANGAN*

Materialitas

PP01. Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

PP02. Materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan.

PP03. Informasi dikaburkan jika dikomunikasikan dengan cara yang akan memiliki dampak yang serupa bagi pengguna utama laporan keuangan dengan menghilangkan atau salah menyajikan informasi tersebut. Berikut ini adalah contoh keadaan yang dapat mengakibatkan informasi material dikaburkan:

- (a) informasi material mengenai unsur, transaksi atau peristiwa lain diungkapkan dalam laporan keuangan tetapi bahasa yang digunakan samar atau tidak jelas;
- (b) informasi material mengenai unsur, transaksi atau peristiwa lain tersebar di seluruh laporan keuangan;
- (c) unsur, transaksi atau peristiwa lain yang takserupa secara tidak tepat diagregasikan;
- (d) unsur, transaksi atau peristiwa lain yang serupa didisagregasikan secara tidak tepat; dan
- (e) keterpahaman laporan keuangan berkurang sebagai akibat dari informasi material tertutupi oleh informasi tidak material sehingga pengguna utama tidak dapat menentukan informasi mana yang material.

PP04. Penilaian apakah informasi diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum entitas pelapor tertentu mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan karakteristik dari pengguna laporan tersebut dan juga mempertimbangkan keadaan entitas itu sendiri.

PP05. Banyak investor, pemberi pinjaman dan kreditor lain saat ini dan potensial tidak dapat mensyaratkan entitas pelapor untuk menyediakan informasi secara langsung kepada mereka dan harus bergantung pada laporan keuangan bertujuan umum untuk banyak informasi keuangan yang mereka butuhkan. Sebagai akibatnya, mereka adalah pengguna utama kepada siapa laporan keuangan bertujuan umum ditujukan. Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai atas aktivitas bisnis dan ekonomik dan yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Kadang-kadang, bahkan pengguna yang berpengetahuan luas dan tekun mungkin perlu mencari bantuan penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks.

Peran Laporan Keuangan Utama dan Catatan atas Laporan Keuangan

PP06. Dengan menerapkan paragraf 17(a), entitas menyediakan dalam catatan atas laporan keuangan informasi yang diperlukan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Contoh informasi tersebut meliputi:

- (a) disagregasi pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama;
- (b) deskripsi karakteristik pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama; dan
- (c) informasi mengenai metode, asumsi dan pertimbangan yang digunakan dalam mengakui, mengukur, dan menyajikan unsur yang termasuk dalam laporan keuangan utama.

*Dalam PSAK 118 Lampiran B ini, seluruh kata "laporan keuangan" adalah terjemahan dari kata "*financial statements*".

PP07. Dengan menerapkan paragraf 17(b), entitas melengkapi laporan keuangan utama dengan informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan laporan keuangan—yakni:

- (a) informasi spesifik yang disyaratkan oleh SAK Indonesia (lihat paragraf 19)—misalnya:
 - (i) informasi yang disyaratkan oleh PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi* tentang aset kontingensi dan liabilitas kontingensi yang tidak diakui suatu entitas; dan
 - (ii) informasi yang disyaratkan oleh PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang eksposur entitas pada berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar; dan
- (b) informasi tambahan atas informasi yang disyaratkan secara spesifik oleh SAK Indonesia (lihat paragraf 20).

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Utama

PP08. Paragraf 23 menjelaskan bahwa entitas tidak perlu menyajikan secara terpisah suatu pos dalam laporan keuangan utama jika hal tersebut tidak diperlukan agar laporan tersebut dapat menyediakan ringkasan terstruktur berguna, meskipun pos tersebut disyaratkan oleh SAK Indonesia. Misalnya, entitas tidak perlu menyajikan pos yang tercantum dalam paragraf 75 jika hal tersebut tidak diperlukan agar laporan laba rugi dapat memberikan ringkasan terstruktur berguna atas penghasilan dan beban, atau pos yang tercantum dalam paragraf 103 jika hal tersebut tidak diperlukan agar laporan posisi keuangan dapat memberikan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika entitas tidak menyajikan pos yang tercantum dalam paragraf 75 dan 103, maka entitas mengungkapkan unsur tersebut dalam catatan atas laporan keuangan jika informasi yang dihasilkan bersifat material (lihat paragraf 42).

PP09. Sebaliknya, dengan menerapkan paragraf 24, entitas menyajikan pos tambahan atas pos yang tercantum dalam paragraf 75 dan 103 jika penyajian tersebut diperlukan agar laporan laba rugi dapat menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas penghasilan dan beban atau agar laporan posisi keuangan dapat memberikan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas, dan ekuitas (lihat paragraf PP78–PP79 dan PP109–PP111).

Identifikasi Laporan Keuangan

PP10. Paragraf 25 mensyaratkan entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Entitas memenuhi persyaratan ini dengan memberikan judul yang sesuai untuk halaman, laporan, catatan, kolom, dan sejenisnya. Pertimbangan diperlukan dalam menentukan cara terbaik untuk menyajikan informasi tersebut. Sebagai contoh, jika entitas menyediakan laporan keuangan secara elektronik, maka entitas mempertimbangkan cara lain untuk memenuhi persyaratan tersebut—misalnya, dengan pemberian label digital yang sesuai pada informasi yang disediakan dalam laporan keuangan.

PP11. Entitas sering kali membuat laporan keuangan lebih dapat dipahami dengan menyediakan informasi dalam unit ribuan atau jutaan dari mata uang penyajian. Praktik ini dapat diterima sepanjang entitas mengungkapkan level pembulatan dan tidak menghilangkan informasi material.

Konsistensi Penyajian, Pengungkapan, dan Klasifikasi

PP12. Paragraf 30(a) mensyaratkan entitas untuk mengubah penyajian, pengungkapan atau klasifikasi unsur dalam laporan keuangan jika terlihat jelas bahwa penyajian, pengungkapan atau klasifikasi lain akan lebih tepat. Sebagai contoh, akuisisi atau pelepasan yang signifikan, atau kaji ulang atas laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu diubah. Entitas diperkenankan untuk mengubah penyajian, pengungkapan atau klasifikasi unsur dalam laporan keuangan, hanya jika perubahan tersebut menyediakan informasi yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan dan jika entitas kemungkinan akan terus menggunakan penyajian, pengungkapan atau klasifikasi revisian, sehingga keterbandingan antarperiode tidak terganggu. Ketika membuat perubahan tersebut, entitas mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 33-34.

Informasi Komparatif

Informasi Komparatif yang Disyaratkan

PP13. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disediakan dalam laporan keuangan untuk periode pelaporan terdekat sebelumnya masih tetap relevan pada periode kini. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan dalam periode kini rincian tentang sengketa hukum, yang hasil akhirnya tidak diketahui secara pasti pada akhir periode terdekat sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat dari pengungkapan informasi bahwa terdapat ketidakpastian pada akhir periode terdekat sebelumnya dan dari pengungkapan informasi mengenai langkah yang telah dilakukan selama periode untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Informasi Komparatif Tambahan

PP14. Entitas dapat menyediakan informasi komparatif sebagai tambahan atas informasi komparatif yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan SAK Indonesia. Informasi komparatif tambahan ini dapat terdiri dari satu atau lebih laporan keuangan utama yang dirujuk dalam paragraf 10, tetapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Dalam kasus ini, entitas mengungkapkan informasi untuk laporan keuangan utama tambahan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

PP15. Sebagai contoh, entitas dapat menyajikan laporan kinerja keuangan ketiga (dengan demikian menyajikan periode pelaporan berjalan, periode terdekat sebelumnya, dan satu periode komparatif tambahan). Namun, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga, laporan arus kas ketiga, atau laporan perubahan ekuitas ketiga (yaitu laporan keuangan utama komparatif tambahan). Entitas disyaratkan untuk mengungkapkan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif terkait dengan laporan kinerja keuangan tambahan tersebut.

AGREGASI DAN DISAGREGASI

Prinsip Agregasi dan Disagregasi

Proses Agregasi dan Disagregasi

PP16. Laporan keuangan adalah hasil dari entitas yang memproses sejumlah besar transaksi dan peristiwa lainnya. Transaksi dan peristiwa lain tersebut menimbulkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas.

PP17. Untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 41, entitas mengagregasikan unsur berdasarkan kesamaan karakteristik (yaitu, mengagregasikan unsur yang memiliki karakteristik serupa) dan mendisagregasikan unsur berdasarkan karakteristik yang tidak sama (yaitu, mendisagregasikan unsur yang memiliki karakteristik takserupa). Dalam melakukannya, entitas:

- (a) mengidentifikasi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang timbul dari transaksi individual atau peristiwa lain;
- (b) mengklasifikasikan dan mengagregasikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas ke dalam unsur berdasarkan karakteristiknya (misalnya, sifatnya, fungsinya, dasar pengukurannya, atau karakteristik lainnya) sehingga menghasilkan penyajian pos dalam laporan keuangan utama dan pengungkapan unsur dalam catatan atas laporan keuangan yang memiliki setidaknya satu karakteristik serupa; dan
- (c) mendisagregasikan unsur berdasarkan karakteristik takserupa:
 - (i) dalam laporan keuangan utama, sepanjang diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 16); dan
 - (ii) dalam catatan atas laporan keuangan, sepanjang diperlukan untuk menyediakan informasi material (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 17).

PP18. Entitas dapat menerapkan langkah dalam paragraf PP17(a)–PP17(c) dalam urutan yang bervariasi untuk menerapkan prinsip agregasi dan disagregasi dalam paragraf 41.

Dasar Agregasi dan Disagregasi

PP19. Paragraf PP16–PP18 menjelaskan bahwa entitas menggunakan pertimbangannya untuk mengagregasikan dan mendisagregasikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dari transaksi individual dan peristiwa lain berdasarkan karakteristik yang serupa dan takserupa. Paragraf PP78 dan PP110 memberikan contoh karakteristik yang dipertimbangkan entitas dalam membuat pertimbangannya.

PP20. Semakin serupa karakteristik aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, semakin besar kemungkinan bahwa mengagregasikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas tersebut akan memenuhi peran laporan keuangan utama (yaitu, untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 16) atau catatan atas laporan keuangan (yaitu, untuk menyediakan informasi material sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 17). Semakin takserupa karakteristik aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, semakin besar kemungkinan bahwa mendisagregasikan unsur tersebut akan memenuhi peran laporan keuangan utama atau catatan atas laporan keuangan.

PP21. Unsur yang diagregasikan dan disajikan sebagai pos dalam laporan keuangan utama memiliki setidaknya satu karakteristik serupa selain dari memenuhi definisi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, atau arus kas. Namun, karena peran laporan keuangan utama adalah untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna, pos dalam laporan keuangan utama juga cenderung mengagregasikan unsur yang memiliki karakteristik yang cukup takserupa sehingga informasi tentang unsur disagregasian tersebut material.

PP22. Dengan menerapkan paragraf 41, entitas mendisagregasikan unsur yang memiliki karakteristik takserupa ketika informasi yang dihasilkan bersifat material. Satu karakteristik takserupa tunggal dapat menghasilkan informasi tentang unsur disagregasian menjadi material.

PP23. Sebagai contoh, entitas mungkin menyajikan aset keuangan yang terdiri dari investasi pada instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen utang secara terpisah dari aset nonkeuangan dalam laporan posisi keuangan. Aset keuangan tersebut memiliki karakteristik takserupa karena memiliki dasar pengukuran yang berbeda—beberapa diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang lainnya pada biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna, perlu untuk menyajikan pos yang mendisagregasikan aset keuangan berdasarkan dasar pengukuran tersebut. Disagregasi tersebut menghasilkan pos yang terdiri dari investasi pada instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pos yang terdiri dari investasi pada instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Karena investasi pada instrumen ekuitas takserupa dengan investasi pada instrumen utang dalam hal bahwa masing-masing investasi mengekspos entitas pada risiko yang berbeda, entitas akan menilai apakah disagregasi lebih lanjut aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menjadi investasi pada instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen utang dalam laporan posisi keuangan diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna. Jika tidak, dan jika informasi yang dihasilkan material, entitas akan perlu mengungkapkan investasi pada instrumen ekuitas secara terpisah dari investasi pada instrumen utang dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, jika, misalnya, investasi pada instrumen ekuitas memiliki karakteristik takserupa lain, maka entitas akan disyaratkan untuk mendisagregasikan lebih lanjut investasi pada instrumen ekuitas tersebut dalam catatan atas laporan keuangan jika informasi yang dihasilkan bersifat material.

Deskripsi Unsur

PP24. Paragraf 43 mensyaratkan entitas untuk memberi label dan menjelaskan unsur yang disajikan atau diungkapkan dengan cara yang secara tepat merepresentasikan karakteristik unsur tersebut. Unsur tersebut sering kali merupakan agregasi unsur yang timbul dari transaksi individual atau peristiwa lain dan dapat bervariasi baik merupakan agregasi atas unsur yang informasinya material dan unsur yang informasinya tidak material. Secara khusus, baik dalam laporan keuangan utama maupun dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) unsur yang informasinya material dapat diagregasikan dengan unsur lain yang informasinya juga material—entitas dapat menyediakan agregasi tersebut untuk meringkas informasi tetapi juga akan disyaratkan untuk mengungkapkan informasi mengenai masing-masing unsur;

- (b) unsur yang informasinya material dapat diagregasikan dengan unsur yang informasinya tidak material—entitas akan disyaratkan untuk menyediakan informasi tentang unsur disagregasian hanya jika informasi yang tidak material mengaburkan informasi material; atau
- (c) unsur yang informasinya tidak material dapat diagregasikan dengan unsur lain yang informasinya tidak material—entitas dapat menyediakan agregasi tersebut untuk melengkapi suatu daftar unsur dan tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi tentang unsur disagregasian, sesuai dengan paragraf PP26(b).

PP25. Entitas memberi label unsur yang disajikan atau diungkapkan sebagai ‘lainnya’ hanya jika entitas tidak dapat menemukan label yang lebih informatif. Contoh bagaimana entitas dapat menemukan label yang lebih informatif adalah:

- (a) jika suatu unsur yang informasinya material diagregasikan dengan unsur yang informasinya tidak material, maka entitas mencari label yang mendeskripsikan unsur yang informasinya material; dan
- (b) jika unsur yang informasinya tidak material diagregasikan, maka entitas:
 - (i) mengagregasikan unsur yang memiliki karakteristik serupa dan mendeskripsikannya dengan cara yang merepresentasikan secara tepat karakteristik serupa tersebut; atau
 - (ii) mengagregasikan unsur dengan unsur lain yang tidak memiliki karakteristik serupa dan mendeskripsikannya dengan cara yang merepresentasikan secara tepat karakteristik unsur yang takserupa tersebut.

PP26. Jika entitas tidak dapat menemukan label yang lebih informatif daripada ‘lainnya’:

- (a) untuk agregasi apa pun—entitas menggunakan label yang mendeskripsikan unsur agregasian setepat mungkin, misalnya, ‘beban operasional lainnya’ atau ‘beban keuangan lainnya’.
- (b) untuk agregasi yang hanya terdiri dari unsur yang informasinya tidak material—entitas mempertimbangkan apakah jumlah agregasian tersebut cukup besar sehingga pengguna laporan keuangan dapat selayaknya mempertanyakan apakah jumlah tersebut mencakup unsur yang informasinya mungkin material. Jika demikian, informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah informasi material. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, entitas mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang jumlah tersebut—misalnya:
 - (i) penjelasan bahwa tidak ada unsur yang informasinya akan material yang termasuk dalam jumlah tersebut; atau
 - (ii) penjelasan bahwa jumlah tersebut terdiri dari beberapa unsur yang informasinya tidak akan material, dengan indikasi atas sifat dan jumlah unsur terbesar.

Saling Hapus

PP27. Paragraf 44 melarang entitas untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban kecuali disyaratkan atau diperkenankan oleh SAK Indonesia. Misalnya, PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* mensyaratkan entitas untuk mengukur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dalam jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan. Jumlah pendapatan yang diakui mencerminkan diskon dagang dan rabat volume yang disepakati entitas. Sebaliknya, entitas mungkin melakukan, dalam aktivitas normalnya, transaksi lain yang tidak menghasilkan pendapatan tetapi insidental terhadap aktivitas penghasil pendapatan yang utama. Entitas akan menyajikan dalam laporan keuangan utama atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan hasil transaksi tersebut dengan saling hapus penghasilan dan beban terkait yang timbul atas transaksi yang sama, ketika penyajian atau pengungkapan tersebut mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Sebagai contoh:

- (a) entitas menyajikan dalam laporan keuangan utama atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan keuntungan dan kerugian pelepasan aset tidak lancar dengan mengurangi dari jumlah imbalan atas pelepasan tersebut jumlah tercatat aset dan beban penjualan terkait; dan
- (b) entitas dapat mengurangi pengeluaran terkait provisi yang diakui sesuai dengan PSAK 237 dan yang digantikan berdasarkan pengaturan kontraktual dengan pihak ketiga (misalnya, perjanjian garansi pemasok) dengan penggantian terkait.

PP28. Sebagai tambahan, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang serupa secara neto, sebagai contoh, keuntungan dan kerugian dari transaksi valuta asing atau keuntungan dan kerugian yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan yang termasuk dalam kategori yang sama dalam laporan kinerja keuangan dengan menerapkan paragraf 47–68. Akan tetapi, entitas mengungkapkan keuntungan dan kerugian tersebut secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan jika pengungkapan tersebut menyediakan informasi material.

LAPORAN LABA RUGI

Kategori dalam Laporan Laba Rugi

PP29. Paragraf 47 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang termasuk dalam laporan laba rugi ke dalam satu dari lima kategori. Kategori operasi mencakup seluruh penghasilan dan beban yang termasuk dalam laporan laba rugi yang tidak diklasifikasikan dalam kategori lain (lihat paragraf 52). Penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi yang dihentikan dengan menerapkan paragraf 68 tidak tunduk pada persyaratan untuk mengklasifikasikan unsur penghasilan dan beban dalam kategori yang tercantum dalam paragraf 47(a)–(d). Penghasilan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori pajak penghasilan dengan menerapkan paragraf 67 tidak tunduk pada persyaratan untuk mengklasifikasikan unsur penghasilan dan beban dalam kategori yang tercantum dalam paragraf 47(a)–(c).

Penilaian Aktivitas Bisnis Utama Tertentu

PP30. Paragraf 49 mensyaratkan entitas untuk menilai apakah entitas melakukan investasi pada aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama. Suatu entitas mungkin memiliki lebih dari satu aktivitas bisnis utama. Sebagai contoh, entitas manufaktur suatu produk dan juga menyediakan pendanaan kepada pelanggan dapat menentukan bahwa aktivitas manufaktur dan aktivitas pendanaan pelanggan keduanya merupakan aktivitas bisnis utama. Untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban ke dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan sebagaimana disyaratkan dalam Pernyataan ini, entitas hanya perlu menentukan apakah salah satu, atau keduanya, dari aktivitas investasi pada aset dan penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama.

PP31. Contoh entitas yang mungkin melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama meliputi:

- entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*;
- perusahaan properti investasi; dan
- asuradur.

PP32. Contoh entitas yang mungkin menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama meliputi:

- bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya;
- entitas yang memberikan pendanaan kepada pelanggan agar pelanggan tersebut dapat membeli produk entitas; dan
- pesewa yang memberikan pendanaan kepada pelanggan dalam sewa pembiayaan.

PP33. Apakah investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama entitas adalah sebuah fakta dan bukan sekadar asersi. Entitas menggunakan pertimbangannya untuk menilai apakah investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama dan penilaian tersebut didasarkan pada bukti.

PP34. Umumnya, investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan kemungkinan merupakan aktivitas bisnis utama suatu entitas jika entitas tersebut menggunakan jenis subtotal tertentu sebagai indikator penting kinerja operasi. Jenis subtotal tertentu adalah subtotal yang serupa dengan laba bruto (lihat paragraf PP123) yang mencakup penghasilan dan beban yang akan diklasifikasikan dalam kategori investasi atau pendanaan jika investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan bukan merupakan aktivitas bisnis utama.

PP35. Bukti bahwa subtotal serupa dengan laba bruto yang dideskripsikan dalam paragraf PP123 merupakan indikator penting kinerja operasi termasuk penggunaan subtotal tersebut untuk:

- (a) menjelaskan kinerja operasi secara eksternal; atau
- (b) menilai atau memantau kinerja operasi secara internal.

PP36. Informasi mengenai segmen dapat memberikan bukti bahwa investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama jika entitas menerapkan PSAK 108: *Segmen Operasi*. Secara khusus:

- (a) jika segmen dilaporkan terdiri dari satu aktivitas bisnis tunggal, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja segmen dilaporkan merupakan indikator penting atas kinerja operasi entitas dan bahwa aktivitas bisnis segmen dilaporkan merupakan aktivitas bisnis utama entitas; dan
- (b) jika segmen operasi terdiri dari satu aktivitas bisnis, hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis tersebut mungkin merupakan aktivitas bisnis utama entitas jika kinerja segmen operasi tersebut merupakan indikator penting atas kinerja operasi entitas sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP34.

PP37. Entitas menilai apakah investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama entitas pelapor secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian apakah investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama oleh entitas pelapor yang merupakan grup konsolidasian dan oleh entitas pelapor yang merupakan salah satu entitas anak dalam grup konsolidasian dapat memberikan hasil yang berbeda.

PP38. Entitas menilai apakah entitas melakukan investasi sebagai aktivitas bisnis utama pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi yang tidak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (lihat paragraf PP43(b)–(c) dan PP44(b)–(c)) dengan aset individual atau menggunakan kelompok aset dengan kesamaan karakteristik. Jika entitas menyusun laporan keuangan tersendiri sebagaimana ditentukan dalam PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri* dan melakukan penilaian terhadap kelompok aset, maka entitas menggunakan kelompok aset yang konsisten dengan kategori yang digunakan untuk menentukan dasar pengukurannya dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10. Entitas tidak perlu menilai apakah investasinya pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (lihat paragraf PP43(a) dan PP44(a)) sebagai aktivitas bisnis utama karena entitas disyaratkan untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari investasi tersebut ke dalam kategori investasi (lihat paragraf 55(a)).

PP39. Entitas tidak perlu menilai apakah entitas melakukan investasi dalam kas dan setara kas (lihat paragraf 53(b)) sebagai aktivitas bisnis utama. Entitas disyaratkan untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari kas dan setara kas ke dalam kategori investasi kecuali paragraf 56(a) atau 56(b) berlaku.

PP40. Entitas menilai apakah entitas melakukan investasi pada aset lain yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas (lihat paragraf 53(c)) dengan menilai aset individual atau kelompok aset yang memiliki kesamaan karakteristik sebagai aktivitas bisnis utama. Ketika melakukan penilaian terhadap kelompok aset keuangan, entitas menggunakan kelompok aset keuangan yang konsisten dengan kelas aset keuangan yang diidentifikasi oleh entitas dalam menerapkan PSAK 107 paragraf 6.

PP41. Entitas menilai apakah investasi pada aset atau penyediaan pendanaan kepada pelanggan merupakan aktivitas bisnis utama berdasarkan fakta pada saat itu, sehingga perubahan hasil penilaian tidak mengubah hasil penilaian sebelumnya. Oleh karena itu, entitas mengklasifikasikan dan menyajikan penghasilan dan beban dengan menerapkan perubahan hasil penilaian secara prospektif sejak tanggal perubahan dan tidak mereklasifikasi jumlah yang disajikan sebelum tanggal perubahan. Kecuali hal tersebut tidak praktis untuk dilakukan, paragraf 51(c)(ii) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan jumlah dan klasifikasi unsur penghasilan dan beban sebelum dan sesudah tanggal perubahan hasil penilaian pada periode kini dan jumlah dan klasifikasi pada periode lalu untuk unsur yang klasifikasinya berubah karena perubahan hasil penilaian.

Operasi

PP42. Persyaratan dalam paragraf 47–66 mengakibatkan entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aktivitas bisnis utamanya dalam kategori operasi dalam laporan laba rugi, kecuali untuk penghasilan dan beban dari investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Selain itu, kategori operasi tidak terbatas pada penghasilan dan beban dari aktivitas bisnis utama suatu entitas. Hal ini mencakup seluruh penghasilan dan beban yang tidak diklasifikasikan oleh entitas dalam kategori lain dengan menerapkan paragraf 53–68, termasuk penghasilan atau beban yang volatil atau tidak berulang.

Investasi

Investasi pada Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi

PP43. Paragraf 53 dan 55 mengatur persyaratan klasifikasi penghasilan dan beban dari investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Investasi ini terdiri dari:

- (a) investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 228: *Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama* paragraf 16 dan PSAK 227 paragraf 10(c);
- (b) investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama (atau bagian daripadanya) yang dipilih entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai PSAK 109 dengan menerapkan PSAK 228 paragraf 18–19 dan PSAK 227 paragraf 11; dan
- (c) investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dalam laporan keuangan tersendiri yang dicatat sebesar biaya perolehan dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(a) atau sesuai PSAK 109 dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(b).

PP44. Paragraf 53 dan 55 juga mengatur persyaratan klasifikasi penghasilan dan beban dari entitas anak yang tidak dikonsolidasi. Investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasi meliputi:

- (a) investasi pada entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 227 paragraf 10(c);
- (b) investasi pada entitas anak yang dimiliki oleh entitas investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 110 paragraf 31; dan
- (c) investasi pada entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri yang dicatat pada biaya perolehan dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(a) atau sesuai PSAK 109 dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(b).

Aset yang Menghasilkan Imbal Hasil Secara Individual dan Sebagian Besar Independen dari Sumber Daya Lain Entitas

PP45. Paragraf 53(c) mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi aset yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas. Imbal hasil tersebut bisa positif atau negatif.

PP46. Aset yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas dalam paragraf 53(c) biasanya mencakup:

- (a) Investasi pada instrumen utang atau ekuitas; dan
- (b) properti investasi, dan piutang sewa yang dihasilkan oleh properti tersebut.

PP47. Penghasilan dan beban yang ditentukan dalam paragraf 54 dari aset tersebut biasanya mencakup:

- (a) bunga;
- (b) dividen;
- (c) penghasilan sewa;
- (d) penyusutan;
- (e) kerugian penurunan nilai dan pembalikan kerugian penurunan nilai;
- (f) keuntungan dan kerugian nilai wajar; dan
- (g) penghasilan dan beban dari penghentian pengakuan aset, atau klasifikasi dan pengukuran kembali aset tersebut sebagai dikuasai untuk dijual (lihat paragraf PP60–PP64).

Aset yang Tidak Menghasilkan Imbal Hasil Secara Individual dan Sebagian Besar Independen dari Sumber Daya Lain Entitas

PP48. Aset yang digunakan entitas secara kombinasi untuk memproduksi atau memasok barang atau jasa tidak menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas. Aset tersebut biasanya meliputi:

- (a) aset tetap;
- (b) aset yang timbul dari produksi atau pasokan barang dan jasa yang penghasilannya dan bebannya diklasifikasikan dalam kategori operasi (misalnya, piutang atas barang dan jasa tersebut); dan
- (c) jika entitas menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, setiap pinjaman kepada pelanggan.

PP49. Penghasilan dan beban dari aset yang dideskripsikan dalam paragraf PP48 diklasifikasikan dalam kategori operasi—misalnya:

- (a) pendapatan atas barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh entitas dengan menggunakan kombinasi aset;
- (b) penghasilan bunga;
- (c) penyusutan dan amortisasi;
- (d) kerugian penurunan nilai dan pembalikan kerugian penurunan nilai;
- (e) penghasilan dan beban yang berasal dari penghentian pengakuan aset, atau klasifikasi dan pengukuran kembali aset tersebut sebagai dikuasai untuk dijual (lihat paragraf PP60–PP64); dan
- (f) penghasilan dan beban yang timbul dari kombinasi bisnis yang mencakup aset yang akan menimbulkan penghasilan dan beban yang akan diklasifikasikan dalam kategori operasi, seperti keuntungan pembelian dengan diskon dan pengukuran kembali imbalan kontingensi.

Pendanaan

Liabilitas yang Timbul dari Transaksi yang Hanya Melibatkan Penggalangan Dana

PP50. Paragraf 59(a) mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana. Dalam transaksi tersebut, entitas:

- (a) menerima pendanaan dalam bentuk kas, atau pengakhiran liabilitas keuangan, atau penerimaan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; dan
- (b) di kemudian hari, akan dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri.

PP51. Liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana meliputi:

- (a) instrumen utang yang akan diselesaikan dengan uang tunai, seperti surat utang niragunan, pinjaman, wesel bayar, obligasi, dan hipotek—entitas menerima uang tunai dan akan mengembalikan uang tunai sebagai gantinya;
- (b) liabilitas berdasarkan pengaturan pendanaan pemasok ketika utang atas barang atau jasa dihentikan pengakuannya—entitas dibebaskan dari liabilitas keuangan atas barang atau jasa tersebut dan akan mengembalikan uang tunai sebagai gantinya;
- (c) obligasi yang akan diselesaikan melalui penyerahan saham entitas—entitas menerima uang tunai dan akan mengembalikan instrumen ekuitasnya sebagai gantinya; dan
- (d) kewajiban bagi entitas untuk membeli instrumen ekuitasnya sendiri—entitas menerima instrumen ekuitasnya sendiri dan akan mengembalikan uang tunai sebagai gantinya.

PP52. Contoh penghasilan dan beban dari liabilitas yang sesuai paragraf 60 mengharuskan entitas untuk mengklasifikasikannya ke dalam kategori pendanaan mencakup:

- (a) beban bunga (misalnya, atas instrumen utang yang diterbitkan);
- (b) keuntungan dan kerugian nilai wajar (misalnya, atas liabilitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi);
- (c) dividen atas saham yang diterbitkan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas; dan
- (d) penghasilan dan beban yang berasal dari penghentian pengakuan liabilitas (lihat paragraf PP61).

Liabilitas yang Timbul dari Transaksi yang Tidak Hanya Melibatkan Penggalangan Dana

PP53. Paragraf 59(b) mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi liabilitas yang timbul dari transaksi yang tidak hanya melibatkan penggalangan dana. Liabilitas tersebut meliputi:

- (a) utang atas barang atau jasa yang akan diselesaikan secara tunai—entitas menerima barang atau jasa, bukan pendanaan dalam bentuk yang dideskripsikan dalam paragraf PP50(a);
- (b) liabilitas kontrak—entitas akan mengembalikan barang dan jasa, bukan kas atau instrumen ekuitasnya sendiri sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP50(b);
- (c) liabilitas sewa—entitas menerima aset hak guna, bukan pendanaan dalam bentuk yang dideskripsikan dalam paragraf PP50(a);
- (d) liabilitas pensiun imbalan pasti—entitas menerima jasa pekerja, bukan pendanaan dalam bentuk yang dideskripsikan dalam paragraf PP50(a);
- (e) provisi aktivitas purna operasi atau restorasi aset—entitas menerima aset yang bukan pendanaan dalam bentuk yang dideskripsikan dalam paragraf PP50(a); dan
- (f) ketentuan litigasi—entitas tidak menerima pendanaan sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP50(a).

PP54. Contoh penghasilan dan beban dari liabilitas yang sesuai paragraf 61 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikannya ke dalam kategori pendanaan meliputi:

- (a) beban bunga atas utang yang timbul dari pembelian barang atau jasa, dengan menerapkan PSAK 109;
- (b) beban bunga atas liabilitas kontrak dengan komponen pendanaan signifikan sebagaimana ditentukan dalam PSAK 115;
- (c) beban bunga atas liabilitas sewa, dengan menerapkan PSAK 116;
- (d) beban (penghasilan) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dengan menerapkan PSAK 219; dan
- (e) kenaikan jumlah diskonto suatu provisi yang timbul seiring berjalannya waktu dan dampak perubahan tingkat diskonto provisi, dengan menerapkan PSAK 237.

PP55. Contoh penghasilan dan beban yang timbul dari transaksi yang tidak hanya melibatkan penggalangan dana namun tidak termasuk dalam ruang lingkup paragraf 61, dan oleh karena itu diklasifikasikan dalam kategori operasi, meliputi:

- (a) beban yang diakui untuk konsumsi barang atau jasa yang dibeli sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP54(a);
- (b) biaya jasa kini dan jasa lalu yang timbul dari program imbalan pasti, dengan menerapkan PSAK 219; dan
- (c) pengukuran kembali nilai wajar liabilitas untuk imbalan kontingensi dalam suatu kombinasi bisnis yang diakui dengan menerapkan PSAK 103: *Kombinasi Bisnis*.

Klasifikasi Penghasilan dan Beban dari Kontrak Hibrida yang Mengandung Kontrak Utama yang Merupakan Liabilitas

PP56. Bagaimana entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari kontrak hibrida dengan kontrak utama yang merupakan liabilitas bergantung pada apakah derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama. Jika derivatif melekat:

- (a) terpisah dari liabilitas utama:
 - (i) untuk liabilitas utama yang terpisah—entitas menerapkan persyaratan untuk penghasilan dan beban dari liabilitas, sebagaimana ditentukan dalam paragraf 52, 59–61, 64(b) dan 65–66; dan
 - (ii) untuk derivatif melekat yang terpisah—entitas menerapkan persyaratan untuk penghasilan dan beban dari derivatif, sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP70–PP76;
- (b) tidak terpisah dari liabilitas utama dan jika kontrak hibrida timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan pendanaan—entitas menerapkan persyaratan untuk liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut, sebagaimana ditentukan dalam paragraf 52, 60, dan 65–66;
- (c) tidak terpisah dari liabilitas utama dan jika kontrak hibrida tidak timbul dari suatu transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana:
 - (i) jika liabilitas utama adalah liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK 109 yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi—entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban yang ditentukan dalam paragraf 60 dari kontrak setelah pengakuan awal (bukan penghasilan dan beban yang ditentukan dalam paragraf 61) dalam kategori pendanaan (lihat paragraf PP59);

- (ii) jika kontrak hibrida tersebut merupakan kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 117—entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 52 dan 64(b); dan
- (iii) selain itu—entitas menerapkan persyaratan untuk penghasilan dan beban dari liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut, sebagaimana ditentukan dalam paragraf 52 dan 61.

PP57. Entitas menerapkan paragraf PP56(b) dan PP56(c) pada seluruh kontrak hibrida yang mengandung liabilitas utama yang derivatif melekatnya tidak terpisah, terlepas apakah derivatif melekat tersebut tidak dipisahkan oleh entitas yang menerapkan PSAK 109 paragraf 4.3.3 atau menerapkan PSAK 109 paragraf 4.3.5.

Liabilitas yang Timbul dari Kontrak Investasi dengan Fitur Partisipasi

PP58. Paragraf 64(a) mengatur persyaratan untuk penghasilan dan beban dari liabilitas yang timbul dari kontrak investasi yang diterbitkan dengan fitur partisipasi dan diakui dengan menerapkan PSAK 109. Contoh kontrak investasi tersebut adalah:

- (a) kontrak investasi dengan fitur partisipasi yang diterbitkan oleh asuradur yang tidak memenuhi definisi dalam PSAK 117 tentang kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner; dan
- (b) kontrak investasi dengan fitur partisipasi yang diterbitkan oleh entitas investasi.

Penghasilan dan Beban yang Diklasifikasikan dalam Kategori Operasi oleh Entitas yang Menyediakan Pendanaan Kepada Pelanggan Sebagai Aktivitas Bisnis Utama

PP59. Paragraf 65 mensyaratkan entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh liabilitas atau dari liabilitas tertentu yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana ke dalam kategori operasi. Entitas juga menerapkan persyaratan dalam paragraf tersebut terhadap penghasilan dan beban dari derivatif terkait dengan transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP73(a), namun tidak terhadap penghasilan dan beban dari kontrak hibrida yang ditentukan dalam paragraf PP56(c)(i).

Penghentian Pengakuan dan Perubahan Dalam Klasifikasi

Penghentian Pengakuan Aset atau Liabilitas, atau Klasifikasi dan Pengukuran Kembali Aset yang Dikuasai Untuk Dijual

PP60. Paragraf PP47(g) dan PP49(e) mengacu pada penghasilan dan beban dari penghentian pengakuan suatu aset, atau klasifikasinya sebagai dikuasai untuk dijual. Entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban pada saat penghentian pengakuan suatu aset, atau klasifikasinya sebagai dikuasai untuk dijual dan setiap pengukuran selanjutnya ketika dikuasai untuk dijual, dalam kategori yang sama dengan mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aset sesaat sebelum penghentian pengakuannya. Misalnya, entitas mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian:

- (a) atas pelepasan aset tetap—dalam kategori operasi;
- (b) atas pelepasan properti investasi di mana entitas tidak berinvestasi sebagai aktivitas bisnis utama—dalam kategori investasi; dan
- (c) dari pengukuran kembali investasi pada entitas asosiasi yang sebelumnya dicatat menggunakan metode ekuitas pada akuisisi bertahap entitas anak—dalam kategori investasi.

PP61. Entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari penghentian pengakuan liabilitas dengan menerapkan persyaratan dalam paragraf 52 dan 59–60. Misalnya, entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari penghentian pengakuan liabilitas:

- (a) dalam kategori pendanaan—jika liabilitas timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana oleh entitas yang tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama; dan
- (b) dalam kategori operasi—jika sebagai bagian dari pengaturan pendanaan pemasok, entitas menghentikan pengakuan utang kepada pemasok dan mengakui liabilitas berdasarkan pengaturan tersebut.

Perubahan dalam Penggunaan Suatu Aset

PP62. Suatu transaksi atau peristiwa lain dapat mengubah kategori dalam laporan laba rugi di mana entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari suatu aset, tanpa penghentian pengakuan aset tersebut. Dalam kasus tersebut, entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari transaksi atau peristiwa lain dalam kategori di mana entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aset sesaat sebelum transaksi atau peristiwa tersebut. Misalnya, entitas mengklasifikasikan dalam kategori operasi setiap penghasilan atau beban yang diakui dalam laporan laba rugi atas pengalihan properti dari ruang lingkup PSAK 216 ke properti investasi dalam ruang lingkup PSAK 240.

Kelompok Aset dan Liabilitas

PP63. Paragraf PP60–PP62 mengatur persyaratan penghasilan dan beban atas suatu aset atau liabilitas dari penghentian pengakuan, klasifikasi dan pengukuran selanjutnya ketika dikuasai untuk dijual, atau dari perubahan penggunaannya. Suatu transaksi atau peristiwa lain mungkin mengakibatkan hasil tersebut untuk sekelompok aset (atau sekelompok aset dan liabilitas) yang menghasilkan penghasilan dan beban diklasifikasikan oleh entitas ke dalam kategori berbeda sesaat sebelum transaksi atau peristiwa lain tersebut. Entitas mengklasifikasikan penghasilan atau beban dari transaksi atau peristiwa lain tersebut:

- (a) dalam kategori investasi jika, selain aset pajak penghasilan, seluruh aset dalam kelompok tersebut menghasilkan penghasilan dan beban yang diklasifikasikan oleh entitas dalam kategori investasi sesaat sebelum transaksi atau peristiwa lainnya tersebut; dan
- (b) selain itu, dalam kategori operasi.

PP64. Sebagai contoh, entitas mengklasifikasikan:

- (a) dalam kategori operasi—keuntungan dan kerugian atas pelepasan entitas anak yang dikonsolidasi, jika entitas anak tersebut termasuk aset yang menghasilkan penghasilan dan beban yang diklasifikasikan oleh entitas dalam kategori operasi sesaat sebelum pelepasan. Keuntungan dan kerugian termasuk reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi atas selisih kurs yang disyaratkan PSAK 221 paragraf 48.
- (b) dalam kategori operasi—kerugian penurunan nilai yang timbul atas klasifikasi kelompok lepasan sebagai dikuasai untuk dijual oleh entitas yang menerapkan PSAK 105, jika kelompok lepasan mencakup aset yang menghasilkan penghasilan dan beban yang diklasifikasikan oleh entitas dalam kategori operasi sesaat sebelum diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual.
- (c) dalam kategori investasi—keuntungan dan kerugian atas pelepasan entitas anak yang dikonsolidasi, jika aset entitas anak tersebut hanya properti investasi yang bukan merupakan investasi entitas pelapor konsolidasian sebagai aktivitas bisnis utama dan aset pajak penghasilan terkait. Keuntungan dan kerugian termasuk reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi atas selisih kurs yang disyaratkan oleh PSAK 221 paragraf 48.

Klasifikasi Selisih Kurs dan Keuntungan atau Kerugian Posisi Moneter Neto

PP65. Untuk menerapkan paragraf 47, entitas mengklasifikasikan selisih kurs yang termasuk dalam laporan laba rugi dengan menerapkan PSAK 221 ke dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban dari unsur yang menimbulkan selisih kurs, kecuali hal tersebut akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan (lihat paragraf PP68).

PP66. Sebagai contoh, entitas mengklasifikasikan selisih kurs atas:

- (a) piutang yang dideskripsikan dalam paragraf PP48(b) dalam mata uang asing, dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban dari aset tersebut—yaitu, dalam kategori operasi; dan
- (b) instrumen utang yang merupakan liabilitas sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP51(a) dalam mata uang asing, dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban atas liabilitas tersebut—yaitu, dalam kategori pendanaan (kecuali entitas menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama dan mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari liabilitas dalam kategori operasi dengan menerapkan paragraf 6).

PP67. Suatu entitas dapat mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari suatu transaksi yang tidak hanya melibatkan penggalangan dana ke dalam lebih dari satu kategori. Sebagai contoh, pembelian jasa dalam suatu transaksi dalam mata uang asing dan dinegosiasikan dengan persyaratan kredit yang diperpanjang dapat menimbulkan beban pembelian jasa yang diklasifikasikan dalam kategori operasi (lihat paragraf PP55(a)) dan beban bunga yang

diklasifikasikan dalam kategori pendanaan (lihat paragraf PP54(a)). Dalam kasus tersebut, dengan tunduk pada paragraf PP68, entitas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah selisih kurs berkaitan dengan jumlah yang diklasifikasikan dalam kategori pendanaan—dan mengklasifikasikannya dalam kategori tersebut—atau apakah berkaitan dengan jumlah yang diklasifikasikan dalam kategori lain—dan mengklasifikasikannya dalam kategori tersebut. Entitas tidak mengalokasikan selisih kurs yang timbul atas liabilitas dari transaksi yang tidak hanya melibatkan penggalangan dana ke dalam kategori-kategori tersebut. Dalam membuat pertimbangan tentang bagaimana mengklasifikasikan selisih kurs, entitas tidak perlu mengklasifikasikan selisih kurs dari seluruh liabilitas tersebut ke dalam kategori yang sama. Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan selisih kurs dari liabilitas serupa ke dalam kategori yang sama.

PP68. Jika penerapan persyaratan dalam paragraf PP65 dan PP67 akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, maka entitas mengklasifikasikan selisih kurs terdampak ke dalam kategori operasi. Entitas menilai apakah pengklasifikasian selisih kurs sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP65 dan PP67 melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan untuk setiap unsur yang menimbulkan selisih kurs. Penilaian tersebut spesifik pada fakta dan keadaan yang berkaitan dengan masing-masing unsur. Jika fakta dan keadaan yang sama berkaitan dengan sejumlah unsur, maka entitas dapat menerapkan penilaian yang sama terhadap masing-masing unsur.

PP69. Dengan menerapkan PSAK 229: *Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi* paragraf 28, entitas mungkin menyajikan keuntungan atau kerugian posisi moneter neto dengan unsur penghasilan dan beban lain yang terkait dengan posisi moneter neto tersebut, seperti penghasilan dan beban bunga serta selisih kurs. Jika entitas tidak menyajikan keuntungan atau kerugian posisi moneter neto beserta penghasilan dan beban terkait, maka entitas mengklasifikasikan keuntungan atau kerugian tersebut ke dalam kategori operasi.

Klasifikasi Keuntungan dan Kerugian atas Derivatif dan Instrumen Lindung Nilai yang Ditetapkan

PP70. Paragraf 47 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban ke dalam kategori dalam laporan laba rugi. Untuk menerapkan paragraf 47, entitas mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian yang termasuk dalam laporan laba rugi atas instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dengan menerapkan PSAK 109 ke dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban yang dipengaruhi oleh risiko yang biasanya dikelola oleh instrumen keuangan tersebut. Akan tetapi, jika hal tersebut akan memerlukan penyesuaian (*grossing up*) keuntungan dan kerugian, entitas mengklasifikasikan seluruh keuntungan dan kerugian tersebut ke dalam kategori operasi (lihat paragraf PP74–PP75).

PP71. Entitas mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian atas komponen yang tidak ditetapkan (*undesignated component*) dari instrumen lindung nilai yang ditetapkan (*designated hedging instrument*) dalam kategori yang sama dengan keuntungan dan kerugian atas komponen yang ditetapkan (*designated component*). Entitas mengklasifikasikan bagian keuntungan atau kerugian yang tidak efektif ke dalam kategori yang sama dengan bagian efektif.

PP72. Entitas juga menerapkan persyaratan dalam paragraf PP70 terhadap keuntungan dan kerugian atas derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai sesuai dengan PSAK 109, namun digunakan untuk mengelola risiko teridentifikasi. Akan tetapi, jika hal tersebut akan memerlukan penyesuaian (*grossing up*) keuntungan atau kerugian (lihat paragraf PP74–PP75) atau melibatkan biaya atau upaya berlebihan, maka entitas mengklasifikasikan seluruh keuntungan dan kerugian atas derivatif ke dalam kategori operasi.

PP73. Entitas mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian atas derivatif yang tidak digunakan untuk mengelola risiko teridentifikasi:

- (a) dalam kategori pendanaan, jika derivatif berkaitan dengan transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana (misalnya, opsi beli yang dibeli yang memungkinkan entitas penerbit mempertukarkan sejumlah mata uang asing dengan sejumlah instrumen ekuitas entitas), kecuali entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian ke dalam kategori operasi dengan menerapkan paragraf PP59; dan
- (b) dalam kategori operasi, jika kondisi pada (a) tidak terpenuhi.

PP74. Paragraf PP70 dan PP72 melarang penyesuaian (*grossing up*) keuntungan dan kerugian atas instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Penyesuaian (*grossing up*) keuntungan dan kerugian mungkin timbul dari situasi ketika:

- (a) entitas menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola risiko sekelompok unsur dengan posisi risiko yang saling hapus (lihat PSAK 109 paragraf 6.6.1 untuk kriteria sekelompok unsur menjadi unsur lindung nilai yang memenuhi syarat); dan
- (b) risiko yang dikelola memengaruhi pos pada lebih dari satu kategori dalam laporan laba rugi.

PP75. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan derivatif untuk mengelola risiko mata uang asing neto atas pendapatan (yang diklasifikasikan dalam kategori operasi) dan beban bunga (yang diklasifikasikan dalam kategori pendanaan). Dalam kasus ini, selisih kurs atas pendapatan saling hapus dengan selisih kurs atas beban bunga dan keuntungan atau kerugian atas derivatif. Namun, entitas mengklasifikasikan selisih kurs atas pendapatan ke dalam kategori yang berbeda dengan selisih kurs atas beban bunga. Untuk menyajikan keuntungan atau kerugian derivatif pada setiap kategori, entitas harus menyajikan keuntungan atau kerugian yang lebih besar daripada yang terjadi atas derivatif pada setiap kategori. Dengan menerapkan persyaratan dalam paragraf PP70–PP73, entitas tidak menyesuaikan (*gross up*) keuntungan atau kerugian dengan cara ini dan sebagai gantinya mengklasifikasikan keuntungan atau kerugian atas derivatif dalam kategori operasi.

PP76. Persyaratan dalam paragraf PP70–PP75 hanya menentukan cara mengklasifikasikan penghasilan dan beban ke dalam kategori laporan laba rugi. Persyaratan ini tidak menentukan dalam pos mana penghasilan dan beban tersebut dimasukkan, juga tidak menafikan persyaratan lain dalam SAK Indonesia.

Unsur yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi atau Diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

PP77. Entitas mungkin disyaratkan untuk menyajikan pos yang tercantum dalam paragraf 75, atau yang ditentukan dalam PSAK lainnya, pada lebih dari satu kategori yang tercantum pada paragraf 47. Sebagai contoh, entitas yang tidak melakukan investasi dalam aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama mungkin disyaratkan untuk menyajikan pos yang ditentukan dalam paragraf 75(b)(ii) atas kerugian penurunan nilai yang ditentukan sesuai dengan PSAK 109 Bagian 5.5 dalam:

- (a) kategori operasi—jika terkait dengan piutang atas barang atau jasa sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP48(b); dan
- (b) kategori investasi—jika terkait dengan aset keuangan yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP46.

PP78. Paragraf 24 dan 41(c) mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos tambahan dalam laporan laba rugi jika hal tersebut diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas penghasilan dan beban entitas. Entitas menggunakan pertimbangannya untuk membuat penentuan tersebut (termasuk apakah diperlukan untuk mendisagregasikan pos yang tercantum dalam paragraf 75). Paragraf 20 dan 41(d) mensyaratkan entitas untuk mendisagregasikan unsur untuk mengungkapkan informasi material dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas juga menggunakan pertimbangannya untuk membuat penentuan tersebut. Paragraf 41 mensyaratkan entitas untuk mendasarkan pertimbangannya pada penilaian apakah unsur tersebut memiliki kesamaan karakteristik (karakteristik serupa) atau karakteristik yang tidak sama (karakteristik takserupa). Karakteristik tersebut meliputi:

- (a) sifat (lihat paragraf 80);
- (b) fungsi (peran) dalam aktivitas bisnis entitas (lihat paragraf 81);
- (c) persistensi (*persistence*) (termasuk kekerapan suatu unsur penghasilan atau beban atau apakah unsur tersebut berulang atau tidak berulang);
- (d) dasar pengukuran;
- (e) ketidakpastian pengukuran atau ketidakpastian hasil (atau risiko lain terkait dengan suatu unsur);
- (f) ukuran;
- (g) lokasi geografis atau lingkungan regulatori;
- (h) dampak pajak (sebagai contoh, jika tarif pajak berbeda berlaku atas unsur penghasilan atau beban); dan
- (i) apakah penghasilan atau beban timbul dari pengakuan awal suatu transaksi atau kejadian atau dari perubahan selanjutnya dalam estimasi terkait transaksi atau kejadian tersebut.

PP79. Penghasilan dan beban yang mungkin memiliki karakteristik yang cukup takserupa sehingga penyajian dalam laporan laba rugi diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi material termasuk:

- (a) penurunan persediaan, dan pembalikan atas penurunan tersebut;
- (b) kerugian penurunan nilai aset tetap, dan pembalikan atas kerugian penurunan nilai tersebut;
- (c) penghasilan dan beban dari restrukturisasi aktivitas entitas dan pembalikan atas provisi dari restrukturisasi tersebut;
- (d) penghasilan dan beban dari pelepasan aset tetap;
- (e) penghasilan dan beban dari pelepasan investasi;
- (f) penghasilan dan beban dari penyelesaian litigasi;
- (g) pembalikan provisi; dan
- (h) penghasilan dan beban tidak berulang yang tidak termasuk dalam (a)–(g).

Penyajian dan Pengungkapan Beban yang Diklasifikasikan dalam Kategori Operasi

Penggunaan Karakteristik Sifat dan Fungsi

PP80. Dalam menentukan bagaimana menggunakan karakteristik sifat dan fungsi dalam rangka menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna sebagaimana disyaratkan paragraf 78, entitas mempertimbangkan:

- (a) pos apa yang menyediakan informasi paling berguna mengenai komponen atau penggerak utama profitabilitas entitas. Sebagai contoh, untuk entitas ritel, komponen atau penggerak utama profitabilitas mungkin adalah biaya pokok penjualan (*cost of sales*). Penyajian pos biaya pokok penjualan dapat menyediakan informasi relevan mengenai apakah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang menutup apa yang utamanya merupakan biaya langsung bagi peritel, dan dengan margin seberapa besar. Akan tetapi, biaya pokok penjualan tidak mungkin menyediakan informasi relevan mengenai komponen atau penggerak penting dari profitabilitas jika kaitan antara pendapatan dan biaya tidak bersifat langsung. Sebagai contoh, bagi beberapa entitas yang bergerak di bidang jasa, informasi mengenai beban operasi yang diklasifikasikan berdasarkan sifat, seperti imbalan pekerja, mungkin lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan karena beban tersebut merupakan penggerak utama profitabilitas.
- (b) pos apa yang paling dekat merepresentasikan cara bisnis dikelola dan bagaimana manajemen melakukan pelaporan secara internal. Sebagai contoh, entitas manufaktur yang dikelola berdasarkan fungsi utama mungkin mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi untuk tujuan pelaporan internal. Sebaliknya, entitas yang memiliki satu fungsi tunggal yang dominan, seperti menyediakan pendanaan kepada pelanggan, mungkin menentukan bahwa pos yang mencakup beban yang diklasifikasikan berdasarkan sifat menyediakan informasi paling berguna untuk tujuan pelaporan internal.
- (c) apa yang berlaku dalam praktik standar industri. Jika beban diklasifikasikan dengan cara yang sama dengan entitas dalam suatu industri, pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah membandingkan beban antarentitas dalam industri yang sama.
- (d) apakah alokasi beban tertentu ke dalam fungsi akan menjadi arbitrer karena pos yang disajikan tidak akan menyediakan representasi wajar dari fungsi tersebut. Dalam kasus tersebut, entitas akan mengklasifikasikan beban tersebut berdasarkan sifat.

PP81. Dalam beberapa kasus, dengan mempertimbangkan faktor yang diatur dalam paragraf PP80 entitas dapat menentukan bahwa pengklasifikasian dan penyajian beban tertentu berdasarkan sifat dan beban lainnya berdasarkan fungsi menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna. Sebagai contoh:

- (a) faktor dalam paragraf PP80(a)–(b) mungkin mengindikasikan bahwa pengklasifikasian dan penyajian beban berdasarkan fungsi menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna, kecuali untuk beban tertentu yang alokasinya ke fungsi akan bersifat arbitrer (lihat paragraf PP80(d)); dan
- (b) entitas yang mempunyai dua jenis aktivitas bisnis utama yang berbeda mungkin mengklasifikasikan dan menyajikan beban tertentu berdasarkan fungsi dan beban lain berdasarkan sifatnya untuk menyediakan informasi tentang penggerak utama profitabilitasnya.

PP82. Jika entitas mengklasifikasikan dan menyajikan beban tertentu berdasarkan sifatnya dan beban lain berdasarkan fungsinya dalam laporan laba rugi, maka entitas memberi label pada pos yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga secara jelas mengidentifikasi beban apa saja yang termasuk dalam setiap pos. Misalnya, jika entitas memasukkan sebagian imbalan kerja dalam pos fungsi dan imbalan kerja lainnya dalam pos sifat, maka label untuk pos sifat akan dengan jelas mengidentifikasi bahwa pos tersebut tidak mencakup seluruh imbalan kerja (misalnya, “imbalan kerja selain yang termasuk dalam biaya pokok penjualan”).

PP83. Dengan menerapkan paragraf 30, entitas mengklasifikasikan dan menyajikan beban secara konsisten dari satu periode pelaporan ke periode pelaporan berikutnya kecuali paragraf 30(a) atau 30(b) berlaku. Sebagai contoh, jika entitas menyajikan penurunan nilai goodwill sebagai pos sifat pada satu periode pelaporan, maka entitas juga menyajikan setiap penurunan nilai goodwill yang serupa sebagai pos sifat pada periode pelaporan selanjutnya kecuali paragraf 30(a) atau 30(b) berlaku. Jika tidak terdapat penurunan nilai goodwill yang serupa pada periode selanjutnya, fakta bahwa terdapat beban nihil pada periode selanjutnya bukan merupakan perubahan dalam klasifikasi dan penyajian.

PP84. Entitas akan menyajikan beban berdasarkan sifatnya, atau dengan menerapkan paragraf 83, mengungkapkan beban tertentu berdasarkan sifatnya. Jumlah yang disajikan atau diungkapkan tidak harus merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut. Jumlah tersebut dapat mencakup jumlah yang telah diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat suatu aset. Jika entitas:

- (a) menyajikan jumlah yang bukan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut, maka entitas juga akan menyajikan pos tambahan atas perubahan jumlah tercatat aset terdampak. Misalnya, dengan menerapkan PSAK 202 paragraf 39, entitas mungkin menyajikan pos untuk perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses.
- (b) mengungkapkan, dengan menerapkan paragraf 83(b), jumlah yang bukan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut, maka entitas memberikan penjelasan kualitatif atas fakta tersebut, dengan mengidentifikasi aset yang terlibat.

Agregasi Beban Operasi

PP85. Untuk menerapkan paragraf 78, entitas mempertimbangkan level agregasi untuk beban operasional agar menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna. Misalnya, entitas mungkin memiliki berbagai aktivitas administratif (seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, legal, dan akuntansi). Untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna, entitas mungkin mengagregasikan beban operasional yang berkaitan dengan aktivitas tersebut berdasarkan kesamaan karakteristik—seluruhnya merupakan beban untuk sumber daya yang digunakan dalam aktivitas administratif. Oleh karena itu, entitas mungkin menyajikannya dalam pos yang diberi label ‘beban administrasi’. Entitas mungkin juga mempunyai beban atas sumber daya yang digunakan dalam aktivitas penjualan. Beban ini mempunyai karakteristik takserupa dengan beban administrasi—beban penjualan timbul dari sumber daya yang digunakan dalam aktivitas penjualan dan beban administrasi timbul dari sumber daya yang digunakan dalam aktivitas administrasi. Karakteristik ini cukup takserupa sehingga disagregasi—penyajian dalam pos terpisah untuk beban penjualan dan beban administrasi—mungkin diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna mengenai beban entitas.

LAPORAN PENYAJIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Penghasilan Komprehensif Lain

PP86. Beberapa PSAK menetapkan keadaan ketika suatu entitas memasukkan unsur tertentu di luar laporan laba rugi pada periode pelaporan berjalan. PSAK 208 menetapkan dua keadaan tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. PSAK lainnya mensyaratkan atau memperkenankan entitas untuk mengeluarkan dari laba rugi komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan atau beban dalam *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (lihat paragraf PP87)

PP87. Lampiran A mendefinisikan “penghasilan komprehensif lain”. Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup:

- (a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 216 dan PSAK 238);
- (b) pengukuran kembali program imbalan pasti (lihat PSAK 219);
- (c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 221);
- (d) keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.7.5;
- (e) keuntungan dan kerugian atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.1.2A;
- (f) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian atas instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai atas arus kas serta keuntungan dan kerugian atas instrumen lindung nilai yang melindungi nilai investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.7.5 (lihat PSAK 109 Bab 6);
- (g) untuk liabilitas tertentu yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, jumlah perubahan dalam nilai wajar yang dapat diatribusikan pada perubahan dalam risiko kredit liabilitas tersebut (lihat PSAK 109 paragraf 5.7.7);
- (h) perubahan nilai atas nilai waktu dari opsi ketika memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik sebagai instrumen lindung nilai (lihat PSAK 109 Bab 6);
- (i) perubahan nilai elemen *forward* dari kontrak *forward* ketika memisahkan elemen *forward* dan elemen *spot* pada kontrak *forward* dan menetapkan hanya perubahan elemen *spot* sebagai instrumen lindung nilai, dan perubahan nilai *basis spread* valuta asing dari instrumen keuangan ketika mengeluarkannya dari penetapan instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai (lihat PSAK 109 Bab 6);
- (j) penghasilan dan beban keuangan asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup PSAK 117 yang dikecualikan dari laba rugi ketika penghasilan atau beban keuangan asuransi total didisagregasikan untuk dimasukkan dalam laba rugi suatu jumlah yang ditentukan dengan alokasi sistematis dengan menerapkan PSAK 117 paragraf 88(b), atau dengan jumlah yang mengeliminasi ketidaksesuaian akuntansi (*accounting mismatch*) dengan penghasilan atau beban keuangan yang timbul dari unsur pendasar, dengan menerapkan PSAK 117 paragraf 89(b); dan
- (k) penghasilan dan beban keuangan dari kontrak reasuransi milikan yang dikecualikan dari laba rugi ketika penghasilan atau beban keuangan reasuransi total didisagregasikan untuk dimasukkan ke dalam laba atau rugi suatu jumlah yang ditentukan dengan alokasi sistematis, dengan menerapkan PSAK 117 paragraf 88(b).

PP88. Penyesuaian reklasifikasi timbul, sebagai contoh, atas pelepasan kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 221) dan ketika prakiraan arus kas lindung nilai (*hedged forecast cash flows*) tertentu memengaruhi laba rugi (lihat PSAK 109 paragraf 6.5.11(d) terkait dengan lindung nilai arus kas).

PP89. Paragraf 90 mensyaratkan entitas untuk menyajikan penyesuaian reklasifikasi terkait komponen penghasilan komprehensif lain dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyesuaian reklasifikasi tidak timbul dari perubahan pada surplus revaluasi yang diakui sesuai dengan PSAK 216 atau PSAK 238 atau dari pengukuran kembali program imbalan pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 219. Entitas mengakui komponen tersebut dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mereklasifikasi komponen tersebut ke laba rugi pada periode pelaporan selanjutnya. Entitas dapat mengalihkan perubahan dalam surplus revaluasi ke saldo laba pada periode selanjutnya selama aset digunakan atau ketika aset dihentikan pengakuannya (lihat PSAK 216 dan PSAK 238). Sesuai dengan PSAK 109, penyesuaian reklasifikasi tidak timbul jika lindung nilai atas arus kas atau akuntansi untuk nilai waktu atas suatu opsi (atau elemen *forward* dari kontrak *forward* atau rentang *basis spread* valuta asing suatu instrumen keuangan) menghasilkan jumlah yang dikeluarkan entitas masing-masing dari cadangan lindung nilai atas arus kas atau komponen ekuitas terpisah, dan memasukkan secara langsung dalam biaya awal atau jumlah tercatat lainnya dari aset atau liabilitas. Entitas mengalihkan jumlah tersebut secara langsung ke aset atau liabilitas.

LAPORAN POSISI KEUANGAN**Klasifikasi Aset sebagai Lancar dan Tidak Lancar dan Liabilitas sebagai Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

PP90. Dalam menerapkan paragraf 96, ketika entitas menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang terpisah dalam laporan posisi keuangan menyediakan informasi berguna dengan membedakan aset neto yang terus menerus berputar sebagai modal kerja dari aset neto yang digunakan dalam operasi jangka panjang entitas. Klasifikasi terpisah tersebut juga menunjukkan aset yang diperkirakan entitas akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dan liabilitas yang akan jatuh tempo untuk penyelesaian dalam periode yang sama.

PP91. Untuk entitas tertentu, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas dari yang kurang likuid ke lebih likuid atau dari yang lebih likuid ke kurang likuid menyediakan ringkasan terstruktur lebih berguna dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas tersebut tidak menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi dengan jelas.

PP92. Dalam menerapkan paragraf 96, entitas diperkenankan untuk menyajikan sebagian aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar dan sebagian liabilitasnya menggunakan klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang serta aset dan liabilitas lainnya berdasarkan urutan likuiditas ketika hal tersebut menyediakan ringkasan terstruktur lebih berguna. Kebutuhan untuk mengombinasikan dasar penyajian mungkin timbul ketika suatu entitas memiliki operasi yang beragam.

PP93. Informasi mengenai perkiraan tanggal realisasi aset dan liabilitas berguna dalam menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas. PSAK 107 mensyaratkan pengungkapan analisis jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan mencakup utang usaha dan piutang lain-lain, dan liabilitas keuangan mencakup utang usaha dan utang lain-lain. Informasi mengenai perkiraan tanggal pemulihan aset non-moneter, seperti persediaan, dan perkiraan tanggal penyelesaian liabilitas, seperti provisi, juga berguna, terlepas dari apakah aset diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar dan liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan jumlah persediaan yang diperkirakan akan dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset Lancar

PP94. Paragraf 100 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan sebagai tidak lancar seluruh aset yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Pernyataan ini menggunakan istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset berwujud, aset takberwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan deskripsi alternatif sepanjang maknanya jelas.

PP95. Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk diproses dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Jika siklus operasi normal suatu entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus tersebut diasumsikan dua belas bulan. Aset lancar mencakup aset (seperti persediaan dan piutang usaha) yang dijual, dikonsumsi, atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan (contohnya mencakup aset keuangan tertentu yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan dalam PSAK 109) dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar.

Liabilitas Jangka Pendek

Siklus Operasi Normal (Lihat Paragraf 101(a))

PP96. Liabilitas jangka pendek tertentu, seperti utang usaha dan beberapa akrual untuk karyawan dan biaya operasional lainnya, merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal suatu entitas. Entitas mengklasifikasikan unsur tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun unsur tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama juga berlaku untuk

klasifikasi aset dan liabilitas entitas. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, siklus tersebut diasumsikan dua belas bulan.

Dimiliki Terutama untuk Tujuan Diperdagangkan (Lihat Paragraf 101(b)) atau Jatuh Tempo untuk Diselesaikan dalam Waktu Dua Belas Bulan (Lihat Paragraf 101(c))

PP97. Liabilitas jangka pendek lainnya tidak diselesaikan sebagai bagian dari siklus operasi normal, namun jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan. Contohnya adalah liabilitas keuangan tertentu yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan menurut PSAK 109, cerukan bank, dan bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, pajak penghasilan, dan utang nonusaha lainnya. Liabilitas keuangan yang menyediakan pendanaan dalam jangka panjang (yaitu, bukan merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas) dan yang tidak jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan adalah liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur pada paragraf PP99–PP103.

PP98. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan jangka pendek jika liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, bahkan jika:

- (a) jangka waktu awal adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan; dan
- (b) perjanjian untuk pendanaan ulang, atau untuk menjadwalkan kembali pembayaran, berbasis jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Hak untuk Menangguhkan Pelunasan Setidaknya Selama Dua Belas Bulan (Paragraf 101(D))

PP99. Hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan dalam paragraf PP100–PP103, harus ada pada akhir periode pelaporan.

PP100. Hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman selama setidaknya dua belas bulan setelah periode pelaporan dapat tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kondisi yang ditentukan dalam pengaturan pinjaman tersebut (selanjutnya disebut sebagai “kovenan”). Untuk tujuan penerapan paragraf 101(d), kovenan tersebut:

- (a) memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan—sebagaimana diilustrasikan dalam paragraf PP102–PP103—jika entitas disyaratkan untuk mematuhi kovenan tersebut pada atau sebelum akhir periode pelaporan. Kovenan tersebut memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan bahkan jika kepatuhan terhadap kovenan tersebut hanya dinilai setelah periode pelaporan (sebagai contoh, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan tetapi dinilai kepatuhannya hanya setelah periode pelaporan).
- (b) tidak memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan jika entitas disyaratkan untuk mematuhi kovenan hanya setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas enam bulan setelah akhir periode pelaporan).

PP101. Jika entitas memiliki hak, pada akhir periode pelaporan, untuk memperpanjang suatu kewajiban setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan berdasarkan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek. Jika entitas tidak memiliki hak tersebut, maka entitas tidak mempertimbangkan potensi untuk membiayai kembali kewajiban tersebut dan mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai kewajiban jangka pendek.

PP102. Ketika entitas melanggar kovenan pengaturan pinjaman jangka panjang pada atau sebelum akhir periode pelaporan yang mengakibatkan liabilitas harus segera dibayar sesuai permintaan, maka entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui, setelah periode pelaporan, dan sebelum laporan keuangan disahkan untuk terbit, tidak meminta pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek karena, pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mempunyai hak untuk menangguhkan pelunasan setidaknya selama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

PP103. Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk memberikan masa tenggang yang berakhir setidaknya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama periode ketika entitas dapat memperbaiki pelanggaran atas kovenan dan selama periode ketika pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran kembali segera.

PP104. Klasifikasi liabilitas tidak dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menanggihkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan. Jika liabilitas memenuhi kriteria dalam paragraf 101–102 untuk klasifikasi sebagai liabilitas jangka panjang, maka liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang meskipun manajemen bermaksud untuk atau memperkirakan entitas menyelesaikan liabilitas tersebut dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau bahkan jika entitas menyelesaikan liabilitas antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Namun, dalam salah satu keadaan tersebut, entitas mungkin perlu mengungkapkan informasi tentang saat pelunasan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak liabilitas terhadap posisi keuangan entitas (lihat PSAK 208 paragraf 6C(c) dan PP105(d)).

PP105. Jika peristiwa berikut terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa nonpenyesuaian sesuai dengan PSAK 110: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*:

- (a) pendanaan ulang berbasis jangka panjang atas liabilitas yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf PP98);
- (b) perbaikan atas pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf PP102);
- (c) pemberian masa tenggang oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf PP103); dan
- (d) pelunasan liabilitas yang diklasifikasikan sebagai jangka panjang (lihat paragraf PP104).

PP106. Dalam menerapkan paragraf 101–102 dan PP96–PP103, entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai jangka panjang ketika hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut bergantung pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf PP100(b)). Dalam situasi tersebut, entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas dapat menjadi harus dibayar kembali dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, termasuk:

- (a) informasi mengenai kovenan (termasuk sifat kovenan dan kapan entitas disyaratkan untuk mematuhi) serta jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (b) fakta dan keadaan, jika ada, yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan—misalnya, entitas telah melakukan tindakan selama atau setelah periode pelaporan untuk menghindari atau memitigasi potensi pelanggaran. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan mematuhi kovenan jika kepatuhan entitas dinilai berdasarkan kondisi entitas pada akhir periode pelaporan.

Pelunasan (Paragraf 101(a), 101(c) dan 101(d))

PP107. Untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, pelunasan mengacu pada pengalihan kepada pihak lawan yang mengakibatkan pengakhiran liabilitas. Pengalihan tersebut dapat berupa:

- (a) kas atau sumber daya ekonomik lainnya—misalnya barang atau jasa; atau
- (b) instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, kecuali paragraf PP108 berlaku.

PP108. Ketentuan dari liabilitas yang, atas opsi pihak lawan, dapat menghasilkan pelunasan melalui pengalihan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak memengaruhi klasifikasinya sebagai jangka pendek atau jangka panjang jika, dengan menerapkan PSAK 232, entitas mengklasifikasikan opsi tersebut sebagai instrumen ekuitas, mengakuinya secara terpisah dari liabilitas sebagai komponen ekuitas dari instrumen keuangan majemuk.

Unsur yang Disajikan pada Laporan Posisi Keuangan atau Diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

PP109. Paragraf 24 dan 41(c) mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos tambahan dalam laporan posisi keuangan jika hal tersebut diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. Entitas menggunakan pertimbangannya untuk membuat penentuan ini (termasuk apakah perlu untuk mendisagregasikan pos yang tercantum dalam paragraf 103). Paragraf 41 mensyaratkan entitas untuk mendasarkan pertimbangannya pada penilaian apakah unsur tersebut memiliki kesamaan karakteristik (karakteristik serupa) atau karakteristik yang tidak sama (karakteristik takserupa). Untuk pos tambahan aset dan liabilitas, entitas mendasarkan pertimbangannya pada penilaian atas sifat atau fungsi aset atau liabilitas tersebut. Karakteristik yang tercantum dalam paragraf PP110(c)–(k) mungkin membantu entitas dalam mengidentifikasi sifat atau fungsi aset dan liabilitas.

PP110. Paragraf 20 dan 41(d) mensyaratkan entitas untuk mendisagregasikan unsur untuk mengungkapkan informasi material dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas menggunakan pertimbangannya untuk melakukan hal tersebut berdasarkan penilaian apakah unsur tersebut memiliki kesamaan karakteristik (karakteristik serupa) atau karakteristik yang tidak sama (karakteristik takserupa). Karakteristik tersebut termasuk:

- (a) sifat;
- (b) fungsi (peran) dalam aktivitas bisnis entitas;
- (c) durasi dan saat pemulihan atau penyelesaian (termasuk apakah suatu aset diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar atau liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang atau apakah pemulihan atau penyelesaiannya membentuk bagian dari siklus operasi entitas);
- (d) likuiditas;
- (e) dasar pengukuran;
- (f) ketidakpastian pengukuran atau ketidakpastian hasil (atau risiko lain terkait dengan suatu unsur);
- (g) ukuran;
- (h) lokasi geografis atau lingkungan regulatori;
- (i) jenis, misalnya jenis barang, jasa atau pelanggan;
- (j) dampak pajak—misalnya, jika aset atau liabilitas memiliki dasar pengenaan pajak yang berbeda; dan
- (k) pembatasan penggunaan aset atau pengalihan liabilitas.

PP111. Aset, liabilitas dan unsur ekuitas yang mungkin memiliki karakteristik yang cukup takserupa sehingga penyajiannya dalam laporan posisi keuangan diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk menyediakan informasi material meliputi:

- (a) aset tetap didisagregasikan ke dalam kelas sesuai dengan PSAK 216;
- (b) piutang didisagregasikan berdasarkan jumlah piutang dari pelanggan dagang, jumlah piutang dari pihak berelasi, pembayaran di muka dan jumlah lainnya;
- (c) persediaan didisagregasikan, dengan menerapkan PSAK 202, menjadi unsur seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi;
- (d) utang usaha didisagregasikan, dengan menerapkan PSAK 207, untuk menyediakan secara terpisah jumlah utang yang merupakan bagian dari pengaturan pendanaan pemasok;
- (e) provisi didisagregasikan menurut sifatnya, seperti, provisi imbalan kerja, liabilitas aktivitas purna operasi, atau unsur lainnya; dan
- (f) modal ekuitas dan cadangan didisagregasikan ke dalam berbagai kelas, seperti modal disetor, agio saham, dan cadangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Struktur**

PP112. Paragraf 114 mensyaratkan entitas untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis, sepanjang hal tersebut dapat dilakukan. Contoh pengurutan atau pengelompokan catatan atas laporan keuangan secara sistematis meliputi:

- (a) memberikan prominensi pada aspek aktivitas yang dianggap paling penting oleh entitas untuk memahami kinerja keuangan dan posisi keuangannya, seperti mengelompokkan informasi mengenai aktivitas bisnis tertentu;
- (b) mengelompokkan informasi mengenai unsur yang diukur secara serupa seperti aset yang diukur pada nilai wajar; atau
- (c) mengikuti urutan pos dalam laporan kinerja keuangan dan laporan posisi keuangan, seperti:
 - (i) pernyataan kepatuhan terhadap SAK Indonesia (lihat PSAK 208 paragraf 06B);
 - (ii) informasi kebijakan akuntansi material (lihat PSAK 208 paragraf 27A);
 - (iii) informasi pendukung untuk unsur yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sesuai urutan setiap laporan yang disediakan dan setiap pos yang disajikan; dan
 - (iv) pengungkapan lainnya, termasuk:
 - (1) liabilitas kontingensi (lihat PSAK 237) dan komitmen kontraktual yang tidak diakui; dan
 - (2) pengungkapan nonkeuangan—misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan entitas (lihat PSAK 107).

Ukuran Kinerja Tetap Manajemen

Identifikasi Ukuran Kinerja Tetap Manajemen

PP113. Paragraf 117 mendefinisikan ukuran kinerja tetap manajemen. Suatu entitas mungkin tidak memiliki ukuran kinerja tetap manajemen, memiliki satu ukuran kinerja tetap manajemen, atau lebih dari satu. Sebagai contoh, entitas yang mengomunikasikan kinerja keuangannya secara publik kepada pengguna laporan keuangan hanya dengan menggunakan total dan subtotal yang disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia tidak memiliki ukuran kinerja tetap manajemen.

PP114. Untuk memenuhi definisi ukuran kinerja tetap manajemen, ukuran tersebut harus mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan. Sebagai contoh, jika subtotal penghasilan dan beban berkaitan dengan segmen dilaporkan yang diungkapkan sesuai dengan PSAK 108 tidak menyediakan informasi mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan, maka subtotal tersebut tidak dapat memenuhi definisi ukuran kinerja tetap manajemen.

PP115. Namun, terkadang subtotal penghasilan dan beban terkait dengan segmen dilaporkan dapat menyediakan informasi mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan. Misalnya, jika segmen dilaporkan berisi aktivitas bisnis utama tunggal dari entitas dan subtotal penghasilan dan beban yang berkaitan dengan segmen tersebut disajikan dalam laporan laba rugi, hal tersebut mengindikasikan bahwa subtotal tersebut menyediakan informasi mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan. Dalam kasus tersebut, subtotal penghasilan dan beban yang berkaitan dengan segmen dilaporkan tersebut akan memenuhi definisi ukuran kinerja tetap manajemen jika subtotal memenuhi syarat lain dari definisi ukuran kinerja tetap manajemen.

Subtotal Penghasilan dan Beban

PP116. Ukuran kinerja tetap manajemen adalah subtotal penghasilan dan beban. Contoh ukuran yang bukan merupakan ukuran kinerja tetap manajemen karena bukan merupakan subtotal penghasilan dan beban meliputi:

- (a) subtotal dari penghasilan saja atau beban saja (misalnya, ukuran pendapatan sesuaian yang berdiri sendiri yang bukan merupakan bagian dari subtotal yang juga mencakup beban);
- (b) aset, liabilitas, ekuitas atau kombinasi dari elemen tersebut;
- (c) rasio keuangan (misalnya, imbal hasil aset (*return on assets*)) (lihat paragraf PP117);
- (d) ukuran likuiditas atau arus kas (misalnya, arus kas bebas (*free cash flow*)); atau
- (e) ukuran kinerja nonkeuangan.

PP117. Rasio keuangan bukan merupakan ukuran kinerja tetap manajemen karena bukan merupakan subtotal penghasilan dan beban. Akan tetapi, subtotal yang merupakan pembilang atau penyebut dalam suatu rasio keuangan merupakan ukuran kinerja tetap manajemen jika subtotal tersebut memenuhi definisi ukuran kinerja tetap

manajemen seandainya subtotal tersebut bukan merupakan bagian dari suatu rasio. Oleh karena itu, entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 121–125 terhadap pembilang atau penyebut tersebut.

PP118. Subtotal penghasilan dan beban yang memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen di paragraf 117 adalah ukuran kinerja tetapan manajemen terlepas dari apakah subtotal tersebut disajikan dalam laporan laba rugi atau tidak.

Komunikasi Publik

PP119. Subtotal memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen hanya jika entitas menggunakannya dalam komunikasi publik di luar laporan keuangannya. Komunikasi publik mencakup ulasan manajemen, siaran pers, dan presentasi investor. Untuk tujuan pendefinisian ukuran kinerja tetapan manajemen, komunikasi publik tidak termasuk komunikasi lisan, transkrip tertulis dari komunikasi lisan, dan unggahan media sosial.

PP120. Ukuran kinerja tetapan manajemen berkaitan dengan periode pelaporan yang sama dengan laporan keuangan. Secara khusus, subtotal:

- (a) yang berkaitan dengan laporan keuangan interim namun tidak berkaitan dengan laporan keuangan tahunan hanya dapat menjadi ukuran kinerja tetapan manajemen dalam laporan keuangan interim; dan
- (b) yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan namun tidak berkaitan dengan laporan keuangan interim hanya dapat menjadi ukuran kinerja tetapan manajemen dalam laporan keuangan tahunan.

PP121. Entitas hanya mempertimbangkan komunikasi publik yang berkaitan dengan periode pelaporan tertentu untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan tersebut, kecuali sebagai bagian dari proses pelaporan keuangannya, entitas secara rutin menerbitkan komunikasi publik tersebut setelah tanggal penerbitan laporan keuangannya. Jika hal tersebut terjadi, entitas mempertimbangkan komunikasi publik yang terkait dengan periode pelaporan sebelumnya untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan kini.

PP122. Akan tetapi, suatu ukuran yang digunakan dalam komunikasi publik yang berkaitan dengan periode pelaporan sebelumnya tidak disyaratkan untuk diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen pada periode pelaporan kini jika terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa ukuran tersebut tidak akan dimasukkan dalam komunikasi publik yang akan diterbitkan terkait dengan periode pelaporan kini. Jika ukuran tersebut telah diungkapkan sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen pada periode pelaporan sebelumnya dan tidak diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan kini, maka hal tersebut merupakan perubahan, atau penghentian, ukuran kinerja tetapan manajemen sehingga persyaratan pengungkapan dalam paragraf 124 berlaku.

Subtotal yang Serupa dengan Laba Bruto

PP123. Sesuai dengan paragraf 118(a), subtotal yang serupa dengan laba bruto bukan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen. Suatu subtotal serupa dengan laba bruto ketika subtotal tersebut menggambarkan selisih antara suatu jenis pendapatan dan beban terkait langsung yang timbul dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Contohnya meliputi:

- (a) penghasilan bunga neto;
- (b) penghasilan *fee* dan komisi neto;
- (c) hasil jasa asuransi;
- (d) hasil keuangan neto (penghasilan investasi dikurangi penghasilan dan beban keuangan asuransi); dan
- (e) penghasilan sewa neto.

Anggapan tentang Pengomunikasian Pandangan Manajemen

PP124. Paragraf 119 menyatakan bahwa subtotal penghasilan dan beban yang digunakan dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan dianggap mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan. Dengan menerapkan paragraf 120, entitas

diperkenankan untuk membantah anggapan tersebut jika entitas memiliki informasi wajar dan terdukung yang tersedia yang menunjukkan bahwa:

- (a) subtotal tersebut tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan (lihat paragraf PP125–PP128); dan
- (b) entitas mempunyai alasan untuk menggunakan subtotal tersebut dalam komunikasi publiknya selain untuk mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan (lihat paragraf PP129).

PP125. Contoh informasi wajar dan terdukung yang menunjukkan bahwa subtotal tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan adalah:

- (a) entitas mengomunikasikan subtotal tidak secara prominen (lihat paragraf PP126); dan
- (b) manajemen tidak menggunakan subtotal tersebut secara internal untuk menilai atau memantau kinerja keuangan entitas (lihat paragraf PP127–PP128).

PP126. Apakah suatu entitas mengomunikasikan subtotal tidak secara prominen merupakan masalah pertimbangan berdasarkan sejumlah faktor, misalnya:

- (a) luasnya rujukan terhadap subtotal tersebut—sedikit rujukan mengindikasikan kurangnya prominensi, banyak referensi mengindikasikan prominensi; dan
- (b) isi ulasan atau analisis mengenai atau yang mengandalkan subtotal tersebut, misalnya:
 - (i) deskripsi subtotal sebagai informasi yang tidak mengomunikasikan pandangan manajemen dan yang disediakan hanya sebagai respons terhadap permintaan yang sering diajukan oleh beberapa pengguna laporan keuangan mengindikasikan kurangnya prominensi;
 - (ii) penggunaan subtotal untuk mendukung analisis dan ulasan manajemen atas kinerja keuangan entitas dan untuk menyediakan penjelasan tentang alasan perubahan subtotal dari periode ke periode mengindikasikan prominensi; dan
 - (iii) perbandingan subtotal dengan subtotal pesaing atau tolok ukur industri menunjukkan prominensi.

PP127. Penggunaan subtotal oleh manajemen untuk menilai atau memantau suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa subtotal tersebut mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan. Namun, jika manajemen menggunakan subtotal secara internal tetapi tidak dalam komunikasi publik entitas, maka subtotal tersebut tidak memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen.

PP128. Entitas mungkin menyesuaikan subtotal yang dikomunikasikan dalam komunikasi publiknya untuk digunakan secara internal oleh manajemen guna menilai atau memantau kinerja keuangan entitas. Dalam kasus tersebut, entitas menggunakan pertimbangannya untuk menilai apakah subtotal yang digunakan secara internal cukup serupa dengan subtotal yang digunakan dalam komunikasi publiknya sehingga paragraf PP127 berlaku. Semakin serupa subtotalnya, semakin besar kemungkinan bahwa subtotal yang digunakan dalam komunikasi publik entitas mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan.

PP129. Contoh informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan suatu entitas memiliki alasan untuk menggunakan subtotal dalam komunikasi publiknya selain untuk mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan adalah bahwa subtotal tersebut :

- (a) disyaratkan dalam komunikasi publik berdasarkan undang-undang atau peraturan;
- (b) mengomunikasikan kinerja terkait laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka akuntansi selain SAK Indonesia;
- (c) digunakan dalam komunikasi publik untuk memenuhi permintaan pihak eksternal; atau
- (d) digunakan dalam komunikasi publik untuk tujuan mengomunikasikan informasi selain kinerja keuangan.

PP130. Paragraf 120 berlaku untuk suatu subtotal dan bukan untuk unsur penghasilan dan beban individual yang membentuk subtotal tersebut. Oleh karena itu, entitas tidak dapat menyatakan bahwa suatu subtotal tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan berdasarkan informasi yang menunjukkan bahwa suatu unsur penghasilan atau beban individual dalam subtotal tersebut tidak merepresentasikan pandangan tersebut.

PP131. Entitas mungkin mengubah penggunaan subtotal untuk mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan kepada pengguna laporan keuangan. Akibatnya, subtotal mungkin menjadi, atau tidak lagi menjadi, ukuran kinerja tetapan manajemen. Pertimbangan diperlukan untuk mengidentifikasi apakah suatu ukuran yang awalnya tidak diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen telah menjadi suatu ukuran kinerja tetapan manajemen, atau apakah suatu ukuran yang sebelumnya diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen telah tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja tetapan manajemen. Misalnya, entitas mungkin disyaratkan oleh regulator untuk melaporkan subtotal tertentu yang, ketika pertama kali digunakan, tidak mengomunikasikan pandangan manajemen mengenai suatu aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, proses menghasilkan subtotal mungkin menyebabkan manajemen menggunakan ukuran tersebut secara internal untuk menilai dan memantau kinerja keuangan entitas atau memperluas komentar dan penjelasan dalam komunikasi publik melampaui persyaratan peraturan, sehingga menghasilkan ukuran yang memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen.

Pengungkapan Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen

Satu Catatan Tunggal untuk Informasi mengenai Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen

PP132. Paragraf 122 mensyaratkan entitas untuk memasukkan dalam satu catatan tunggal seluruh informasi tentang ukuran kinerja tetapan manajemen yang disyaratkan oleh paragraf 121–125. Jika entitas juga mengungkapkan informasi lain dalam catatan tersebut, maka informasi dalam catatan tersebut diberi label sedemikian rupa sehingga secara jelas membedakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 121–125 dari informasi lainnya.

PP133. Misalnya, jika entitas menerapkan PSAK 108 dan informasi segmen dilaporkan mencakup ukuran kinerja tetapan manajemen, maka entitas dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan tentang ukuran kinerja tetapan manajemen dalam catatan yang sama dengan informasi segmen dilaporkan lainnya, sepanjang entitas tersebut juga:

- (a) memasukkan dalam catatan tersebut informasi yang disyaratkan oleh paragraf 121–125 untuk seluruh ukuran kinerja tetapan manajemen dan, untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf PP132, memberi label informasi dalam catatan sedemikian rupa sehingga secara jelas membedakan informasi yang disyaratkan dalam paragraf 121–125 dari informasi yang disyaratkan oleh PSAK 108; atau
- (b) menyediakan catatan terpisah yang mencakup informasi yang disyaratkan untuk seluruh ukuran kinerja tetapan manajemen, termasuk ukuran yang entitas masukkan informasinya dalam informasi segmen dilaporkan.

Cara yang Jelas dan Dapat Dipahami

PP134. Paragraf 123 mengharuskan entitas untuk memberi label dan menjelaskan ukuran kinerja tetapan manajemen dengan cara yang jelas dan dapat dipahami sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Untuk menyediakan deskripsi tersebut, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami unsur penghasilan atau beban yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam subtotal. Oleh karena itu, suatu entitas:

- (a) memberi label dan mendeskripsikan ukuran tersebut sedemikian rupa sehingga merepresentasikan secara wajar karakteristiknya sesuai dengan paragraf 43 (lihat paragraf PP135); dan
- (b) menyediakan informasi spesifik mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen—yaitu:
 - (i) jika entitas telah menghitung ukuran selain menggunakan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk unsur dalam laporan kinerja keuangan, maka entitas menyatakan fakta tersebut dan perhitungan yang digunakan untuk ukuran tersebut; dan

- (ii) jika, sebagai tambahan, penghitungan ukuran tersebut berbeda dari kebijakan akuntansi yang disyaratkan atau diizinkan oleh SAK Indonesia, maka entitas menyatakan fakta tambahan tersebut dan, jika perlu, penjelasan tentang arti istilah yang digunakannya (lihat paragraf PP135 (b)).

PP135. Untuk memberi label dan mendeskripsikan suatu ukuran sedemikian rupa sehingga merepresentasikan secara wajar karakteristiknya, entitas:

- (a) memberi label ukuran sedemikian rupa sehingga merepresentasikan karakteristik subtotal (misalnya, menggunakan label “laba operasi sebelum beban tidak berulang” hanya untuk subtotal yang mengecualikan dalam laba operasi seluruh beban yang diidentifikasi oleh entitas sebagai beban tidak berulang); dan
- (b) menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memahami aspek kinerja keuangan yang dikomunikasikan (misalnya, menjelaskan bagaimana entitas mendefinisikan “beban tidak berulang”).

Rekonsiliasi Ke Total atau Subtotal Terdekat Terbandingkan

PP136. Paragraf 123(c) mensyaratkan entitas untuk merekonsiliasi setiap ukuran kinerja tetapan manajemen ke subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum dalam paragraf 118 atau total atau subtotal yang secara spesifik disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia. Misalnya, entitas yang mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, suatu ukuran kinerja tetapan manajemen atas laba (rugi) operasi disesuaikan, merekonsiliasi ukuran tersebut ke laba (rugi) operasi. Dalam mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur rekonsiliasi yang diungkapkan, entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 41–43.

PP137. Untuk setiap unsur rekonsiliasi, entitas mengungkapkan:

- (a) jumlah yang berkaitan dengan setiap pos dalam laporan kinerja keuangan; dan
- (b) deskripsi tentang bagaimana unsur tersebut dihitung dan berkontribusi dalam ukuran kinerja tetapan manajemen menyediakan informasi yang berguna (lihat paragraf PP138–PP140), jika diperlukan untuk menyediakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 123(a) dan 123(b).

PP138. Deskripsi yang disyaratkan dalam paragraf PP137(b) disyaratkan jika terdapat lebih dari satu unsur rekonsiliasi dan setiap unsur dihitung menggunakan metode yang berbeda atau berkontribusi dalam menyediakan informasi berguna dengan cara yang berbeda. Misalnya, suatu entitas mungkin mengecualikan beberapa unsur beban dari ukuran kinerja tetapan manajemen, sebagian karena unsur tersebut diidentifikasi berada di luar pengendalian manajemen dan sebagian lainnya karena unsur tersebut diidentifikasi sebagai unsur tidak berulang. Dalam kasus tersebut, pengungkapan unsur mana yang berkontribusi terhadap jenis penyesuaian apa diperlukan untuk menjelaskan bagaimana ukuran kinerja tetapan manajemen menyediakan informasi yang berguna.

PP139. Satu penjelasan tunggal mungkin berlaku untuk lebih dari satu unsur atau mungkin berlaku untuk seluruh unsur rekonsiliasi secara kolektif. Misalnya, entitas mungkin mengecualikan beberapa unsur penghasilan atau beban dalam menghitung ukuran kinerja tetapan manajemen berdasarkan penerapan “tidak berulang” yang spesifik untuk entitas. Dalam kasus tersebut, penjelasan tunggal yang mencakup definisi entitas mengenai “tidak berulang” yang berlaku untuk seluruh item rekonsiliasi dapat memenuhi persyaratan dalam paragraf PP137(b).

PP140. Dengan menerapkan paragraf 123(c), entitas diperkenankan untuk merekonsiliasi ukuran kinerja tetapan manajemen ke total atau subtotal yang tidak disajikan dalam laporan kinerja keuangan. Dalam kasus tersebut, entitas:

- (a) merekonsiliasi total atau subtotal tersebut ke total atau subtotal terdekat terbandingkan yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan; dan
- (b) tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 123(d) dan 123(e) untuk rekonsiliasi pada (a).

Dampak Pajak Penghasilan untuk Setiap Unsur yang Diungkapkan dalam Rekonsiliasi

PP141. Entitas disyaratkan oleh paragraf 123(d) untuk mengungkapkan dampak pajak penghasilan untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi antara ukuran kinerja tetapan manajemen dan subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum dalam paragraf 118 atau total atau subtotal yang secara khusus disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia. Entitas menentukan dampak pajak penghasilan yang disyaratkan dalam paragraf 123(d) dengan menghitung dampak pajak penghasilan dari transaksi pendasarnya:

- (a) sesuai tarif pajak yang berlaku terhadap transaksi di yurisdiksi pajak yang bersangkutan;
- (b) berdasarkan alokasi prorata yang wajar atas pajak kini dan pajak tangguhan entitas dalam yurisdiksi pajak yang bersangkutan; atau
- (c) dengan menggunakan metode lain yang menghasilkan alokasi yang lebih tepat sesuai dengan kondisinya.

PP142. Jika, dengan menerapkan paragraf PP141, entitas menggunakan lebih dari satu metode untuk menghitung dampak pajak penghasilan atas unsur rekonsiliasi, maka entitas mengungkapkan bagaimana entitas menentukan dampak pajak untuk setiap unsur rekonsiliasi.

Draf EKSPOSUR

LAMPIRAN C TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 118.

TANGGAL EFEKTIF

C01. Entitas menerapkan PSAK ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan PSAK ini untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

TRANSISI

C02. Entitas menerapkan PSAK ini secara restrospektif dengan menerapkan PSAK 208. Akan tetapi, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang ditentukan dalam PSAK 208 paragraf 28(f).

C03. Dalam laporan keuangan* tahunannya, entitas mengungkapkan, untuk periode komparatif terdekat sebelum periode ketika PSAK ini pertama kali diterapkan, suatu rekonsiliasi untuk setiap pos dalam laporan laba rugi antara:

- (a) jumlah sajian kembali yang disajikan dengan menerapkan PSAK ini; dan
- (b) jumlah yang sebelumnya disajikan dengan menerapkan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*.

C04. Jika entitas menerapkan PSAK 234 dalam menyusun laporan keuangan interim ringkas pada tahun pertama penerapan PSAK ini, maka entitas menyajikan dalam laporan keuangan interim ringkasnya setiap judul yang diperkirakan akan digunakan dalam menerapkan PSAK ini dan subtotal yang disyaratkan oleh paragraf 69-74 dalam PSAK ini, terlepas dari persyaratan dalam PSAK 234 paragraf 10. Entitas tidak menerapkan persyaratan dalam PSAK 234 paragraf 10 untuk judul dan subtotal dalam laporan keuangan interim ringkas sampai entitas telah menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap pertama yang disusun sesuai dengan PSAK ini.

C05. Jika entitas menerapkan PSAK 234 dalam menyusun laporan keuangan interim pada tahun pertama penerapan PSAK ini, maka entitas, sebagai bagian dari informasi yang disyaratkan oleh PSAK 234 paragraf 16A(a), mengungkapkan rekonsiliasi untuk setiap pos yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk periode komparatif terdekat sebelum periode kini dan periode kini kumulatif. Rekonsiliasi disyaratkan antara:

- (a) jumlah sajian kembali yang disajikan dengan menerapkan kebijakan akuntansi untuk periode komparatif dan periode komparatif kumulatif ketika entitas menerapkan PSAK ini; dan
- (b) jumlah yang sebelumnya disajikan dengan menerapkan kebijakan akuntansi untuk periode komparatif dan periode komparatif kumulatif ketika entitas menerapkan PSAK 201.

C06. Entitas diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk mengungkapkan rekonsiliasi yang dideskripsikan dalam paragraf C3 dan C5 untuk periode kini atau periode komparatif lebih dini.

C07. Pada tanggal penerapan awal PSAK ini, entitas yang memenuhi syarat untuk menerapkan PSAK 228 paragraf 18 diperkenankan untuk mengubah pilihannya dalam mengukur investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dari metode ekuitas ke nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Jika entitas melakukan perubahan tersebut, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif dengan menerapkan PSAK 208. Entitas yang menerapkan PSAK 227 paragraf 11 membuat perubahan yang sama dalam laporan keuangan tersendiri.

PENARIKAN PSAK 201

C08. PSAK ini menggantikan PSAK 201.

*Dalam PSAK 118 Lampiran C ini, seluruh kata “laporan keuangan” adalah terjemahan dari kata “*financial statements*”.

Draf EKSPOSUR

LAMPIRAN D
AMENDEMENT PADA PSAK ATAU ISAK LAIN DALAM SAK INDONESIA

Lampiran ini mengatur amendemen pada PSAK atau ISAK lain dalam SAK Indonesia.

PSAK 102: PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 59B. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 63E. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118 diterbitkan, judul PSAK 208 diubah.

PSAK 103: KOMBINASI BISNIS

Paragraf 50 dan PP64 diamendemen. Paragraf 64R ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

METODE AKUISISI

...

Periode Pengukuran

...

50. Setelah periode pengukuran berakhir, pihak pengakuisisi merevisi akuntansi untuk kombinasi bisnis hanya untuk memperbaiki kesalahan sesuai dengan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.~~

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Tanggal Efektif

...

64R. PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan mengamendemen paragraf 50 dan PP64. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

...

LAMPIRAN B PEDOMAN PENERAPAN

...

PENGUNGKAPAN (PENERAPAN PARAGRAF 59 AND 61)

PP64. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 59, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan:

...

(q) informasi sebagai berikut:

...

Jika pengungkapan setiap informasi yang disyaratkan pada subparagraf ini tidak praktis, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan fakta tersebut dan menjelaskan mengapa pengungkapan tersebut tidak praktis. Pernyataan ini menggunakan istilah 'tidak praktis' dengan pengertian yang sama seperti dalam PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.~~

PSAK 105: ASET TIDAK LANCAR YANG DIKUASAI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

Paragraf 02, 03, 05A, 05B, 13, 17, 26A, 28, 33-36A, 38, 39 dan 41, serta judul sebelum paragraf 31 dan 38 diamendemen. Paragraf 31 tidak diamendemen, tetapi disertakan untuk kemudahan referensi. Paragraf 44N ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

RUANG LINGKUP

02. ~~Persyaratan~~ ~~K~~klasifikasi, ~~dan~~ penyajian ~~dan~~ ~~pengungkapan~~ yang diatur dalam Pernyataan ini berlaku untuk semua aset tidak lancar¹ yang diakui dan semua kelompok lepasan dari entitas. Ketentuan pengukuran dalam Pernyataan ini berlaku untuk semua aset tidak lancar dan kelompok lepasan yang diakui (sebagaimana diatur dalam paragraf 04), kecuali untuk aset-aset yang diuraikan di paragraf 05 tetap diukur sesuai dengan PSAK yang terkait.

03. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ tidak boleh direklasifikasikan menjadi aset lancar sampai aset tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset yang dikuasai untuk dijual sesuai dengan Pernyataan ini. Aset dari suatu kelompok yang biasanya oleh entitas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang diperoleh khusus dengan tujuan untuk dijual kembali tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar kecuali aset tersebut memenuhi kriteria sebagai aset yang dikuasai untuk dijual sesuai dengan Pernyataan ini.

...

05A. Persyaratan klasifikasi, penyajian, ~~dan~~ pengukuran, ~~dan~~ ~~pengungkapan~~ dalam Pernyataan ini yang diterapkan untuk aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual juga diterapkan terhadap aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik yang bertindak dalam kapasitas sebagai pemilik (dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik).

05B. Pernyataan ini menetapkan persyaratan pengungkapan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan. Pengungkapan dalam ~~SAK Indonesia~~ PSAK lain tidak diterapkan terhadap aset (atau kelompok lepasan) tersebut kecuali ~~SAK Indonesia~~ PSAK lain tersebut mensyaratkan:

- (a) pengungkapan spesifik terhadap aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan; atau
- (b) pengungkapan mengenai pengukuran aset dan liabilitas dalam kelompok lepasan yang berada di luar ruang lingkup persyaratan pengukuran Pernyataan ini dan pengungkapan tersebut belum diungkapkan dalam catatan lain atas laporan keuangan.

Pengungkapan tambahan mengenai aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan mungkin diperlukan untuk mematuhi persyaratan ~~pengungkapan umum~~ dari PSAK 118 dan persyaratan dari PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~, secara khusus PSAK 208 paragraf 6A dan 31A-45 dan 125.

KLASIFIKASI ASET TIDAK LANCAR (ATAU KELOMPOK LEPASAN) SEBAGAI DIKUASAI UNTUK DIJUAL ATAU DIKUASAI UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK

...

Aset Tidak Lancar Yang Akan Ditinggalkan

13. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang akan ditinggalkan sebagai dikuasai untuk dijual, karena jumlah tercatatnya terutama akan dipulihkan melalui pemakaian berlanjut. Akan tetapi, jika kelompok lepasan yang akan ditinggalkan tersebut memenuhi kriteria di paragraf 32(a)–(c), maka entitas menyajikan atau mengungkapkan hasil dan arus kas dari kelompok lepasan tersebut sebagai operasi yang dihentikan sesuai dengan paragraf 33 dan 34 pada tanggal aset tersebut dihentikan pemakaiannya. Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang akan ditinggalkan termasuk aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang akan

digunakan sampai dengan akhir umur ekonomisnya serta aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang akan ditutup daripada dijual.

...

PENGUKURAN ASET TIDAK LANCAR (KELOMPOK LEPASAN) YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI DIKUASAI UNTUK DIJUAL

Pengukuran Aset Tidak Lancar (Atau Kelompok Lepas)

...

17. Ketika penjualan diperkirakan akan terjadi lebih dari satu tahun, maka entitas mengukur biaya untuk menjual pada nilai sekarang. Peningkatan nilai sekarang biaya untuk menjual sehubungan dengan berlalunya waktu diklasifikasikan harus disajikan sebagai biaya keuangan dalam laba rugi dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 118 terkait penghasilan dan beban yang timbul dari pengukuran kembali aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual.

...

Perubahan Rencana Penjualan Atau Rencana Distribusi Kepada Pemilik

...

26A. Jika entitas mereklasifikasi aset (atau kelompok lepasan) secara langsung dari dikuasai untuk dijual menjadi dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik, atau secara langsung dari dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik menjadi dikuasai untuk dijual, maka perubahan pada klasifikasi ini dianggap sebagai kelanjutan dari rencana awal pelepasan. Entitas:

- (a) tidak mengikuti pedoman pada paragraf 27–29 untuk menerapkan perubahan ini. Entitas menerapkan persyaratan klasifikasi, penyajian, dan persyaratan pengukuran dan pengungkapan pada Pernyataan ini yang berlaku untuk metode pelepasan baru tersebut.

...

28. Entitas memasukkan penyesuaian yang disyaratkan atas jumlah tercatat aset tidak lancar yang dihentikan untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik dalam laba rugi⁶ dari operasi yang dilanjutkan pada periode di mana masing-masing kriteria dalam paragraf 07–09 atau 12A tidak lagi terpenuhi. Laporan keuangan untuk periode sejak klasifikasi sebagai dikuasai untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik harus disesuaikan jika kelompok lepasan atau aset tidak lancar tidak lagi diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik merupakan entitas anak, operasi bersama, ventura bersama, entitas asosiasi, atau bagian dari kepentingan dalam ventura bersama atau entitas asosiasi. Entitas menyajikan penyesuaian tersebut pada pos yang sama dalam laporan penghasilan komprehensif yang digunakan untuk menyajikan keuntungan atau kerugian laba rugi, jika ada, yang diakui sesuai paragraf 37.

...

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

...

Penyajian Operasi Yang Dihentikan

31. Komponen suatu entitas terdiri dari operasi dan arus kas yang dapat dibedakan secara jelas, untuk tujuan operasional dan pelaporan keuangan, dari komponen lain dalam entitas. Dengan kata lain, komponen entitas akan terdiri dari unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang dikuasai untuk digunakan.

...

33. Entitas menyajikan atau mengungkapkan:

...

- (b) analisis atas jumlah tunggal dalam huruf (a) terhadap:
 - (i) pendapatan, beban, dan laba atau rugi sebelum pajak dari operasi yang dihentikan;

.....

- (ii) beban pajak penghasilan yang terkait sebagaimana disyaratkan PSAK 212: *Pajak Penghasilan* paragraf 81(h);
- (iii) ~~laba keuntungan~~ atau ~~kerugian rugi~~ yang diakui dalam pengukuran ke nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau dalam pelepasan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi yang dihentikan; dan
- (iv) beban pajak penghasilan yang terkait sebagaimana disyaratkan PSAK 212: *Pajak Penghasilan* paragraf 81(h).

Analisis tersebut dapat disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ~~atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain~~. Jika analisis tersebut disajikan dalam laporan ~~laba rugi dan~~ penghasilan komprehensif ~~lain~~, maka diklasifikasikan ~~disajikan~~ dalam kategori operasi yang dihentikan ~~bagian yang diidentifikasi sebagai terkait dengan operasi yang dihentikan~~, yaitu disajikan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Analisis tersebut tidak disyaratkan untuk kelompok lepasan yang merupakan entitas anak yang baru diperoleh yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dalam akuisisi (lihat paragraf 11).

- (c) Arus kas neto yang dapat diatribusikan pada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari operasi yang dihentikan. Informasi Pengungkapan ini dapat disajikan dalam laporan arus kas atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ~~atau dalam laporan keuangan~~. Pengungkapan ini tidak disyaratkan untuk kelompok lepasan yang merupakan entitas anak yang baru diakuisisi yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual pada saat akuisisi (lihat paragraf 11).
- (d) Jumlah penghasilan dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk. Informasi Pengungkapan ini dapat disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ~~atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain~~.

33A. Jika entitas menyajikan ~~komponen~~ unsur laba atau rugi dalam laporan laba rugi terpisah ~~dari laporan penyajian penghasilan komprehensif~~ sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 118 paragraf 12(b) PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 10A, maka kategori bagian yang diidentifikasi sebagai terkait dengan operasi yang dihentikan disajikan dalam laporan laba rugi ~~terpisah~~ tersebut.

34. Entitas menyajikan kembali penyajian dan pengungkapan yang diatur di paragraf 33 untuk periode ~~sebelumnya-lalu~~ yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga penyajian dan pengungkapan tersebut terkait dengan seluruh operasi yang telah dihentikan pada akhir periode pelaporan untuk periode sajian paling akhir.

35. Penyesuaian dalam periode ~~berjalan~~ kini atas jumlah yang sebelumnya diklasifikasikan ~~disajikan~~ dalam kategori operasi yang dihentikan, yang secara langsung terkait dengan pelepasan operasi yang telah dihentikan pada periode ~~sebelumnya-lalu~~, juga diklasifikasikan secara terpisah dalam kategori operasi yang dihentikan. Sifat dan jumlah penyesuaian tersebut diungkapkan. Contoh keadaan di mana penyesuaian tersebut dapat timbul, termasuk sebagai berikut:

...

36. Jika entitas berhenti untuk mengklasifikasikan suatu komponen dari entitas sebagai dikuasai untuk dijual, maka hasil operasi komponen tersebut yang sebelumnya diklasifikasikan ~~disajikan~~ dalam kategori operasi yang dihentikan sesuai dengan paragraf 33–35, diklasifikasikan kembali dan termasuk dalam penghasilan dari operasi yang dilanjutkan untuk semua periode sajian. Jumlah untuk periode ~~sebelumnya-lalu~~ dijelaskan bahwa telah dilakukan penyajian kembali.

36A. Entitas yang berkomitmen terhadap rencana penjualan yang mengakibatkan kehilangan pengendalian atas entitas anak menyajikan atau mengungkapkan informasi yang disyaratkan di paragraf 33–36 ketika entitas anak termasuk dalam kelompok lepasan yang memenuhi definisi sebagai operasi yang dihentikan sesuai dengan paragraf 32.

...

Penyajian Aset Tidak Lancar Atau Kelompok Lepasn Yang Diklasifikasikan Sebagai Dikuasai Untuk Dijual

38. Entitas menyajikan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas ini tidak boleh saling

hapus dan disajikan sebagai suatu jumlah tunggal. Kelompok aset dan liabilitas utama yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual ~~disajikan diungkapkan~~ secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, kecuali diperkenankan oleh paragraf 39. Setiap penghasilan atau beban kumulatif yang diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain dan terkait dengan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) dan diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, disajikan secara terpisah.

39. Jika kelompok lepasan adalah entitas anak yang baru diakuisisi yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual pada saat akuisisi (lihat paragraf 11), maka penyajian atau pengungkapan untuk kelompok aset dan liabilitas utama tidak diperlukan.

...

Pengungkapan Tambahan

41. Untuk periode di mana aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) telah diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau telah dijual, entitas mengungkapkan informasi berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:

...

(c) keuntungan atau kerugian yang diakui sesuai dengan paragraf 20–22 dan, jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dijelaskan judul pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya terdapat keuntungan laba atau kerugian rugi tersebut;

...

TANGGAL EFEKTIF

...

44N. PSAK 118 mengamendemen paragraf 02, 03, 05A, 05B, 13, 17, 26A, 28, 33-36A, 38, 39 dan 41, dan judul sebelum paragraf 31 dan 38. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” di paragraf 44L. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

**PSAK 106: AKTIVITAS EKSPLORASI DAN EVALUASI PADA PERTAMBANGAN
SUMBER DAYA MINERAL**

Paragraf 06 diamendemen. Paragraf 26B ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGAKUAN ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

Pengecualian Sementara Dari PSAK 208 Paragraf 11 And 12

06. Ketika mengembangkan kebijakan akuntansinya, entitas mengakui aset eksplorasi dan evaluasi menggunakan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 10.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

26B. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 06. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 26A. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

PSAK 107: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

Paragraf 03, 08, 20, 21, 24C, 24E, 24F, 24G, B5, B7, dan B46 diamendemen. Paragraf 19A-19B dan subjudul terkait, serta paragraf 44KK ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

RUANG LINGKUP

03. PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

...

- (f) instrumen yang disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK 232 paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Akan tetapi, pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 19A-19B disyaratkan untuk instrumen tersebut.

...

SIGNIFIKANSI INSTRUMEN KEUANGAN TERHADAP POSISI DAN KINERJA KEUANGAN

...

Laporan Posisi Keuangan

Kategori Aset Keuangan Dan Liabilitas Keuangan

08. Jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, ~~disajikan diungkapkan baik~~ dalam laporan posisi keuangan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

...

Instrumen Keuangan Yang Diklasifikasikan Sebagai Ekuitas Sesuai Dengan PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian Paragraf 16A-16B Atau Paragraf 16C-16D

19A. Untuk instrumen keuangan dengan fitur opsi jual (*puttable financial instrument*) yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK 232 paragraf 16A-16B, entitas mengungkapkan (sepanjang tidak diungkapkan di manapun):

- (a) ringkasan data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas;
- (b) tujuan, kebijakan, dan proses untuk mengelola kewajibannya untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut ketika diminta oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan dari periode lalu;
- (c) arus keluar kas yang diperkirakan dari penebusan atau pembelian kembali kelas instrumen keuangan tersebut; dan
- (d) informasi tentang bagaimana arus keluar kas yang diperkirakan dari penebusan atau pembelian kembali ditentukan.

19B. Jika entitas telah mereklasifikasikan instrumen keuangan berikut antara liabilitas keuangan dan ekuitas, maka entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasikan ke dalam dan ke luar dari masing-masing kategori (liabilitas keuangan atau ekuitas), serta saat dan alasan reklasifikasi tersebut:

- (a) instrumen keuangan dengan fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas dengan menerapkan PSAK 232 paragraf 16A-16B; atau
- (b) instrumen yang membebankan kepada entitas suatu kewajiban untuk menyerahkan kepada pihak lain suatu bagian pro rata atas aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas dengan menerapkan dengan PSAK 232 paragraf 16C-16D.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Unsur Pos Penghasilan, Beban, Keuntungan, Atau Kerugian

20. Entitas menyajikan, bergantung pada persyaratan penyajian dalam PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*, mengungkap unsur pos penghasilan, beban, keuntungan atau kerugian

.....

berikut ini pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau mengungkapkannya dalam pada catatan atas laporan keuangan:

...

Pengungkapan Lain

Kebijakan Akuntansi

21. Sesuai dengan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan paragraf 27A. ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ paragraf 117, entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material. Informasi tentang dasar pengukuran untuk instrumen keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan menjadi informasi kebijakan akuntansi material.

Akuntansi Lindung Nilai

...

Efek Akuntansi Lindung Nilai Terhadap Posisi Dan Kinerja Keuangan

...

24C. Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah di bawah ini secara terpisah dengan kategori risiko untuk jenis lindung nilai sebagai berikut:

...

(b) untuk lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri:

...

(iv) nilai reklasifikasian dari cadangan lindung nilai atas arus kas atau cadangan translasi valuta asing ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 ~~PSAK 201~~) (membedakan antara jumlah yang sebelumnya digunakan akuntansi lindung nilai, tetapi ~~untuk~~ arus kas masa depan lindung nilai (*hedged future cash flows*) yang tidak lagi diperkirakan ~~untuk~~ akan terjadi, dan jumlah yang telah dialihkan karena ~~item~~ unsur lindung nilai (*hedged item*) memengaruhi laba rugi);

(v) pos dalam laporan penghasilan komprehensif yang termasuk penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 ~~PSAK 201~~); dan

...

24E. Entitas menyediakan rekonsiliasi pada setiap komponen ekuitas dan analisis penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~, yang:

...

24F. Entitas menyediakan ~~mengungkapkan~~ informasi yang disyaratkan paragraf 24E secara terpisah berdasarkan kategori risiko. Pemisahan berdasarkan risiko ini mungkin dapat diungkapkan ~~disediakan~~ dalam catatan atas laporan keuangan.

Opsi Untuk Menetapkan Eksposur Kredit Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

24G. Jika entitas menetapkan suatu instrumen keuangan, atau proporsi dari instrumen keuangan tersebut, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi karena entitas menggunakan derivatif kredit untuk mengelola risiko kredit instrumen keuangan, maka entitas mengungkapkan:

...

(c) pada penghentian pengukuran suatu instrumen keuangan, atau proporsi dari instrumen keuangan tersebut, pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar instrumen keuangan tersebut telah menjadi jumlah tercatat baru sesuai dengan PSAK 109 paragraf 6.7.4 dan jumlah nominal atau jumlah pokok terkait (kecuali untuk menyediakan informasi komparatif sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~, entitas tidak perlu melanjutkan pengungkapan ini pada periode selanjutnya).

...

.....
TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

44KK. PSAK 118 mengamendemen paragraf 03, 08, 20, 21, 24C, 24E, 24F, 24G, PP05, PP07 dan PP46, serta menambahkan paragraf 19A-19B dan subjudul terkait. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

.....

**LAMPIRAN B
PEDOMAN PENERAPAN**

KELAS INSTRUMEN KEUANGAN DAN LEVEL PENGUNGKAPAN (PARAGRAF 06)

.....

Pengungkapan Lain – Kebijakan Akuntansi (Paragraf 21)

PP05. Paragraf 21 mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan terhadap pemahaman laporan keuangan. Untuk instrumen keuangan, pengungkapan tersebut dapat mencakup:

.....

PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan paragraf 27G PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 422 juga mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan, bersama dengan kebijakan akuntansi material atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan, selain dari yang menggunakan melibatkan estimasi, yang dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

SIFAT DAN CAKUPAN RISIKO YANG TIMBUL DARI INSTRUMEN KEUANGAN (PARAGRAF 31–42)

.....

Pengungkapan Kuantitatif (Paragraf 34)

PP07. Paragraf 34(a) mensyaratkan pengungkapan ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur entitas terhadap risiko berdasarkan informasi yang disajikan secara internal kepada anggota manajemen kunci entitas. Jika entitas menggunakan beberapa metode untuk mengelola eksposur risiko, maka entitas mengungkapkan informasi menggunakan metode atau metode-metode yang menyediakan informasi yang paling relevan dan andal. PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menjelaskan relevansi dan keandalan.

.....

PENURUNAN NILAI (PARAGRAF 42C–42H)

.....

Saling Hapus Aset Keuangan Dan Liabilitas Keuangan (Paragraf 13A–13F)

.....

Pengungkapan Jumlah Neto Yang Disajikan Dalam Laporan Posisi Keuangan (Paragraf 13C(C))

.....

PP46. Jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 13C(c) harus direkonsiliasi **kepada-ke** jumlah pos individual yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, jika entitas dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 118 mengagregasikan atau mendisagregasikan jumlah yang disajikan dalam menentukan bahwa penggabungan atau pemisahan jumlah pos laporan keuangan individual ketika entitas menyediakan jumlah yang

.....

.....
disyaratkan oleh paragraf 13C(c) memberikan informasi yang lebih relevan, maka entitas harus merekonsiliasikan jumlah agregasian atau disagregasian tersebut penggabungan atau pemisahan yang diungkapkan dalam paragraf 13C(e) kembali ke jumlah pos individual yang disajikan di laporan posisi keuangan

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 44AA. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 44FF. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118 diterbitkan, judul PSAK 208 diubah.

Catatan kaki ditambahkan pada akhir paragraf 44II. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118 diterbitkan, persyaratan untuk mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dibawa ke dalam PSAK 208.

PSAK 108: SEGMENT OPERASI

Paragraf 23 diamendemen dan paragraf 36D ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGUNGKAPAN

...

Informasi Tentang Laba Rugi, Aset, Dan Liabilitas

23. Entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen dilaporkan. Entitas melaporkan suatu ukuran dari total aset dan liabilitas untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional. Entitas juga mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tertentu termasuk dalam ukuran laba rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional, atau secara teratur disediakan untuk pengambil keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam ukuran laba rugi segmen:

...

- f) unsur-unsur material dari penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 42 PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 97;

...

KETENTUAN TRANSISI DAN TANGGAL EFEKTIF

...

36D. PSAK 118 mengamendemen paragraf 23. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN

Paragraf 5.6.5, 5.6.7, 5.7.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.14, 6.5.15, 6.7.2, dan PP4.1.2A, diamendemen dan paragraf 7.1.11 ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

BAB 5 PENGUKURAN

...

5.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

...

5.6.5. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~). Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. (Lihat paragraf PP5.6.1.

...

5.6.7. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~) pada tanggal reklasifikasi.

5.7 Keuntungan Dan Kerugian

...

Aset Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

5.7.10. Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai (lihat Bagian 5.5) dan keuntungan atau kerugian selisih kurs (lihat paragraf PP5.7.2–PP5.7.2A), sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~). Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, entitas mencatat keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya sebagai penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.6.5 dan 5.6.7. Bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

...

BAB 6 AKUNTANSI LINDUNG NILAI

...

6.5 Akuntansi Untuk Hubungan Lindung Nilai Kualifikasian

...

Lindung Nilai Atas Arus Kas

6.5.11. Selama suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.4.1, hubungan lindung nilai dicatat sebagai berikut:

...

(d) jumlah yang telah diakumulasikan dalam cadangan lindung nilai atas arus kas sesuai dengan (a) harus dicatat sebagai berikut:

- (i) jika prakiraan transaksi lindung nilai (*hedged forecast transaction*) kemudian menghasilkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau prakiraan transaksi lindung nilai untuk aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan menjadi komitmen pasti di mana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka entitas menghapus jumlah tersebut dari cadangan lindung nilai atas arus kas dan memasukkannya ke dalam biaya awal atau nilai tercatat lain dari aset atau liabilitas. Hal ini bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi (lihat **PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan** ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~) dan dengan demikian tidak memengaruhi penghasilan komprehensif lain.
- (ii) untuk lindung nilai atas arus kas selain yang dicakup oleh (i), jumlah tersebut harus direklasifikasi dari cadangan lindung nilai atas arus kas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat **PSAK 118** ~~PSAK 201~~) pada periode yang sama atau periode selama arus kas masa depan ekspektasian yang dilindung nilai akan memengaruhi laba rugi (contohnya, pada periode di mana pendapatan bunga atau beban bunga diakui atau ketika prakiraan penjualan terjadi).
- (iii) akan tetapi, jika jumlah tersebut menunjukkan kerugian dan entitas memperkirakan bahwa seluruh atau sebagian kerugian tersebut tidak akan dapat dipulihkan dalam satu atau lebih periode di masa depan, entitas harus segera mereklasifikasi jumlah yang diperkirakan tidak akan dapat dipulihkan ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat **PSAK 118** ~~PSAK 201~~).

6.5.12. Ketika entitas menghentikan akuntansi lindung nilai untuk suatu lindung nilai atas arus kas (lihat paragraf 6.5.6 dan 6.5.7(b)), entitas harus mencatat jumlah yang telah diakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas sesuai paragraf 6.5.11(a) sebagai berikut:

...

(b) jika arus kas masa depan lindung nilai tidak lagi diperkirakan akan terjadi, jumlah tersebut harus segera direklasifikasi dari cadangan lindung nilai atas arus kas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat **PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan** ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~). Arus kas masa depan yang dilindung nilai yang tidak lagi kemungkinan besar terjadi masih dapat diperkirakan terjadi.

Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri

...

6.5.14. Keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai yang telah diakumulasi dalam cadangan translasi valuta asing direklasifikasi dari ekuitas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat **PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan** ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~) sesuai dengan **PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing** paragraf 48–49 tentang pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri.

.....

Akuntansi Untuk Nilai Waktu Dari Opsi

6.5.15. Ketika entitas memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari suatu kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik dari opsi sebagai instrumen lindung nilai (lihat paragraf 6.2.4(a)), entitas mencatat nilai waktu dari opsi sebagai berikut (lihat paragraf PP6.5.29–PP6.5.33):

...

- (b) perubahan nilai wajar atas nilai waktu opsi yang melakukan lindung nilai atas suatu ~~item~~ unsur lindung nilai (*hedged item*) yang berkaitan dengan transaksi diakui dalam penghasilan komprehensif lain jika berkaitan dengan ~~item~~ unsur lindung nilai (*hedged item*) dan terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Perubahan nilai wajar kumulatif yang timbul dari nilai waktu opsi yang telah terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah (suatu “jumlah”) harus diperhitungkan sebagai berikut:
- jika ~~item~~ unsur lindung nilai (*hedged item*) kemudian mengakibatkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau komitmen pasti untuk suatu aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan di mana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, entitas menghapus jumlah tersebut dari komponen ekuitas terpisah dan memasukkannya secara langsung dalam biaya awal atau nilai tercatat lainnya atas aset atau liabilitas. Hal ini bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~) dan dengan demikian tidak memengaruhi penghasilan komprehensif lain.
 - untuk hubungan lindung nilai selain yang dicakup dalam (i), jumlah tersebut direklasifikasi dari komponen ekuitas terpisah ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 ~~PSAK 201~~) pada periode yang sama atau periode selama arus kas masa depan ekspektasian yang dilindung nilai memengaruhi laba rugi (misalnya, ketika prakiraan penjualan terjadi).
 - akan tetapi, jika seluruh atau sebagian jumlah tersebut diperkirakan tidak akan dipulihkan dalam satu atau lebih periode di masa depan, jumlah yang diperkirakan tidak akan dipulihkan harus segera direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 ~~PSAK 201~~).
- (c) perubahan nilai wajar atas nilai waktu opsi yang melakukan lindung nilai atas ~~item~~ unsur lindung nilai (*hedged item*) yang berkaitan dengan periode waktu diakui dalam penghasilan komprehensif lain jika berkaitan dengan ~~item~~ unsur lindung nilai (*hedged item*) dan terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Nilai waktu pada tanggal penetapan opsi sebagai instrumen lindung nilai, sepanjang berkaitan dengan ~~item~~ unsur lindung nilai (*hedged item*), diamortisasi dengan suatu dasar sistematis dan rasional selama periode di mana penyesuaian lindung nilai atas nilai intrinsik opsi dapat memengaruhi laba rugi (atau penghasilan komprehensif lain, jika ~~item~~ unsur lindung nilai (*hedged item*) merupakan instrumen ekuitas yang telah ditetapkan oleh entitas untuk disajikan perubahan nilai wajarnya pada penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.5). Oleh karena itu, pada setiap periode pelaporan, jumlah yang diamortisasi harus direklasifikasi dari komponen ekuitas terpisah ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 ~~PSAK 201~~). Akan tetapi, jika akuntansi lindung nilai dihentikan atas suatu hubungan lindung nilai yang memasukkan perubahan nilai intrinsik opsi sebagai instrumen lindung nilai, nilai neto (yaitu termasuk amortisasi kumulatif) yang telah diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah segera direklasifikasi ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 ~~PSAK 201~~).

...

6.7 Opsi untuk menetapkan eksposur kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

...

Akuntansi untuk eksposur kredit yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi

6.7.2. Jika instrumen keuangan ditetapkan sesuai dengan paragraf 6.7.1 sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal, atau sebelumnya tidak diakui, perbedaan antara nilai tercatat, jika ada, dan nilai wajar pada saat penetapan diakui segera dalam laba rugi. Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 4.1.2A, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain segera direklasifikasi dari ekuitas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~).

...

BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

7.1 Tanggal Efektif

...

7.1.11. PSAK 118 mengamendemen paragraf 5.6.5, 5.6.7, 5.7.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.14, 6.5.15, 6.7.2 dan PP4.1.2A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

...

LAMPIRAN B PEDOMAN PENERAPAN

...

Klasifikasi (Bab 4)

Klasifikasi Aset Keuangan (Bagian 4.1)

Model Bisnis Entitas Untuk Mengelola Aset Keuangan

...

PP4.1.2A. Model bisnis entitas mengacu pada bagaimana entitas mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Artinya, model bisnis entitas menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Sebagai konsekuensinya, penilaian ini tidak dilakukan atas dasar skenario bahwa entitas tidak mengharapkan untuk terjadi, seperti apa yang disebut skenario “kondisi terburuk” atau skenario “kondisi stres”. Sebagai contoh, jika entitas mengharapkan bahwa akan menjual portofolio aset keuangan tertentu hanya dalam skenario kondisi stres, skenario itu tidak akan memengaruhi penilaian entitas terhadap model bisnis untuk aset tersebut jika entitas secara wajar mengharapkan bahwa skenario seperti itu tidak akan terjadi. Jika arus kas direalisasi dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan entitas pada tanggal entitas menilai model bisnis (sebagai contoh, jika entitas menjual lebih banyak atau lebih sedikit aset keuangan daripada yang diharapkan ketika entitas mengklasifikasikan aset), maka tidak menimbulkan kesalahan pada periode ~~sebelumnya lalu~~ dalam laporan keuangan entitas (lihat PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*) dan juga tidak mengubah klasifikasi aset keuangan tersisa yang dimiliki dalam model bisnis (yaitu aset-aset yang entitas akui pada periode ~~sebelumnya lalu~~ dan masih dimiliki) selama entitas mempertimbangkan semua informasi yang relevan yang tersedia pada saat entitas membuat penilaian model bisnis. Akan tetapi, ketika entitas menilai model bisnis untuk aset keuangan yang baru diterbitkan atau baru dibeli, entitas harus mempertimbangkan informasi tentang bagaimana arus kas direalisasikan di masa lalu, bersama dengan semua informasi yang relevan lainnya.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 7.2.1. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

PSAK 110: LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf C02. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Draf EKSPOSUR

PSAK 111: *PENGATURAN BERSAMA*

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf C01B. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Draf EKSPOSUR

PSAK 112: PENGUNGKAPAN KEPENTINGAN DALAM ENTITAS LAIN

Paragraf PP14 diamendemen dan paragraf C01E ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

**LAMPIRAN B
PEDOMAN PENERAPAN**

...

RINGKASAN INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK, VENTURA BERSAMA, DAN ENTITAS ASOSIASI (PARAGRAF 12 DAN 21)

...

PP14. Ringkasan informasi keuangan yang diungkapkan ~~disajikan~~ sesuai dengan paragraf PP12 dan PP13 adalah jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan ventura bersama atau entitas asosiasi (dan bukan bagian entitas atas jumlah tersebut). Jika entitas mencatat kepentingannya dalam ventura bersama atau entitas asosiasi menggunakan metode ekuitas:

- (a) jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan ventura bersama atau entitas asosiasi disesuaikan untuk mencerminkan penyesuaian yang dibuat oleh entitas ketika menggunakan metode ekuitas, seperti penyesuaian nilai wajar yang dibuat pada saat akuisisi dan penyesuaian untuk perbedaan kebijakan akuntansi.
- (b) entitas memberikan rekonsiliasi antara ringkasan informasi keuangan yang diungkapkan ~~disajikan~~ dan jumlah tercatat atas kepentingannya dalam ventura bersama atau entitas asosiasi.

...

**LAMPIRAN C
TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

C01E. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf PP14. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf C01D. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

PSAK 113: PENGUKURAN NILAI WAJAR

Paragraf 51 diamendemen dan paragraf C07 ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGUKURAN

...

Penerapan Pada Aset Keuangan Dan Liabilitas Keuangan Dengan Posisi Saling Hapus Dalam Risiko Pasar Atau Risiko Kredit Pihak Lawan

...

51. Entitas membuat keputusan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk menggunakan pengecualian di paragraf 48. Entitas yang menggunakan pengecualian tersebut menerapkan kebijakan akuntansi tersebut, termasuk kebijakan entitas untuk mengalokasikan penyesuaian *bid-ask* (lihat paragraf 53–55) dan penyesuaian kredit (lihat paragraf 56), jika berlaku, secara konsisten dari periode ke periode untuk portofolio tertentu.

...

LAMPIRAN C

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

C07. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 51. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 115: *PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN*

Paragraf 43 diamendemen dan paragraf C01D ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGAKUAN

...

Pemenuhan Kewajiban Pelaksanaan

...

Pengukuran Kemajuan Terhadap Penyelesaian Penuh Atas Kewajiban Pelaksanaan

...

Metode Pengukuran Kemajuan

...

43. Sebagaimana keadaan berubah sepanjang waktu, entitas memutakhirkan pengukuran kemajuan untuk mencerminkan perubahan apapun dalam hasil kewajiban pelaksanaan. Perubahan terhadap pengukuran kemajuan entitas dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

...

LAMPIRAN C

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

TANGGAL EFEKTIF

...

C01D. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 43. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf C03(a). Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

PSAK 116: SEWA

Paragraf 49 diamendemen dan paragraf C01E ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

SEWA

...

Penyajian

...

49. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak-guna. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* paragraf 61 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan dalam kategori pendanaan dalam laporan laba rugi beban bunga atas liabilitas sewa, yang diidentifikasi oleh entitas dengan menerapkan paragraf 36(a) merupakan komponen biaya keuangan, di mana PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 82(b) mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

...

LAMPIRAN C

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

TANGGAL EFEKTIF

...

C1E. PSAK 118 mengamendemen paragraf 49. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf C05(a). Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

DASAR KESIMPULAN

Catatan kaki ditambahkan pada “*International Financial Reporting Standards*” di paragraf DK08. Teks baru digarisbawah.

* IFRS 18 *Presentation and Disclosure in the Financial Statements* Lampiran A mendefinisikan *IFRS Accounting Standards* yang menggantikan definisi *International Financial Reporting Standards* yang terdapat dalam IAS 1 *Presentation of Financial Statements*, yang sebelumnya dikenal sebagai IFRS, IFRSs, dan IFRS Standards. Dalam hal ketika IFRS Accounting Standards mengacu ke IFRS, IFRSs atau IFRS Standards referensi tersebut tetap digunakan dan tidak diubah.

Catatan kaki ditambahkan pada “IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*” di paragraf DK20. Teks baru digarisbawah.

* Ketika IFRS 18 *Presentation and Disclosure in the Financial Statements* diterbitkan, IASB mengubah judul IAS 8 menjadi *Basis of Preparation of Financial Statements*.

PSAK 117: KONTRAK ASURANSI

Paragraf 91, 96, 103, dan PP129 diamendemen. Paragraf C02B ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGAKUAN DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KINERJA KEUANGAN (LIHAT JUGA PARAGRAF PP120– PP136)

...

Penghasilan Atau Beban Keuangan Asuransi (Lihat Juga Paragraf PP128–PP136)

...

91. Jika entitas mengalihkan kelompok kontrak asuransi atau menghentikan pengakuan kontrak asuransi dengan menerapkan paragraf 77:

- (a) entitas mereklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~) setiap sisa jumlah untuk kelompok (atau kontrak) yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain karena entitas memilih kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam paragraf 88(b).
- (b) entitas tidak mereklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 ~~PSAK 201~~) setiap sisa jumlah untuk kelompok (atau kontrak) yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain karena entitas memilih kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam paragraf 89(b).

...

PENGUNGKAPAN

...

96. PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 41-43 ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ paragraf 29-31 menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan materialitas dan penggabungan agregasi dan disagregasi informasi. Contoh karakteristik dasar penggabungan yang mungkin sesuai sebagai dasar disagregasi untuk informasi yang diungkapkan mengenai kontrak asuransi adalah berdasarkan:

- (a) jenis kontrak (misalnya, lini produk utama);
- (b) wilayah geografis (misalnya, negara atau wilayah); atau
- (c) segmen yang dilaporkan, sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 108: *Segmen Operasi*.

Penjelasan jumlah yang diakui

...

103. Jika relevan, entitas mengungkapkan secara terpisah setiap jumlah berikut terkait dengan jasa, dalam rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 100:

...

- (c) komponen investasi yang dikecualikan dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi (digabungkan dengan pengembalian premi kecuali jika pengembalian premi diungkapkan ~~disajikan~~ sebagai bagian dari arus kas dalam periode yang dijelaskan dalam paragraf 105(a)(i)).

...

LAMPIRAN B PEDOMAN PENERAPAN

...

PENDAPATAN PENGHASILAN ATAU BEBAN KEUANGAN ASURANSI (PARAGRAF 87–92)

...

PP129. Paragraf 88–89 mensyaratkan entitas untuk membuat pilihan kebijakan akuntansi mengenai apakah akan memisahkan pendapatan atau beban asuransi untuk periode ~~berjalan~~ kini antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas menerapkan pilihan kebijakan akuntansi terhadap portofolio dari kontrak asuransi. Dalam menilai kebijakan akuntansi yang sesuai untuk suatu portofolio kontrak asuransi, dengan menerapkan paragraf 13 dari PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan~~, entitas mempertimbangkan, untuk setiap portofolio kontrak, aset yang dimiliki entitas dan bagaimana entitas mencatat aset tersebut.

...

LAMPIRAN C TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

TANGGAL EFEKTIF

...

C2B. PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan mengamendemen paragraf 91, 96, 103 dan PP129. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” di paragraf C03(a). Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

PSAK 202: PERSEDIAAN

Paragraf 39 diamendemen dan paragraf 40H ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGUNGKAPAN

...

39. Beberapa entitas mengklasifikasikan beban berdasarkan sifat dalam kategori operasi pada laporan merujuk suatu format laba rugi dengan cara yang mengakibatkan jumlah yang disajikan diungkapkan adalah selain biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode yang bersangkutan. Dalam format ini, entitas menyajikan analisis beban menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat dari beban. Dalam kasus ini, entitas menyajikan mengungkapkan biaya yang diakui sebagai beban untuk bahan baku dan bahan habis pakai, imbalan kerja biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya bersama-sama dengan jumlah perubahan neto persediaan pada periode tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

...

40H. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 39. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 207: LAPORAN ARUS KAS

Paragraf 06, 10, 12, 14, 16-18, 20, 31, 32, 35, 46, dan 47 diamendemen. Paragraf 33A, 34A-34D, dan 64 ditambahkan. Paragraf 33 dan 34 dihapus. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

DEFINISI

06. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

...
Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas dan penerimaan bunga dan dividen seperti yang dideskripsikan dalam paragraf 34A-34D.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

10. *Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam menyusun laporan arus kas, entitas menerapkan Pernyataan ini dan juga menerapkan persyaratan umum untuk laporan keuangan dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 09-43 dan 113-114.*

12. Suatu transaksi tunggal dapat mencakup beberapa arus kas yang diklasifikasikan secara berbeda. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman bank mencakup keduanya, pokok pinjaman dan bunga, maka unsur bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

Aktivitas Operasi

14. Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- (a) penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
- (b) penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
- (c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- (d) pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
- (e) [dikosongkan]
- (f) pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi; ~~dan~~
- (g) penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan; ~~dan~~
- (h) penerimaan kas dari dividen dan penerimaan serta pembayaran kas dari bunga sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 34B-34D.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi. Arus kas yang terkait dengan transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi. Akan tetapi, pembayaran kas untuk pabrikasi atau memperoleh aset yang dimiliki untuk direntalkan kepada pihak lain dan selanjutnya dimiliki untuk dijual sebagaimana yang dideskripsikan dalam PSAK 216: *Aset Tetap* paragraf 68A adalah arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari rental dan penjualan selanjutnya atas aset tersebut juga merupakan arus kas dari aktivitas operasi.

Aktivitas Investasi

16. Penyajian Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan

untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah:

- (a) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset takberwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
- (b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset takberwujud, dan aset jangka panjang lain;
- (c) pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain termasuk dan kepentingan dalam entitas asosiasi dan ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan);
- (d) penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain termasuk dan kepentingan dalam entitas asosiasi dan ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan);
- (e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan);
- (f) penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);
- (g) pembayaran kas untuk future contracts, forward contracts, option contracts dan swap contracts, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan
- (h) penerimaan kas dari *future contracts*, *forward contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
- (i) penerimaan kas dari bunga dan dividen sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 34A-34D.

Jika suatu kontrak dicatat sebagai lindung nilai atas suatu posisi teridentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindung nilainya.

Aktivitas Pendanaan

17. Pengungkapan Penyajian terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah:

- (a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain;
- (b) pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas;
- (c) penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain;
- (d) pelunasan pinjaman; dan
- (e) pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa
- (f) pembayaran kas dari dividen sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 33A; dan
- (g) pembayaran kas dari bunga sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 34A-34D.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

18. *Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:*

- (a) *metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan; atau*
- (b) *metode tidak langsung, dengan metode ini laba ~~atau~~ (rugi) operasi disesuaikan dengan ~~mengoreksi~~ untuk:*
 - (i) *pengaruh transaksi yang bersifat nonkas;*
 - (ii) *penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan;*
 - (iii) *penghasilan atau beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi dalam laporan laba rugi yang arus kas terkaitnya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi atau pendanaan; dan*

- (iv) arus kas dari aktivitas operasi yang penghasilan atau beban terkaitnya tidak diklasifikasikan dalam kategori operasi pada laporan laba rugi. dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan*

...

20. Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba ~~atau~~ (rugi) operasi neto dari untuk dampak dari:

- (a) perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan kini;
- (b) pos nonkas seperti depresiasi, provisi, dan pajak tangguhan, keuntungan kerugian valuta asing yang belum direalisasi yang diklasifikasikan dalam kategori operasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan; dan
- (c) penghasilan atau beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi dalam laporan laba rugi seluruh pos lain di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi atau dan pendanaan; dan
- (d) arus kas operasi, seperti pajak penghasilan (sesuai dengan paragraf 35), di mana penghasilan atau beban terkaitnya tidak diklasifikasikan dalam kategori operasi di laporan laba rugi.

Sebagai alternatif, arus kas neto dari aktivitas operasi dapat disajikan berdasarkan metode tidak langsung dengan menyajikan pendapatan dan beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi dalam laporan laba rugi, yang diungkapkan dalam laporan laba rugi komprehensif serta perubahan dalam persediaan, piutang usaha, dan utang ~~operasi~~ usaha selama periode dan setiap arus kas operasi lain yang penghasilan atau beban terkaitnya tidak diklasifikasikan dalam kategori operasi.

...

BUNGA DAN DIVIDEN

31. *Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing disajikan diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode dengan menerapkan paragraf 32, 33A dan 34A-34D sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.*

32. Jumlah total bunga yang dibayarkan selama suatu periode termasuk diungkapkan dalam laporan arus kas baik yang telah diakui sebagai beban dalam laba rugi, atau yang dikapitalisasi sesuai PSAK 223: *Biaya Pinjaman*.

33. [Dikosongkan] ~~Bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan mengenai klasifikasi arus kas ini bagi entitas lain. Bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena memengaruhi laba rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai imbal hasil investasi.~~

33A. Entitas mengklasifikasikan dividen yang dibayarkan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

34. [Dikosongkan] ~~Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud membantu pengguna untuk menentukan kemampuan entitas membayar dividen dari arus kas operasi.~~

34A. Entitas, selain entitas yang dideskripsikan dalam paragraf 34B, mengklasifikasikan:

- (a) bunga yang dibayarkan (seperti yang dideskripsikan dalam paragraf 32) sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.
- (b) bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas dari aktivitas investasi.

34B. Entitas yang melakukan investasi pada aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama (sebagaimana ditentukan dengan menerapkan PSAK 118 paragraf PP30-PP41) menentukan bagaimana mengklasifikasikan dividen yang diterima, bunga yang diterima, dan bunga yang dibayarkan dalam laporan arus kas dengan mengacu pada bagaimana—dengan menerapkan PSAK 118—entitas tersebut mengklasifikasikan penghasilan dividen, penghasilan bunga, dan beban bunga dalam laporan laba rugi. Entitas mengklasifikasikan total

masing-masing arus kas tersebut ke dalam satu kategori tunggal dalam laporan arus kas (yaitu sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan).

34C. Dalam menerapkan paragraf 34B, jika entitas mengklasifikasikan total masing-masing penghasilan dividen, penghasilan bunga dan beban bunga dalam satu kategori tunggal dalam laporan laba rugi, maka entitas mengklasifikasikan total masing-masing dividen yang diterima, bunga yang diterima, dan bunga yang dibayarkan sebagai arus kas yang timbul dari aktivitas terkait dalam laporan arus kas. Sebagai contoh, jika entitas mengklasifikasikan seluruh beban bunganya dalam kategori pendanaan pada laporan laba rugi, maka entitas akan mengklasifikasikan seluruh bunga yang dibayarkan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

34D. Dalam menerapkan PSAK 118, entitas mungkin disyaratkan untuk mengklasifikasikan setiap penghasilan dividen, penghasilan bunga, dan beban bunga dalam lebih dari satu kategori dalam laporan laba rugi. Dalam kasus tersebut, ketika menerapkan paragraf 34B entitas membuat pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan arus kas yang terkait ke dalam salah satu aktivitas dalam laporan arus kas. Sebagai contoh, jika entitas mengklasifikasikan beban bunga dalam kategori operasi dan kategori pendanaan pada laporan laba rugi, maka entitas akan mengklasifikasikan seluruh bunga yang dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya sebagai arus kas dari aktivitas operasi, atau arus kas dari aktivitas pendanaan.

PAJAK ATAS PENGHASILAN

35. Arus kas yang timbul dari pajak atas penghasilan disajikan ~~diungkapkan~~ secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

...

46. Oleh karena ~~keanekaragaman~~ keberagaman praktik pengelolaan kas dan pengaturan perbankan di seluruh dunia dan agar sesuai dengan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan* PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*, entitas mengungkapkan kebijakan yang ~~dirujuk~~ diadopsinya dalam menentukan komposisi kas dan setara kas.

47. Dampak setiap perubahan dalam kebijakan untuk menentukan komponen kas dan setara kas, sebagai contoh, perubahan dalam klasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya diperlakukan sebagai bagian dari portofolio investasi entitas, dilaporkan sesuai dengan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

47. Dampak setiap perubahan dalam kebijakan untuk menentukan komponen kas dan setara kas, sebagai contoh, perubahan dalam klasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya diperlakukan sebagai bagian dari portofolio investasi entitas, dilaporkan sesuai dengan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

TANGGAL EFEKTIF

...

64. PSAK 118 mengamendemen paragraf 06, 10, 12, 14, 16–18, 20, 31, 32, 35, 46 dan 47, menambah paragraf 33A dan 34A–34D, dan menghapus paragraf 33 dan 34. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 208: *KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN KESALAHAN*

Judul PSAK 208 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PSAK 208: DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ~~KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN KESALAHAN~~

Paragraf 01, 03, 05, 11 dan 32 diamendemen serta paragraf 2 dihapus. Paragraf 03A, 06A-06J, 06K-06L, 06M-06N, 27A-27I, 31A-31I, masing-masing dengan judul atau subjudul terkait, dan paragraf 54J ditambahkan. Subjudul juga ditambahkan sebelum paragraf 28. Paragraf 28 tidak diamendemen, tetapi disertakan untuk memudahkan referensi. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

TUJUAN

01. Tujuan Pernyataan ini adalah ~~mengatur~~ untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, dan keterbandingan laporan keuangan tersebut dari waktu ke waktu serta dengan laporan keuangan entitas lainnya, dengan menetapkan dasar penyusunan laporan keuangan yang meliputi:

- (a) hal umum;
- (b) kriteria dalam pemilihan, dan perubahan, dan pengungkapan kebijakan akuntansi; dan;
- (c) ~~bersama dengan~~ perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan.

~~Pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya.~~

02. [Dikosongkan] ~~Pengungkapan yang disyaratkan untuk kebijakan akuntansi, kecuali perubahan kebijakan akuntansi, diatur dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*.~~

RUANG LINGKUP

03. *Pernyataan ini diterapkan dalam penentuan dasar penyusunan laporan keuangan, termasuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya lalu.*

03A. PSAK 234: *Laporan Keuangan Interim* mengatur persyaratan untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan interim ringkas. Paragraf 06A-06N Pernyataan ini juga berlaku untuk laporan keuangan interim tersebut.

...

DEFINISI

05. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

...

*Informasi ~~M~~material didefinisikan dalam PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Lampiran A PSAK 201 paragraf 7 dan. Material digunakan dalam Pernyataan ini dengan arti yang sama.**

DASAR PENYUSUNAN—HAL UMUM

Penyajian Wajar Dan Kepatuhan Terhadap SAK Indonesia

06A. *Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual). Penerapan SAK Indonesia, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian wajar laporan keuangan.*

06B. **Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK Indonesia membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK Indonesia dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK Indonesia kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK Indonesia.**

06C. Dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian wajar dengan patuh pada SAK Indonesia terkait. Penyajian wajar juga mensyaratkan entitas untuk:

- (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan Pernyataan ini. Pernyataan ini mengatur hierarki pedoman otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara spesifik mengatur suatu unsur.
- (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, terbandingkan, dan dipahami.
- (c) menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dalam SAK Indonesia tidak cukup memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain pada posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas

06D. **Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan, maupun dengan catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan.**

06E. [Dikosongkan]

06F. [Dikosongkan]

06G. [Dikosongkan]

06H. [Dikosongkan]

06I. **Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu persyaratan dalam PSAK akan sangat menyesatkan sehingga akan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Konseptual, maka entitas semaksimal mungkin mengurangi aspek kepatuhan yang dianggap menyesatkan tersebut dengan mengungkapkan:**

- (a) judul PSAK terkait, sifat persyaratan, dan alasan mengapa manajemen telah menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan dimaksud akan sangat menyesatkan dalam keadaan tersebut sehingga bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Konseptual; dan
- (b) untuk setiap periode sajian, penyesuaian terhadap setiap unsur dalam laporan keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian wajar.

06J. Untuk tujuan penerapan paragraf 06I, suatu unsur informasi akan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan ketika informasi tersebut tidak merepresentasikan secara tepat transaksi, peristiwa dan kondisi lain, baik yang dimaksudkan untuk direpresentasikan atau diperkirakan cukup dapat direpresentasikan dan, sebagai konsekuensinya, informasi tersebut mungkin akan memengaruhi keputusan ekonomik dari pengguna laporan keuangan. Ketika menilai apakah kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari suatu PSAK akan sangat menyesatkan sehingga akan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam *Kerangka Konseptual*, manajemen mempertimbangkan:

- (a) mengapa tujuan laporan keuangan tidak tercapai dalam keadaan tertentu tersebut; dan
- (b) bagaimana keadaan entitas berbeda dari keadaan entitas lain yang mematuhi persyaratan. Jika entitas lain dengan keadaan serupa mematuhi persyaratan tersebut, maka terdapat praduga yang dapat dibantah (*rebuttable presumption*) bahwa kepatuhan entitas terhadap persyaratan tersebut tidak akan sangat menyesatkan sehingga akan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam *Kerangka Konseptual*.

Kelangsungan Usaha

06K. **Ketika menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak**

memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari dalam membuat penilaiannya mengenai adanya ketidakpastian material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

06L. Dalam menilai apakah asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit, namun tidak terbatas pada, dua belas bulan sejak akhir periode pelaporan. Derajat pertimbangan ini bergantung pada fakta dalam setiap kasus. Ketika entitas memiliki riwayat operasi yang menghasilkan laba dan akses tersedia ke sumber daya keuangan, maka entitas dapat menyimpulkan bahwa dasar akuntansi kelangsungan usaha adalah tepat tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen mungkin perlu mempertimbangkan berbagai faktor terkait profitabilitas masa kini maupun yang diperkirakan, jadwal pembayaran kembali utang dan sumber potensial pendanaan pengganti sebelum entitas dapat menyimpulkan bahwa dasar kelangsungan usaha adalah tepat.

Akuntansi Dengan Dasar Akrua

06M. Entitas menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas.

06N. Ketika dasar akuntansi akrual digunakan, entitas mengakui unsur sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (elemen laporan keuangan) ketika unsur tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan elemen tersebut dalam *Kerangka Konseptual*.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemilihan Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

...

11. Dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan dalam paragraf 10, manajemen mengacu, dan mempertimbangkan keterterapan dari, sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:

...

(b) definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam ~~Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan~~ (Kerangka Konseptual).

...

Pengungkapan

Pengungkapan Pemilihan Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

27A. Entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material (lihat paragraf 05). Informasi kebijakan akuntansi adalah material jika ketika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang tercakup dalam laporan keuangan entitas, informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum yang dibuat atas dasar laporan keuangan tersebut.

27B. Informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak material adalah tidak material dan tidak perlu diungkapkan. Namun demikian, informasi kebijakan akuntansi dapat menjadi material karena sifat dari transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang terkait, meskipun jumlahnya tidak material. Namun, tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material dengan sendirinya adalah material.

27C. Informasi kebijakan akuntansi diperkirakan menjadi material jika pengguna laporan keuangan entitas akan membutuhkannya untuk memahami informasi material lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Sebagai contoh,

.....
suatu entitas kemungkinan mempertimbangkan informasi kebijakan akuntansi material untuk laporan keuangannya jika informasi tersebut berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material dan:

- (a) entitas mengubah kebijakan akuntansinya selama periode pelaporan dan perubahan ini mengakibatkan perubahan material terhadap informasi dalam laporan keuangan;
- (b) entitas memilih kebijakan akuntansi dari satu atau lebih opsi yang diizinkan oleh SAK Indonesia - situasi tersebut dapat timbul jika entitas memilih untuk mengukur properti investasi pada biaya historis daripada nilai wajar;
- (c) kebijakan akuntansi telah dikembangkan sesuai dengan Pernyataan ini dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku;
- (d) kebijakan akuntansi berkaitan dengan bidang di mana entitas disyaratkan untuk membuat pertimbangan atau asumsi signifikan dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dan entitas mengungkapkan pertimbangan atau asumsi tersebut sesuai dengan paragraf 27G dan 31A; atau
- (e) akuntansi yang disyaratkan untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain tersebut bersifat kompleks dan pengguna laporan keuangan entitas tidak akan memahami transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material tersebut - situasi tersebut dapat timbul jika entitas menerapkan lebih dari satu PSAK atas suatu kelas transaksi material.

27D. Informasi kebijakan akuntansi yang berfokus pada bagaimana entitas telah menerapkan persyaratan dalam SAK Indonesia untuk keadaan entitas itu sendiri menyediakan informasi spesifik entitas yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan daripada informasi terstandarisasi, atau informasi yang hanya menduplikasi atau meringkas persyaratan dalam SAK Indonesia.

27E. Jika entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material, maka informasi tersebut tidak boleh mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

27F. Kesimpulan entitas bahwa informasi kebijakan akuntansi adalah tidak material tidak memengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang diatur dalam PSAK lainnya.

27G. Entitas mengungkapkan, bersama dengan informasi kebijakan akuntansi material atau catatan lainnya, pertimbangan, selain dari pertimbangan yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 31A), yang telah dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas, dan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

27H. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas, manajemen membuat berbagai pertimbangan, selain pertimbangan yang melibatkan estimasi, yang dapat memengaruhi secara signifikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan:

- (a) kapan secara substansial seluruh risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan aset keuangan, dan untuk pesewa, aset yang terkait sewa dialihkan kepada entitas lain;
- (b) apakah, secara substansi, penjualan barang tertentu merupakan pengaturan pendanaan, dan oleh karena itu tidak menghasilkan pendapatan; dan
- (c) apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

27I. Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf 27G disyaratkan oleh SAK Indonesia. Sebagai contoh, PSAK 112: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan pertimbangan yang telah dibuat dalam menentukan apakah entitas mengendalikan entitas lain. PSAK 240: *Properti Investasi* mensyaratkan pengungkapan kriteria yang dikembangkan oleh entitas untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri, dan dari properti yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, ketika klasifikasi properti tersebut sulit dilakukan.

Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi

28. Jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan kini atau periode sebelumnya lalu, akan memiliki dampak tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan:

.....
...

Pengungkapan sumber ketidakpastian estimasi

31A. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuatnya mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode tahun buku berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan mencakup rincian atas:

- (a) sifat; dan**
- (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.**

31B. Penentuan jumlah tercatat dari beberapa aset dan liabilitas mensyaratkan estimasi dampak ketidakpastian peristiwa masa depan terhadap aset dan liabilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Sebagai contoh, dalam hal tidak tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, maka estimasi berorientasi masa depan dibutuhkan untuk mengukur jumlah terpulihkan atas kelas aset tetap, dampak keusangan teknologi atas persediaan, provisi yang bergantung pada hasil masa depan dari proses litigasi yang masih berjalan, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti kewajiban pensiun. Estimasi tersebut melibatkan asumsi tentang unsur seperti penyesuaian risiko atas arus kas atau tingkat diskonto, perubahan gaji di masa depan dan perubahan harga di masa depan yang memengaruhi biaya lain.

31C. Asumsi dan sumber ketidakpastian estimasi lain yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 31A berkaitan dengan estimasi yang mensyaratkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif atau kompleks. Dengan semakin meningkatnya jumlah variabel dan asumsi yang memengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan potensi dilakukannya penyesuaian material konsekuensial terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas biasanya semakin meningkat.

31D. Pengungkapan dalam paragraf 31A tidak disyaratkan untuk aset dan liabilitas dengan risiko signifikan yang jumlah tercatatnya dapat berubah secara material selama periode tahun buku berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas tersebut diukur pada nilai wajar berdasarkan pada harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik. Nilai wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode tahun buku berikutnya, namun perubahan tersebut tidak akan timbul dari asumsi atau sumber lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan.

31E. Entitas menyediakan pengungkapan dalam paragraf 31A dengan cara yang membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat oleh manajemen mengenai masa depan dan mengenai sumber ketidakpastian estimasi lainnya. Sifat dan tingkat informasi yang disediakan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan keadaan lainnya. Contoh jenis pengungkapan yang dibuat oleh entitas adalah:

- (a) sifat dari asumsi atau ketidakpastian estimasi lainnya;
- (b) sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari perhitungan jumlah tercatat tersebut, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut;
- (c) penyelesaian yang diperkirakan atas ketidakpastian, dan rentang hasil yang mungkin terjadi selama periode tahun buku berikutnya atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terdampak; dan
- (d) penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset dan liabilitas tersebut, jika ketidakpastian tetap belum terselesaikan.

31F. Pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi atau prakiraan anggaran dalam membuat pengungkapan di paragraf 31A.

31G. Terkadang tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari suatu asumsi atau sumber ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan. Dalam kasus tersebut, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu, entitas mengungkapkan bahwa mungkin terjadi hasil selama periode tahun buku berikutnya yang berbeda dari asumsi akan membutuhkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terdampak. Dalam seluruh kasus, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset atau liabilitas tertentu (atau kelas aset atau liabilitas) yang terdampak oleh asumsi tersebut.

31H. Pengungkapan dalam paragraf 27G tentang pertimbangan tertentu yang dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi tidak berkaitan dengan pengungkapan sumber ketidakpastian estimasi dalam paragraf 31A.

31I. PSAK lainnya mensyaratkan pengungkapan beberapa asumsi yang disyaratkan sesuai dengan paragraf 31A. Sebagai contoh, PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi* dalam kondisi tertentu mensyaratkan pengungkapan asumsi utama mengenai peristiwa masa depan yang berdampak pada beberapa kelas provisi. PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan (termasuk teknik penilaian dan input) yang digunakan entitas ketika mengukur nilai wajar aset dan liabilitas yang dicatat pada nilai wajar.

ESTIMASI AKUNTANSI

32. Kebijakan akuntansi mungkin mensyaratkan ~~item~~ unsur dalam laporan keuangan untuk diukur dengan cara yang melibatkan ketidakpastian pengukuran—yaitu kebijakan akuntansi mungkin mensyaratkan ~~item~~ unsur tersebut untuk diukur pada jumlah moneter yang tidak dapat diobservasi secara langsung dan sebagai gantinya harus diestimasi. Dalam kasus tersebut, entitas mengembangkan estimasi akuntansi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan akuntansi. Mengembangkan estimasi akuntansi melibatkan penggunaan pertimbangan atau asumsi berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Contoh estimasi akuntansi termasuk:

...

(c) nilai wajar aset atau liabilitas dengan menerapkan PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar*;

...

(e) provisi untuk kewajiban garansi dengan menerapkan PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi*.

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

54J. PSAK 118 mengamendemen paragraf 01, 03, 05, 11 dan 32, menambahkan paragraf 03A, 06A–06N, 27A–27I dan 31A–31I serta judul dan subjudul terkait, menambahkan subjudul diatas paragraf 28 dan menghapus paragraf 02. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada akhir paragraf 54H. Teks baru digarisbawah.

* Pada saat penerbitan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*, definisi material dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dibawa ke dalam PSAK 118.

PSAK 210: PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Paragraf 13 dan 16 diamendemen serta paragraf 23D ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

...

Dividen

...

13. Jika pembagian dividen diumumkan setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan karena tidak ada kewajiban pada saat itu. Dividen tersebut diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~.

KELANGSUNGAN USAHA

...

16. ~~PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*~~ ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ mensyaratkan pengungkapan jika:

- (a) laporan keuangan tidak disusun atas dasar kelangsungan usaha; atau
- (b) manajemen mengetahui adanya ketidakpastian material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Peristiwa atau kondisi yang diungkapkan tersebut mungkin timbul setelah periode pelaporan.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

23D. PSAK 118 mengamendemen paragraf 13 dan 16. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada 'definisi material dalam PSAK 201 paragraf 07' di paragraf 23C. Teks baru digarisbawah.

* Pada saat penerbitan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*, definisi "material" dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dibawa ke dalam PSAK 118.

PSAK 212: PAJAK PENGHASILAN

Paragraf 62A, 77 (serta subjudul terkait), 78 (serta subjudul terkait) dan paragraf 81 diamendemen. Paragraf 98N ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGAKUAN PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN

...

Unsurpøs Yang Diakui Di Luar Laba Rugi

...

62A. SAK Indonesia mensyaratkan atau mengizinkan unsurpøs tertentu dibebankan atau dikreditkan secara langsung ke ekuitas. Contoh unsurpøs tersebut adalah:

- (a) penyesuaian atas saldo laba awal yang dihasilkan dari perubahan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif atau koreksi kesalahan (lihat PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan); dan
- (b) jumlah yang timbul dari pengakuan awal komponen ekuitas suatu instrumen keuangan majemuk (lihat paragraf 23).

...

PENYAJIAN

...

Beban Pajak

Beban (Penghasilan) Pajak Terkait Dengan Unsur Yang Diakui Dalam Laba Rugi Dari Aktivitas Normal

77. Beban (penghasilan) pajak terkait dengan unsur yang diakui dalam laba rugi dari operasi yang dilanjutkan aktivitas normal disajikan dalam kategori pajak penghasilan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

...

Selisih Kurs Atas Aset Dan Atau Liabilitas Dalam Mata Uang Asing Yang Timbul Dari Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan Luar Negeri

78. PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing mensyaratkan selisih kurs tertentu diakui sebagai penghasilan atau beban, namun PSAK tersebut tidak mengatur secara spesifik apakah selisih kurs disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sejalan dengan hal tersebut, Jika selisih kurs atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang timbul dari pajak penghasilan dari penjabaran aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 221, maka selisih tersebut dapat diklasifikasikan dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 67 sebagai beban (penghasilan) pajak tangguhan jika penyajian tersebut dipertimbangkan menjadi paling bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan.

PENGUNGKAPAN

...

81. Berikut ini hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah:

...

- (ab) jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 62 dan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 93PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan);

...

-
- (h) *berkenaan dengan operasi yang dihentikan, beban pajak terkait dengan ~~untuk~~:*
- (i) *keuntungan atau kerugian atas penghentian; dan*
 - (ii) *laba rugi ~~dari aktivitas normal~~ operasi yang dihentikan selama periode, bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode ~~sebelumnya~~ lalu yang disajikan;*

...

TANGGAL EFEKTIF

...

98N. PSAK 118 mengamendemen paragraf 62A, 77 (serta subjudul terkait), 78 (serta subjudul terkait), dan paragraf 81. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: <i>Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan</i> ” di paragraf 98H. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

PSAK 216: ASET TETAP

Paragraf 51 diamendemen. Paragraf 81O ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN

...

Depresiasi

...

Jumlah Terdepresiasi Dan Periode Depresiasi

...

51. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka ~~perbedaan~~ perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

81O. PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan mengamendemen paragraf 51. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 219: IMBALAN KERJA

Paragraf 25, 134, 158 dan 171 diamendemen. Paragraf 180 ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

...

Pengungkapan

25. Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai imbalan kerja jangka pendek, SAK Indonesia mungkin mensyaratkan pengungkapan tersebut. Sebagai contoh, PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi* mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personel manajemen kunci. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja.

...

IMBALAN PASCAKERJA: PROGRAM IMBALAN PASTI

...

Penyajian

...

Komponen Biaya Imbalan Pasti

134. Paragraf 120 mensyaratkan entitas untuk mengakui biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi. Pernyataan ini tidak menentukan bagaimana entitas harus menyajikan biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto. Entitas menyajikan komponen tersebut sesuai dengan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~.

...

IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG LAIN

...

Pengungkapan

158. Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik mengenai imbalan kerja jangka panjang lain, namun SAK Indonesia mungkin mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut. Sebagai contoh, PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi* mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja.

PESANGON

...

Pengungkapan

171. Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik mengenai pesangon, namun SAK Indonesia mungkin mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut. Sebagai contoh, PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi* mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja.

.....

.....
KETENTUAN TRANSISI DAN TANGGAL EFEKTIF

...

180. PSAK 118 mengamendemen paragraf 25, 134, 158 dan 171. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 173. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 175. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118 diterbitkan, judul PSAK 208 diubah.

PSAK 220: AKUNTANSI HIBAH PEMERINTAH DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN PEMERINTAH

Paragraf 16, 29 dan 32 diamendemen dan paragraf 49 ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

HIBAH PEMERINTAH

...

16. Hal yang sangat mendasar atas pendekatan penghasilan adalah hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Pengakuan hibah pemerintah dalam laba rugi atas dasar penerimaan tidak sesuai dengan asumsi akrual (lihat PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~) dan hanya dapat diterima jika tidak terdapat dasar lain untuk mengalokasikan hibah kepada periode selain periode hibah diterima.

...

Penyajian Hibah Terkait Dengan Penghasilan

29. Hibah terkait dengan penghasilan diklasifikasikan dan disajikan dalam laporan laba rugi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan. ~~disajikan sebagai bagian dari laba rugi~~, Hibah tersebut dimasukkan ke dalam pos laba rugi, baik sebagai penghasilan atau secara terpisah atau dalam pos umum seperti “penghasilan lain”; atau alternatif lain, sebagai pengurang dalam pelaporan beban terkait.

...

Pembayaran Kembali Hibah Pemerintah

32. ~~Hibah pemerintah yang ternyata dibayar kembali diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi (lihat PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan)~~. ~~Pembayaran kembali atas hibah terkait dengan penghasilan diperhitungkan terlebih dahulu terhadap setiap saldo kredit ditangguhkan yang belum diamortisasi terkait dengan hibah tersebut. Jika pembayaran kembali melebihi saldo kredit ditangguhkan, atau tidak ada lagi saldo kredit ditangguhkan, maka pembayaran kembali diakui segera dalam laba rugi. Pembayaran kembali atas hibah terkait dengan aset diakui dengan meningkatkan jumlah tercatat aset atau mengurangi saldo penghasilan tangguhan sebesar jumlah yang dibayar kembali. Akumulasi depresiasi tambahan yang seharusnya diakui dalam laba rugi seandainya hibah tidak ada, diakui segera dalam laba rugi.~~

TANGGAL EFEKTIF

...

49. PSAK 118 mengamendemen paragraf 16, 29, dan 32. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 221: PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

Paragraf 48 diamendemen dan paragraf 60N ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGGUNAAN MATA UANG PENYAJIAN SELAIN MATA UANG FUNGSIONAL

...

Pelepasan Atau Pelepasan Sebagian Kegiatan Usaha Luar Negeri

48. Dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah, direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri diakui (lihat PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~).

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

60N. PSAK 118 mengamendemen paragraf 48. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 224: PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Paragraf 20 diamendemen dan paragraf 28D ditambahkan. Teks baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

PENGUNGKAPAN

Seluruh Entitas

...

20. Klasifikasi jumlah yang terutang dari, dan tagihan kepada, pihak-pihak berelasi dalam berbagai kategori seperti yang disyaratkan di paragraf 19 merupakan perluasan dari persyaratan pengungkapan dalam PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ untuk informasi baik yang akan disajikan ~~baik~~ dalam laporan posisi keuangan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kategori tersebut diperluas untuk menyediakan analisis yang lebih komprehensif atas saldo dari pihak berelasi dan berlaku untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

28D. PSAK 118 mengamendemen paragraf 20. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 226: AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA

Catatan kaki ditambahkan pada akhir paragraf 38. Teks baru digarisbawah.

- * Pada saat penerbitan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*, persyaratan untuk mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dibawa ke dalam PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Draf EKSPOSUR

PSAK 227: LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 18J. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

PSAK 228: INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Paragraf 10 diamendemen dan paragraf 45L ditambahkan. Teks baru digarisbawahi, dan teks yang dihapus dicoret.

METODE EKUITAS

10. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian investor atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi investor. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain *investee*. Perubahan tersebut termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain investor (lihat PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~).

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

45L. PSAK 118 mengamendemen paragraf 10. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 45B. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

PSAK 229: PELAPORAN KEUANGAN DALAM EKONOMI HIPERINFLASI

Paragraf 08 dan 25 diamendemen dan paragraf 42 ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

...

08. *Laporan keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang ekonomi hiperinflasi, baik berdasarkan pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini, disajikan dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Angka-angka terkait untuk periode sebelumnya ~~lalu~~ yang disyaratkan oleh PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ dan setiap informasi dalam periode sebelumnya ~~lalu~~ juga disajikan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Untuk tujuan penyajian jumlah komparatif dalam mata uang penyajian yang berbeda, diterapkan PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing paragraf 42(b) dan 43.*

...

Laporan Keuangan Biaya Historis

Laporan Posisi Keuangan

...

25. Pada akhir periode pertama dan dalam periode selanjutnya, seluruh komponen ekuitas pemilik disajikan kembali dengan menerapkan indeks harga umum sejak awal periode atau tanggal kontribusi jika lebih belakangan. Perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode diungkapkan sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

42. PSAK 118 mengamendemen paragraf 08 dan 25. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 232: INSTRUMEN KEUANGAN: PRESENTASI

Paragraf 34, 39-41 dan PP29 diamendemen, dan paragraf 97U ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENYAJIAN

...

Saham Tresuri (Lihat Juga Paragraf PP36)

...

34. Nilai saham tresuri yang dimiliki ~~disajikan diungkapkan~~ secara terpisah, dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~. Entitas ~~mengungkapkan~~ menyediakan pengungkapan sesuai dengan PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi* jika saham tresuri diperoleh dari pihak-pihak berelasi.

Bunga, Dividen, Kerugian, Dan Keuntungan (Lihat Juga Paragraf PP37)

...

39. Jumlah biaya transaksi yang dicatat sebagai pengurang ekuitas dalam periode disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan secara terpisah sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~.

40. Dividen yang diklasifikasikan sebagai beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan baik bersama dengan bunga atas liabilitas lain atau ~~disajikan~~ sebagai pos unsur terpisah. Sebagai tambahan dari ketentuan dalam Pernyataan ini, penyajian dan pengungkapan beban bunga dan dividen tunduk pada ketentuan dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Dalam beberapa keadaan, karena terdapat perbedaan antara beban bunga dan dividen yang terkait dengan hal-hal seperti pengurangan pajak, entitas dapat menentukan bahwa entitas akan menyajikan beban bunga secara terpisah dari beban dividen dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka akan lebih baik jika keduanya diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengungkapan dampak pajak dilakukan sesuai dengan PSAK 212: *Pajak Penghasilan*.

41. Keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai tercatat liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi meskipun keduanya berkaitan dengan instrumen yang mengandung hak residual atas aset entitas dalam pertukaran dengan kas atau aset keuangan lain (lihat paragraf 18(b)). Sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~, entitas menyajikan keuntungan atau kerugian akibat pengukuran kembali instrumen keuangan tersebut secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna atas penghasilan dan beban entitas jika pemisahan tersebut dianggap relevan untuk menjelaskan kinerja entitas tersebut.

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

97U. PSAK 118 mengamendemen paragraf 34, 39-41, dan PP29. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

...

.....

LAMPIRAN
PEDOMAN PENERAPAN
PSAK 232: INSTRUMEN KEUANGAN: PENYAJIAN

...

PENYAJIAN

Liabilitas Dan Ekuitas (Paragraf 15–27)

...

Perlakuan Dalam Laporan Keuangan Konsolidasian

PP29. Dalam laporan keuangan konsolidasian, entitas menyajikan kepentingan nonpengendali – yaitu hak pihak lain dalam ekuitas dan pendapatan entitas anak – sesuai dengan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ dan PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*. Dalam pengklasifikasian instrumen keuangan (atau komponen instrumen keuangan) dalam laporan keuangan konsolidasian, entitas mempertimbangkan seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati antara seluruh anggota kelompok usaha dan pemegang instrumen dalam menentukan apakah kelompok usaha tersebut secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah kas atau aset keuangan lain terkait dengan instrumen tersebut, atau menyelesaikannya dengan cara yang mengakibatkan timbulnya klasifikasi liabilitas. Jika entitas anak dari suatu kelompok usaha menerbitkan instrumen keuangan dan entitas induk atau entitas anggota lain dalam kelompok usaha membuat perjanjian tambahan langsung dengan pemegang instrumen (contohnya berupa penjaminan), maka kelompok usaha tersebut tidak lagi memiliki kebebasan dalam melakukan distribusi atau penebusan instrumen tersebut. Walaupun entitas anak dapat secara memadai mengklasifikasikan instrumen tersebut dalam laporan keuangannya dengan mengabaikan adanya persyaratan tambahan tersebut, namun dampak dari perjanjian lain antara anggota kelompok usaha dengan pemegang instrumen tetap disajikan untuk menjamin bahwa laporan keuangan konsolidasian telah mencerminkan kontrak tersebut dan transaksi yang disepakati oleh kelompok usaha secara keseluruhan. Sepanjang terdapat kewajiban atau ketentuan penyelesaian tersebut pada suatu instrumen, maka instrumen tersebut (atau komponennya yang menjadi subjek dari kewajiban dimaksud) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 233: LABA PER SAHAM

Paragraf 04A, 13, dan 67A-68A diamendemen, paragraf 73-73A dihapus, dan paragraf 73B-73C serta 74F ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

RUANG LINGKUP

...

04A. Jika entitas menyajikan ~~pes unsur~~ laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah dari laporan penyajian penghasilan komprehensif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 12(b) PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 10A, maka entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi ~~tersendiri~~ tersebut.

...

PENGUKURAN

Laba Per Saham Dasar

...

Laba

...

13. Seluruh ~~pes unsur~~ penghasilan dan beban yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yang diakui dalam satu periode, termasuk beban pajak dan dividen saham preferen yang diklasifikasikan sebagai liabilitas diperhitungkan dalam penentuan laba atau rugi periode ~~berjalan kini~~ yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (lihat PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan).

...

PENYAJIAN

...

67A. Jika entitas menyajikan ~~pes unsur~~ laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah dari laporan penyajian penghasilan komprehensif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 12(b) PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 10A, maka entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian, sesuai dengan paragraf 66 dan 67, dalam laporan laba rugi ~~tersendiri~~ tersebut.

68. Entitas yang melaporkan operasi yang dihentikan menyajikan mengungkapkan laba per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

68A. Jika entitas menyajikan ~~pes unsur~~ laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah dari laporan penyajian penghasilan komprehensif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 12(b) PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 10A, maka entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan, sesuai dengan paragraf 68, dalam laporan laba rugi ~~tersendiri~~ tersebut atau mengungkapkan informasi tersebut dalam ~~pada~~ catatan atas laporan keuangan.

...

PENGUNGKAPAN

...

~~73. [Dikosongkan] Jika entitas mengungkapkan, sebagai tambahan pengungkapan atas laba per saham dasar dan dilusian, jumlah per saham dengan menggunakan komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dilaporkan selain yang diatur dalam Pernyataan ini, maka jumlah tersebut dihitung menggunakan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang ditentukan berdasarkan Pernyataan ini. Jumlah per saham dasar atau dilusian yang terkait dengan komponen tersebut diungkapkan dengan derajat ketersediaan yang setara dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas menyatakan dasar penentuan pembilang, termasuk apakah jumlah per saham tersebut merupakan jumlah sebelum atau setelah pajak. Jika suatu komponen dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang digunakan tidak dilaporkan sebagai pos tertentu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka rekonsiliasi dilakukan antara komponen yang digunakan dan pos tertentu yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.~~

~~73A. [Dikosongkan] Paragraf 73 berlaku juga bagi entitas yang mengungkapkan, sebagai tambahan pengungkapan atas laba per saham dasar dan dilusian, jumlah per saham dengan menggunakan pos yang dilaporkan dalam laba rugi, selain yang disyaratkan oleh Pernyataan ini.~~

73B. Selain menyajikan laba per saham dasar dan dilusian yang disyaratkan oleh Pernyataan ini, entitas diperkenankan untuk mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah per saham tambahan dengan menggunakan ukuran kinerja sebagai pembilang yang berbeda dari yang disyaratkan dalam paragraf 12-18 dan 33-35. Namun, pembilang tersebut merupakan jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa dari entitas induk yakni:

- (a) total atau subtotal dalam PSAK 118 paragraf 69, 86 dan 118; atau
- (b) ukuran kinerja tetapan manajemen sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 118 paragraf 117.

73C. Jika, dengan menerapkan paragraf 73B, entitas mengungkapkan jumlah per saham tambahan, maka entitas:

- (a) mengungkapkan jumlah per saham dasar dan dilusian tambahan dengan prominensi yang sama.
- (b) menghitung jumlah per saham tambahan dengan menggunakan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang ditentukan sesuai dengan Pernyataan ini.
- (c) mengungkapkan jumlah per saham tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi tersebut tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan utama.
- (d) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK 118 paragraf 121-125 untuk pembilang yang merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen.

TANGGAL EFEKTIF

...

74F. PSAK 118 mengamendemen paragraf 04A, 13, dan 67A-68A, menambahkan paragraf 73B-73C, dan menghapus paragraf 73-73A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 234: LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Paragraf 04-05, 07-10, 11A-12, 20 dan 24 diamendemen dan paragraf 16A(m) dan 61 ditambahkan. Teks baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Definisi

04. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

...

Laporan^{} keuangan (financial report) interim merupakan laporan keuangan (financial report) yang berisi laporan keuangan (financial statements) lengkap (seperti yang dideskripsikan di PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~) atau laporan keuangan (financial statements) ringkas (seperti yang dideskripsikan di Pernyataan ini) untuk suatu periode interim.*

ISI LAPORAN KEUANGAN INTERIM

05. PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ menetapkan laporan keuangan (*financial statements*) lengkap meliputi:

- (a) laporan kinerja keuangan untuk periode pelaporan ~~laporan posisi keuangan pada akhir periode;~~
- (b) laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan ~~laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;~~
- (c) laporan perubahan ekuitas selama periode pelaporan;
- (d) laporan arus kas selama periode pelaporan;
- (e) catatan atas laporan keuangan selama periode pelaporan, ~~informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lain;~~
- (ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam PSAK 118 paragraf 31-32 ~~PSAK 201 paragraf 38 dan 38A~~; dan
- (f) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya jika disyaratkan oleh PSAK 118 paragraf 37 ~~ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 201 paragraf 40A-40D.~~

Entitas dapat menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam Pernyataan ini. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan judul “neraca”, daripada “laporan posisi keuangan”. ~~Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan judul “laporan penghasilan komprehensif”, daripada “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain”.~~

...

07. Tidak satu pun dalam Pernyataan ini yang dimaksudkan untuk melarang atau menghalangi entitas dalam menerbitkan laporan keuangan lengkap (seperti yang dideskripsikan di PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~) dalam laporan keuangan interimnya daripada menyediakan laporan keuangan ringkas dan catatan penjelasan tertentu. Pernyataan ini juga tidak melarang atau menghalangi entitas untuk memasukkan pos dalam laporan keuangan ringkas atau catatan penjelasan tertentu yang lebih banyak daripada jumlah pos minimum yang telah dijelaskan dalam Pernyataan ini. Panduan pengakuan dan pengukuran dalam Pernyataan ini juga diterapkan pada laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim dan laporan keuangan tersebut akan meliputi seluruh pengungkapan yang disyaratkan oleh Pernyataan ini (terutama pengungkapan tertentu di paragraf 16A) sebagaimana disyaratkan oleh PSAK ~~SAK Indonesia~~ lain.

Komponen Minimum Laporan Keuangan Interim

08. *Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen berikut:*

- (a) laporan kinerja keuangan ~~posisi keuangan~~ ringkas;

.....

- (b) ~~laporan posisi keuangan ringkas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah;~~
- (c) ~~laporan perubahan ekuitas ringkas;~~
- (d) ~~laporan arus kas ringkas; dan~~
- (e) ~~catatan penjelasan tertentu.~~

08A. ~~Jika entitas menyajikan pos-pos unsur laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah dari laporan penyajian penghasilan komprehensif sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 12b PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 10A, maka entitas menyajikan informasi interim ringkas dari laporan laba rugi terpisah-tersebut.~~

Format Dan Isi Laporan Keuangan Interim

09. ~~Jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dan isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan.~~

10. ~~Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup, minimum, setiap judul dan subjumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh Pernyataan ini. Dalam menyusun laporan keuangan ringkas, entitas menerapkan Pernyataan ini dan juga persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 41-45 dan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan paragraf 6A-6N. Pos atau catatan tambahan termasuk dalam laporan keuangan tersebut jika kelalaian untuk mencantulkannya akan menyebabkan laporan keuangan ringkas menjadi menyesatkan.~~

...

11A. ~~Jika entitas menyajikan pos-pos unsur laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah dari laporan penyajian penghasilan komprehensif sebagaimana dideskripsikan di PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan paragraf 12(b) PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 10A, maka entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian dalam laporan laba rugi terpisah-tersebut.~~

12. ~~PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ memberikan panduan tentang struktur laporan keuangan. ~~Contoh Ilustrasi yang melengkapi PSAK 118 Pedoman Implementasi PSAK 201~~ mengilustrasikan cara penyajian laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas.

...

Pengungkapan Lain

16A. ~~Sebagai tambahan atas pengungkapan peristiwa dan transaksi yang signifikan sesuai dengan paragraf 15-15C, entitas mengikutsertakan informasi berikut, dalam catatan atas laporan keuangan interim, atau di bagian mana pun dalam laporan keuangan interim. Pengungkapan berikut diberikan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim pada beberapa laporan lainnya (seperti komentar manajemen atau laporan risiko) yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan dengan persyaratan yang sama seperti laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses atas informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan yang sama dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim tersebut tidak lengkap. Informasi tersebut umumnya dilaporkan secara kumulatif dari awal tahun buku sampai tanggal pelaporan:~~

...

(m) ~~pengungkapan mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen yang disyaratkan dalam PSAK 118 paragraf 121-125.~~

...

Periode Laporan Keuangan Interim Yang Disyaratkan Untuk Disajikan

20. ~~Laporan keuangan interim mencakup laporan keuangan (ringkas atau lengkap) untuk periode-periode sebagai berikut:~~

.....

...

- (b) ~~laporan kinerja keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode interim berjalan kini dan secara kumulatif untuk tahun buku berjalan kini sampai tanggal interim, dengan laporan kinerja keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain komparatif untuk periode interim yang dapat dibandingkan (periode berjalan kini dan awal tahun buku sampai tanggal pelaporan) dari tahun buku terdekat sebelumnya. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan, laporan interim dapat menyajikan untuk setiap periode laporan kinerja keuangan untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain baik digabung maupun dipisah.~~

...

Materialitas

...

24. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* mendefinisikan informasi material dan mensyaratkan pengungkapan terpisah atas ~~pos-pos unsur~~ yang material, termasuk (sebagai contoh) operasi yang dihentikan, serta PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* mensyaratkan pengungkapan atas perubahan estimasi akuntansi, kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi. Kedua PSAK tersebut tidak memberikan panduan kuantitatif atas materialitas.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

61. PSAK 118 mengamendemen paragraf 04–05, 07–10, 11A–12, 20 dan 24, serta menambahkan paragraf 16A(m). Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118. Dalam laporan keuangan interim tahun pertama penerapan PSAK 118, entitas menerapkan PSAK 118 Lampiran C paragraf C04–C06.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 56 dan 58. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Catatan kaki ditambahkan pada akhir paragraf 59. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118 diterbitkan, definisi “material” dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dibawa ke dalam PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada akhir paragraf 60. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118 diterbitkan, persyaratan untuk mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material dalam PSAK 201 dibawa ke dalam PSAK 118.

PSAK 237: PROVISI, LIABILITAS KONTINJENSI DAN ASET KONTINJENSI

Catatan kaki ditambahkan pada akhir paragraf 104. Teks baru digarisbawah.

* Pada saat penerbitan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*, definisi “material” dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dibawa ke dalam PSAK 118.

PSAK 238: ASET TAKBERWUJUD

Paragraf 102 diamendemen dan paragraf 130N ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

ASET TAKBERWUJUD DENGAN UMUR MANFAAT TERBATAS

...

Nilai residu

...

102. Estimasi nilai residu aset takberwujud didasarkan pada jumlah terpulihkan dari pelepasan dengan menggunakan harga yang berlaku pada tanggal estimasi penjualan untuk aset takberwujud serupa yang telah mencapai akhir umur manfaatnya dan telah beroperasi sesuai dengan kondisi serupa dengan aset takberwujud yang akan digunakan. Nilai residu ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku laporan keuangan. Perubahan nilai residu aset diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

130N. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 102. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 240: PROPERTI INVESTASI

Paragraf 31 diamendemen dan paragraf 85I ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN

Accounting Policy

...

31. PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan~~ menetapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela dilakukan hanya jika perubahan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lain terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Adalah hal yang sangat tidak mungkin bahwa perubahan dari model nilai wajar ke model biaya akan menghasilkan penyajian yang lebih relevan.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

85I. PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan mengamendemen paragraf 31. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

PSAK 241: AGRIKULTUR

Paragraf 50 dan 53 diamendemen dan paragraf 66 ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PENGUNGKAPAN

Umum

...

50. Entitas mengungkapkan ~~menyajikan~~ rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode ~~berjalan~~ kini. Rekonsiliasi tersebut mencakup:

...

53. Aktivitas agrikultur sering terekspos oleh iklim, penyakit, dan risiko alam lain. Jika suatu peristiwa terjadi sehingga menimbulkan suatu ~~pos~~ unsur pendapatan penghasilan atau beban yang material, maka sifat dan jumlah ~~pendapatan~~ unsur penghasilan dan beban tersebut diungkapkan sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~. Contoh dari peristiwa tersebut termasuk wabah penyakit mematikan, banjir, kekeringan atau pembekuan yang parah, dan wabah serangga.

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

66. PSAK 118 mengamendemen paragraf 50 dan 53. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” di paragraf 59. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

ISAK 101: PERUBAHAN ATAS LIABILITAS AKTIVITAS PURNAOPERASI, RESTORASI, DAN LIABILITAS SERUPA

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 201 dan PSAK 208 diamendemen. Paragraf 06 dan 08 diamendemen dan paragraf 09C ditambahkan. Teks baru digarisbawah, dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 116: *Sewa*
- PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
- PSAK 216: *Aset Tetap*
- PSAK 223: *Biaya Pinjaman*
- PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset*
- PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*

...

INTERPRETASI

...

06. Jika aset terkait diukur menggunakan model revaluasi:

...

- (d) PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ mensyaratkan unsur penghasilan komprehensif lain untuk disajikan sebagai pos dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif ~~pengungkapan dalam laporan laba rugi komprehensif atas setiap komponen penghasilan dan beban komprehensif lain~~. Untuk memenuhi persyaratan ini, perubahan surplus revaluasi yang timbul dari perubahan liabilitas diidentifikasi dan disajikan demikian ~~diungkapkan secara terpisah~~.

...

08. Penghitungan diskonto (*unwinding of the discount*) secara periodik diakui dalam laba rugi sebagai beban bunga dari liabilitas selain yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana biaya keuangan pada saat terjadinya dan diklasifikasikan - dengan menerapkan PSAK 118 paragraf 61 - dalam kategori pendanaan pada laporan laba rugi. Perlakuan kapitalisasi yang diatur dalam PSAK 223: *Biaya Pinjaman* tidak diizinkan.

TANGGAL EFEKTIF

...

09C. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 06 dan 08. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

...

Catatan kaki diamendemen pada akhir paragraf 10. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118 diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

.....

ISAK 112: *PERJANJIAN KONSESI JASA*

Di bawah judul “Referensi”, referensi ke PSAK 208 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan¹
- PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*
- PSAK 109: *Instrumen Keuangan*
- PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*
- PSAK 116: *Sewa*
- PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
- PSAK 216: *Aset Tetap*
- PSAK 220: *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*
- PSAK 223: *Biaya Pinjaman*
- PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian*
- PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset*
- PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*
- PSAK 238: *Aset Takberwujud*
- ISAK 229: *Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan*

**ISAK 114: PSAK 219 - BATAS ATAS ASET IMBALAN PASTI, PERSYARATAN
PENDANAAN MINIMUM, DAN INTERAKSINYA**

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 201 dan PSAK 208 diamendemen. Paragraf 10 diamendemen, dan paragraf 27D ditambah. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~
- PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan~~
- PSAK 219: *Imbalan Kerja*
- PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*

...

INTERPRETASI

Ketersediaan Pengembalian Dana Atau Pengurangan Iuran Masa Depan

...

10. Sesuai dengan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~, entitas mengungkapkan informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan yang mengandung risiko signifikan penyebab timbulnya penyesuaian material atas jumlah tercatat aset neto atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Hal ini dapat mencakup pengungkapan tentang setiap pembatasan tingkat realisasi kini dari surplus atau pengungkapan tentang dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah manfaat ekonomik yang tersedia.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

27D. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 10. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

ISAK 116: LINDUNG NILAI INVESTASI NETO DALAM KEGIATAN USAHA LUAR NEGERI

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 208 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 109: *Instrumen Keuangan*
- PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan~~
- PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*

Draf EKSPOSUR

ISAK 117: *DISTRIBUSI ASET NONKAS KEPADA PEMILIK*

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 201 diamendemen. Paragraf 2 diamendemen, dan paragraf 21 ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 103: *Kombinasi Bisnis*
- PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*
- PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*
- PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*
- PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar*
- PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*
- ...

LATAR BELAKANG

...

02. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas mengukur distribusi kepada pemilik (umumnya sebagai dividen). PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ mensyaratkan entitas untuk menyajikan secara rinci pengakuan dividen sebagai distribusi kepada pemilik baik dalam laporan perubahan ekuitas atau mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

21. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 02. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki 'pemilik' di paragraf 01 dihapus. Teks yang dihapus dicoret.

* ~~PSAK 201 paragraf 07 menjelaskan pemilik sebagai pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.~~

ISAK 119: PENGAKHIRAN LIABILITAS KEUANGAN DENGAN INSTRUMEN EKUITAS

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 201 dan PSAK 208 diamendemen. Paragraf 11 diamendemen dan paragraf 18 ditambahkan. Teks baru digarisbawah, dan teks yang dihapus dicoret.

REFERENSI

- Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- PSAK 102: *Pembayaran Berbasis Saham*
- PSAK 103: *Kombinasi Bisnis*
- PSAK 109: *Instrumen Keuangan*
- PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar*
- PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
- PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian*

...

INTERPRETASI

...

11. Entitas ~~menyajikan mengungkapkan~~ keuntungan atau kerugian yang diakui sesuai dengan paragraf 09 dan 10 sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi atau mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan.

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

18. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 11. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

**ISAK 120: BIAYA PENGUPASAN LAPISAN TANAH DALAM TAHAP PRODUKSI
PADA TAMBANG TERBUKA**

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 201 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan¹
- PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 202: *Persediaan*
- PSAK 216: *Aset Tetap*
- PSAK 238: *Aset Takberwujud*

ISAK 121: *PUNGUTAN*

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 201 dan PSAK 208 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

REFERENSI

- PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan* ~~*Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*~~
- PSAK 212: *Pajak Penghasilan*
- PSAK 220: *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*
- PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*
- PSAK 234: *Laporan Keuangan Interim*
- PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*
- Dikosongkan

Catatan kaki ditambahkan pada 'PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*' di paragraf A02. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

ISAK 122: TRANSAKSI VALUTA ASING DAN IMBALAN DI MUKA

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 208 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

REFERENSI

- *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*¹
- PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan~~
- PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*

Catatan kaki ditambahkan pada 'PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*' di paragraf A02. Teks baru digarisbawah.

- * Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

ISAK 123: *KETIDAKPASTIAN DALAM PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN*

Di bawah judul 'Referensi', referensi ke PSAK 201 dan PSAK 208 diamendemen. Paragraf 14 dan A04 diamendemen dan paragraf B01A ditambahkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
- PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*
- PSAK 212: *Pajak Penghasilan*

...

INTERPRETASI

...

Perubahan Fakta Dan Keadaan

...

14. Entitas merefleksikan dampak dari perubahan dalam fakta dan keadaan atau dari informasi baru sebagai perubahan estimasi akuntansi dengan menerapkan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Entitas menerapkan PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* untuk menentukan apakah perubahan yang terjadi setelah periode pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian atau nonpenyesuaian.

LAMPIRAN A

PEDOMAN PENERAPAN

PENGUNGKAPAN

A04. Ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan, entitas menentukan apakah akan mengungkapkan:

- (a) pertimbangan yang dibuat dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak dengan menerapkan PSAK 208 paragraf 27G ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 122~~; dan
- (b) informasi mengenai asumsi dan estimasi yang dibuat dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak dengan menerapkan PSAK 208 paragraf 31A-31E ~~PSAK 201 paragraf 125-129~~.

...

LAMPIRAN B

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

TANGGAL EFEKTIF

...

B01A. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 14 dan A04. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

**ISAK 210: BANTUAN PEMERINTAH - TIDAK BERELASI SPESIFIK DENGAN
AKTIVITAS OPERASI**

Di bawah judul "Referensi", referensi ke PSAK 208 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan~~
- PSAK 220: *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*

**ISAK 225: PAJAK PENGHASILAN - PERUBAHAN DALAM STATUS PAJAK
ENTITAS ATAU PARA PEMEGANG SAHAMNYA**

Di bawah judul “Referensi”, referensi ke PSAK 201 dan PSAK 208 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
- PSAK 212: *Pajak Penghasilan*

Draf EKSPOSUR

ISAK 229: PERJANJIAN KONSESI JASA: PENGUNGKAPAN

Di bawah judul “Referensi”, referensi ke PSAK 201 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 116: *Sewa*
- PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 216: *Aset Tetap*
- PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*
- PSAK 238: *Aset Takberwujud*
- ISAK 112: *Perjanjian Konsesi Jasa*

ISAK 232: ASET TAKBERWUJUD - BIAYA SITUS WEB

Dibawah judul “Referensi”, referensi ke PSAK 201 diamendemen. Paragraf 05 diamendemen. Paragraf tanpa nomor ditambahkan setelah paragraf terakhir di bawah judul “Tanggal efektif”. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 103: *Kombinasi Bisnis*
- PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*
- PSAK 116: *Sewa*
- PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~
- PSAK 202: *Persediaan*
- PSAK 216: *Aset Tetap*
- PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset*
- PSAK 238: *Aset Takberwujud*

...

Permasalahan

...

05. Interpretasi ini tidak berlaku untuk pengeluaran pembelian, pengembangan, dan pengoperasian perangkat keras (contohnya server web, server *staging*, server produksi dan koneksi internet) dari situs web. Pengeluaran tersebut diperlakukan sesuai dengan PSAK 216: *Aset Tetap*. Selain itu, jika entitas melakukan pengeluaran untuk penyedia jasa *internet hosting* situs web entitas, maka pengeluaran tersebut diakui sebagai beban ketika jasa diterima sesuai dengan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* paragraf 46 ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ paragraf 88 dan *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*.

...

Tanggal Efektif

...

15. *Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK Indonesia* mengamendemen paragraf 05. Entitas menerapkan amendemen untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan jika pada saat yang sama entitas juga menerapkan seluruh amendemen lain yang dibuat oleh *Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK Indonesia*. Entitas menerapkan amendemen ISAK 232 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Namun, jika entitas menentukan bahwa penerapan retrospektif akan menjadi tidak praktis atau akan melibatkan biaya atau usaha yang berlebihan, entitas menerapkan amendemen ISAK 232 dengan mengacu pada PSAK 208 paragraf 23–28, 50–53 dan 54F.

16. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 05. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 118.

Catatan kaki ditambahkan pada “PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” di paragraf 15. Teks baru digarisbawah.

* Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diganti menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

**ISAK 331: INTERPRETASI ATAS RUANG LINGKUP PSAK 240: PROPERTI
INVESTASI**

Catatan kaki ditambahkan pada “IFRS” di paragraf DK03, DK11, DK14, DK16 dan DK20. Teks baru digarisbawah.

- * Dengan dibentuknya *International Sustainability Standards Board (ISSB)*, *IFRS Standards* didefinisikan dalam *IFRS Foundation Constitution* sebagai *IFRS Accounting Standards* dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards*. *IFRS 18 Lampiran A* termasuk definisi *IFRS Accounting Standards*, yang menggantikan definisi “*International Financial Reporting Standards*” dalam IAS 1, yang sebelumnya dikenal sebagai IFRS, IFRSs dan *IFRS Standards*.

**ISAK 332: DEFINISI DAN HIERARKI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
INDONESIA**

Dibawah judul “Referensi”, referensi ke PSAK 201 diamendemen dan referensi ke PSAK 208 diamendemen serta ditambahkan catatan kaki. Paragraf 01, 02, 03, 04, 08, 11 diamendemen, serta ditambahkan catatan kaki di paragraf 01. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~
- PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan¹ Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

01. PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 6B² 46~~ menyatakan bahwa entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK Indonesia membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK Indonesia dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK Indonesia kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK Indonesia.

02. PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Lampiran A ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 07~~ dan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 05 mendefinisikan SAK Indonesia sebagai Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

03. Definisi SAK Indonesia di dalam PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ dan PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan mengacu pada definisi IFRS Accounting Standards³ IFRS di dalam IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements ~~IAS 1 Presentation of Financial Statements~~ dan IAS 8 Basis of Preparing of Financial Statements Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, dengan menambahkan antara lain anak kalimat “serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya”. Anak kalimat tersebut ditambahkan dengan pertimbangan untuk mendorong sinkronisasi dan harmonisasi peraturan regulator pasar modal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

04. PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 07 dan 10–12 memberikan pengaturan tentang hierarki SAK Indonesia. PSAK 208 paragraf 07 menyatakan bahwa ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. PSAK 208 paragraf 10-12 menjelaskan bahwa dalam hal tidak ada PSAK yang spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal dengan mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut ini dengan urutan menurun yaitu:
a) ...

¹ Ketika PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

² Ketika PSAK 118 diterbitkan, persyaratan dalam PSAK 201 Penyajian Laporan Keuangan ini dibawa ke dalam PSAK 208.

08. PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 07 mensyaratkan entitas untuk menerapkan perlakuan akuntansi dalam suatu PSAK, sepanjang PSAK tersebut mengatur secara spesifik perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa atau kondisi. PSAK yang dimaksudkan dalam paragraf tersebut merujuk pada PSAK dan ISAK. Hal ini sesuai dengan pembahasan dalam Dasar Kesimpulan IAS 8 paragraf BC15, yang menjadi rujukan PSAK 208, yang menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan hierarki, Interpretasi memiliki status yang sejajar dengan Pernyataan.

11. PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 07 dan 10–11 mengatur hierarki PSAK, ISAK, dan peraturan regulator pasar modal. Ketentuan dalam paragraf tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa peraturan regulator pasar modal tidak bertentangan dengan PSAK atau ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Indonesia dan yang menyatakan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK Indonesia, menerapkan PSAK atau ISAK yang spesifik tersebut meskipun terdapat peraturan regulator pasar modal yang bertentangan dengan PSAK atau ISAK tersebut.

DASAR KESIMPULAN

Paragraf DK02 diamendemen. Catatan kaki ditambahkan pada “IFRS”, judul “*Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*” dan “*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*” di paragraf DK02. Teks baru digarisbawah.

DK02. Konvergensi SAK Indonesia ke IFRS³ mengakibatkan revisi atas sebagian besar PSAK atau ISAK agar sesuai dengan IFRS dan pencabutan beberapa PSAK atau ISAK berbasis industri. Pada tahun 2009, PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan (sekarang PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan)* dan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*⁴ juga direvisi agar sesuai dengan IAS 1 *Presentation of Financial Statements (sekarang IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements)* dan IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*⁵. Definisi SAK Indonesia dalam PSAK 201 dan PSAK 208 mencakup tambahan anak kalimat “peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya” untuk mendorong sinkronisasi dan harmonisasi peraturan regulator pasar modal dengan PSAK atau ISAK, sedangkan hierarki SAK Indonesia dalam PSAK 208 merujuk pada hierarki IFRS dalam IAS 8. Namun demikian, DSAK IAI mencermati kemungkinan bahwa, dengan pertimbangan tertentu, peraturan regulator pasar modal dapat mengatur suatu perlakuan akuntansi tertentu yang berbeda dengan perlakuan akuntansi yang ada dalam suatu PSAK atau ISAK.

³ Dengan dibentuknya *International Sustainability Standards Board (ISSB)*, *IFRS Standards* didefinisikan dalam *IFRS Foundation Constitution* sebagai *IFRS Accounting Standards* dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards*. IFRS 18 Lampiran A termasuk definisi *IFRS Accounting Standards*, yang menggantikan definisi “*International Financial Reporting Standards*” dalam IAS 1, yang sebelumnya dikenal sebagai IFRS, IFRSs dan *IFRS Standards*.

⁴ Pada saat PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

⁵ Pada saat IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* diterbitkan, judul IAS 8 diubah menjadi *Basis of Preparation of Financial Statements*.

ISAK 336: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 216: Aset Tetap dan PSAK 116: Sewa

Dibawah judul “Referensi”, referensi ke PSAK 208 diamendemen dan ditambahkan catatan kaki. Paragraf 11 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Referensi

- PSAK 216: *Aset Tetap*
- PSAK 116: *Sewa*
- PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*
- PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan¹ Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*

11. Entitas menerapkan Interpretasi ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*

¹ Ketika PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

DASAR KESIMPULAN

Catatan kaki ditambahkan pada “IFRS” di paragraf DK01. Teks baru digarisbawah.

- * Dengan dibentuknya *International Sustainability Standards Board (ISSB)*, *IFRS Standards* didefinisikan dalam *IFRS Foundation Constitution* sebagai *IFRS Accounting Standards* dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards*. *IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements Lampiran A* mendefinisikan *IFRS Accounting Standards* yang menggantikan definisi *International Financial Reporting Standards* yang terdapat dalam *IAS 1 Presentation of Financial Statements*, yang sebelumnya dikenal sebagai *IFRS*, *IFRSs*, dan *IFRS Standards*. Dalam hal ketika *IFRS Accounting Standards* mengacu ke *IFRS*, *IFRSs* atau *IFRS Standards* referensi tersebut tetap digunakan dan tidak diubah.

Draf EKSPOSUR

DAFTAR ISI

	Paragraf
CONTOH ILUSTRATIF	
PENDAHULUAN	CI01
BAGIAN I—CONTOH PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	CI05
Laporan laba rugi	
Laporan penyajian penghasilan komprehensif	
Laporan posisi keuangan	
Laporan perubahan ekuitas	
Catatan 1—Beban tertentu berdasarkan sifat	
Catatan 2—Ukuran kinerja tetapan manajemen	
Catatan 3—Analisis penyesuaian reklasifikasi	
Catatan 4—Analisis dampak pajak terkait setiap komponen penghasilan komprehensif lain	
BAGIAN II—CONTOH TAMBAHAN DARI LAPORAN LABA RUGI	CI09
Contoh II-1—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan pabrikan	
Contoh II-2—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan pabrikan yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama	
Contoh II-3—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan asuradur yang melakukan investasi dalam aset keuangan sebagai aktivitas bisnis utama	
Contoh II-4—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan bank investasi dan retail yang melakukan investasi dalam aset keuangan sebagai aktivitas bisnis utama dan menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama	
BAGIAN III—PENGUNGKAPAN MODAL	CI14
Contoh III-1—Entitas yang bukan merupakan institusi keuangan yang diregulasi	
Contoh III-2—Entitas yang belum memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh pihak eksternal	
PSAK 118 MATERI PENDUKUNG	
LAMPIRAN	
Amendemen atas panduan pada PSAK lainnya dan atas Panduan Praktik SAK <i>Membuat Pertimbangan Materialitas</i>	

CONTOH ILUSTRATIF
DRAF EKSPOSUR PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN

Contoh berikut melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari Draf Eksposur PSAK 118. Contoh tersebut mengilustrasikan aspek dari Draf Eksposur PSAK 118 namun tidak dengan intensi untuk menyediakan panduan interpretatif.

PENDAHULUAN

CI01. PSAK 118 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Contoh berikut ini tidak dimaksudkan untuk mengilustrasikan seluruh aspek persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 118, dan juga tidak mengilustrasikan suatu laporan keuangan lengkap.

CI02. Sebagaimana dibahas dalam PSAK 118 paragraf 06–07, 11–12, 106 dan 114, entitas diperkenankan untuk mengubah urutan penyajian atau pengungkapan, judul laporan keuangan dan deskripsi yang digunakan, sepanjang memenuhi persyaratan dalam SAK Indonesia untuk penyajian dan pengungkapan informasi.

CI03. Contoh berikut ini disusun dalam tiga bagian:

- (a) Bagian I—contoh penyajian dan pengungkapan. Bagian ini memberikan contoh laporan kinerja keuangan, posisi keuangan, dan perubahan ekuitas untuk entitas yang tidak melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, dan tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama. Oleh karena itu, persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 49–51, 55–58 dan 65–66 tidak berlaku untuk entitas ini. Bagian ini juga menyediakan contoh beberapa pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (B) Bagian II—contoh tambahan laporan laba rugi. Bagian ini memberikan contoh lain laporan laba rugi untuk entitas yang tidak melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, dan tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama. Bagian ini juga memberikan contoh laporan laba rugi baik untuk entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, atau melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, atau keduanya. Entitas tersebut menerapkan persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 49–51 dan persyaratan dalam paragraf 55–58, atau paragraf 65–66, atau keduanya, dan mengklasifikasikan sejumlah pendapatan dan beban dalam kategori operasi yang jika entitas tanpa aktivitas bisnis utama tertentu seperti itu akan mengklasifikasikannya dalam kategori investasi atau pendanaan.
- (c) Bagian III—pengungkapan modal. Contoh di bagian ini mengilustrasikan penerapan PSAK 118 paragraf 126–128.

CI04. Bagian I dan Bagian II mencakup paragraf penjelasan konteks yang mengawali penyajian atau pengungkapan yang diilustrasikan. Paragraf tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan pembaca lebih memahami konteks yang diilustrasikan oleh penyajian dan pengungkapan yang diberikan. Jumlah moneter pada Bagian I, Bagian II dan Bagian III dinyatakan dalam 'Rupiah' (Rp).

BAGIAN I—CONTOH PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

CI05. Grup XYZ adalah pabrikan yang tidak melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, dan tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama. Bagian I memberikan contoh sebagian laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan Grup XYZ, khususnya:

- (a) laporan kinerja keuangan (laporan laba rugi dan laporan penyajian penghasilan komprehensif);
 - (b) laporan posisi keuangan;
 - (c) laporan perubahan ekuitas;
 - (d) Catatan 1—Beban tertentu berdasarkan sifat (lihat PSAK 118 paragraf 83);
 - (e) Catatan 2—Ukuran kinerja tetapan manajemen (lihat PSAK 118 paragraf 122–123);
 - (f) Catatan 3—Analisis penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118 paragraf 90); dan
 - (g) Catatan 4—Analisis dampak pajak terkait setiap komponen penghasilan komprehensif lain (lihat PSAK 118 paragraf 93).
-

CI06. Bagian ini tidak mengilustrasikan laporan keuangan lengkap Grup XYZ. Misalnya, Bagian I tidak mencakup contoh atas:

- (a) laporan arus kas. Contoh ilustratif yang melengkapi PSAK 207: *Laporan Arus Kas* memberikan contoh laporan arus kas suatu entitas.
- (b) laporan posisi keuangan ketiga pada awal periode pelaporan terdekat sebelumnya. Grup XYZ disyaratkan untuk menyajikan laporan tersebut pada tanggal 1 Januari **20X1** karena Grup XYZ telah membuat penyesuaian retrospektif atas saldo laba pada tanggal tersebut, seperti yang diilustrasikan dalam laporan perubahan ekuitas (lihat PSAK 118 paragraf 37).
- (c) pengungkapan lain yang disyaratkan oleh SAK Indonesia. Dalam laporan keuangan lengkap, entitas disyaratkan untuk melakukan referensi silang setiap unsur dalam laporan keuangan utama dengan informasi terkaitnya dalam catatan atas laporan keuangan (lihat PSAK 118 paragraf 114), dan entitas mungkin melakukan referensi silang antar catatan atas laporan keuangan yang berkaitan.

CI07. Untuk tujuan contoh pada bagian ini:

- (a) Grup XYZ telah menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua laporan (lihat PSAK 118 paragraf 12(b)). Unsur penghasilan komprehensif lain yang termasuk dalam laporan penyajian penghasilan komprehensif disajikan sebelum dampak pajak, dengan satu jumlah tampilan untuk jumlah agregat pajak penghasilan yang berkaitan dengan unsur tersebut dalam setiap kategori (lihat PSAK 118 paragraf 94(b) dan 95).
- (b) Grup XYZ telah menyimpulkan bahwa ringkasan terstruktur paling berguna atas beban diperoleh dengan menyajikan dalam laporan laba rugi pada kategori operasi sebagian beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan beban lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat (lihat PSAK 118 paragraf 78, PP80–PP82 dan PP85). Penyajian beban berdasarkan fungsi paling merepresentasikan cara bisnis dikelola dan cara manajemen melaporkan secara internal, dan merupakan praktik baku dalam industri di mana Grup XYZ beroperasi. Namun, Grup XYZ menyajikan kerugian penurunan nilai *goodwill* secara terpisah karena alokasi ke pos fungsi akan bersifat arbitrer dan oleh karena itu tidak memberikan representasi tepat atas fungsi tersebut. Grup XYZ juga menyimpulkan bahwa menyajikan subtotal tambahan laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba dari operasi yang dilanjutkan memberikan ringkasan terstruktur berguna atas penghasilan dan bebannya.
- (c) Grup XYZ telah menyimpulkan bahwa menyajikan laporan posisi keuangan dengan membedakan unsur lancar dari unsur tidak lancar memberikan ringkasan terstruktur paling berguna atas aset dan liabilitas (lihat PSAK 118 paragraf 96).

Laporan Laba Rugi**Grup XYZ—Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2**

(dalam ribuan Rp)

	Catatan	20X2	20X1
Pendapatan		367.000	353.100
Biaya pokok penjualan	1	(241.600)	(224.100)
Laba bruto		125.400	129.000
Penghasilan operasi lainnya	2	12.200	4.100
Beban penjualan	1	(28.900)	(27.400)
Beban penelitian dan pengembangan	1, 2	(25.100)	(25.900)
Beban umum dan administrasi	1, 2	(20.900)	(22.400)
Kerugian penurunan nilai <i>goodwill</i>	1, 2	(4.500)	—
Beban operasi lainnya		(1.200)	(5.600)
Laba operasi	2	57.000	51.800
Bagian laba dan keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama ^(a)	2	5.300	7.300
Laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan		62.300	59.100
Beban bunga pinjaman dan liabilitas sewa		(13.000)	(13.200)
Beban bunga liabilitas pensiun dan provisi		(6.500)	(6.000)
Laba sebelum pajak penghasilan		42.800	39.900
Beban pajak penghasilan	2	(10.700)	(9.975)
Laba dari operasi yang dilanjutkan	2	32.100	29.925
Rugi dari operasi yang dihentikan		—	(5.500)
LABA		32.100	24.425
Laba yang dapat diatribusikan pada:			
Pemilik entitas induk		25.680	19.540
Kepentingan nonpengendali		6.420	4.885
		32.100	24.425
Laba per saham dari operasi yang dilanjutkan:			
Dasar dan dilusian		0,67	0,66
Laba per saham:			
Dasar dan dilusian		0,67	0,54

(a) Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama adalah bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi dan ventura bersama setelah pajak dan kepentingan nonpengendali dalam entitas asosiasi dan ventura bersama.

Laporan Penyajian Penghasilan Komprehensif**Grup XYZ—Laporan penyajian penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2**

(Dalam ribuan Rp)

	Catatan	20X2	20X1
Laba		32.100	24.425
Penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti		6.700	(4.600)
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama ^(a)		(2.200)	3.300
Pajak penghasilan terkait penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4	(1.675)	1.150
Penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi total		2.825	(150)
Penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi spesifik dipenuhi:			
Selisih kurs dari translasi kegiatan usaha luar negeri	3	(5.600)	10.000
Kerugian lindung nilai atas arus kas	3	(1.200)	(4.000)
Pajak penghasilan terkait penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi spesifik dipenuhi	4	1.700	(1.500)
Penghasilan dan beban total yang akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi spesifik dipenuhi		(5.100)	4.500
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	4	(2.275)	4.350
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL		29.825	28.775
Penghasilan komprehensif total yang dapat diatribusikan pada:			
Pemilik entitas induk		23.420	23.680
Kepentingan nonpengendali		6.405	5.095
		29.825	28.775

- (a) Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama adalah bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi dan ventura bersama setelah pajak dan kepentingan nonpengendali dalam entitas asosiasi dan ventura bersama.

Laporan Posisi Keuangan

Grup XYZ—Laporan posisi keuangan pada 31 Desember 20X2

(dalam ribuan Rp)

Aset	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
Aset lancar		
Kas dan setara kas	23.400	22.800
Piutang usaha	34.000	32.000
Persediaan	55.500	52.500
Aset lancar lainnya	4.600	8.575
Aset lancar total	117.500	115.875
Aset tidak lancar		
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	20.200	17.400
Aset tetap	312.000	295.600
<i>Goodwill</i>	160.000	164.500
Aset takberwujud lainnya	158.400	146.500
Aset tidak lancar total	650.600	624.000
ASET TOTAL	768.100	739.875

(dalam ribuan Rp)

Liabilitas dan ekuitas	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
Liabilitas jangka pendek		
Utang pajak penghasilan	5.100	4.800
Provisi	9.700	10.600
Liabilitas sewa	14.000	18.000
Pinjaman	25.000	28.000
Utang atas barang dan jasa yang diterima dan utang lainnya	21.800	22.400
Liabilitas jangka pendek total	75.600	83.800
Liabilitas jangka panjang		
Liabilitas pajak tangguhan	4.800	8.600
Provisi	38.000	32.000
Liabilitas sewa	85.400	97.500
Liabilitas pensiun	112.000	108.000
Pinjaman	158.700	147.200
Liabilitas jangka panjang total	398.900	393.300
Liabilitas total	474.500	477.100
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham	110.000	100.000
Saldo laba	139.720	123.040
Komponen ekuitas lainnya	2.480	4.740
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk total	252.200	227.780
Kepentingan nonpengendali	41.400	34.995
Ekuitas total	293.600	262.775
EKUITAS DAN LIABILITAS TOTAL	768.100	739.875

Laporan Perubahan Ekuitas

Grup XYZ—Laporan perubahan ekuitas pada 31 Desember 20X2

(dalam ribuan Rp)

	Modal saham	Saldo laba	Translasi kegiatan usaha luar negeri	Program imbalan pasti	Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	Lindung nilai atas arus kas	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan nonpengendali	Ekuitas total
Sado 1 Januari 20X1	100.000	108.100	(2.500)	2.600	(1.500)	2.000	208.700	29.800	238.500
Perubahan kebijakan akuntansi	—	400	—	—	—	—	400	100	500
Saldo disesuaikan	100.000	108.500	(2.500)	2.600	(1.500)	2.000	209.100	29.900	239.000
Perubahan ekuitas selama 20X1									
Dividen	—	(5.000)	—	—	—	—	(5.000)	—	(5.000)
Laba (rugi)	—	19.540	—	—	—	—	19.540	4.885	24.425
Penghasilan komprehensif lain ^(a)	—	—	6.000	(2.760)	3.300	(2.400)	4.140	210	4.350
Penghasilan komprehensif total	—	19.540	6.000	(2.760)	3.300	(2.400)	23.680	5.095	28.775
Saldo 31 Desember 20X1	100.000	123.040	3.500	(160)	1.800	(400)	227.780	34.995	262.775
Perubahan ekuitas selama 20X2									
Penerbitan modal saham	10.000	—	—	—	—	—	10.000	—	10.000
Dividen	—	(9.000)	—	—	—	—	(9.000)	—	(9.000)
Laba (rugi)	—	25.680	—	—	—	—	25.680	6.420	32.100
Penghasilan komprehensif lain ^(a)	—	—	(3.360)	4.020	(2.200)	(720)	(2.260)	(15)	(2.275)
Penghasilan komprehensif total	—	25.680	(3.360)	4.020	(2.200)	(720)	23.420	6.405	29.825
Saldo 31 Desember 20X2	110.000	139.720	140	3.860	(400)	(1.120)	252.200	41.400	293.600

(a) Jumlah yang tercakup dalam translasi kegiatan usaha luar negeri, program imbalan pasti, bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama, dan lindung nilai atas arus kas merepresentasikan penghasilan komprehensif lain dari setiap komponen, setelah pajak dan kepentingan nonpengendali (jika dapat diterapkan).

Catatan 1—Beban tertentu berdasarkan sifat

Tabel ini menunjukkan total dari depresiasi, amortisasi, imbalan kerja, kerugian penurunan nilai dan penurunan nilai persediaan serta jumlah yang terkait dengan setiap pos dalam kategori operasi pada laporan laba rugi Grup XYZ.

(dalam ribuan Rp)

	20X2	20X1
Depresiasi		
Biaya pokok penjualan	23.710	21.990
Beban penelitian dan pengembangan	2.515	2.590
Beban umum dan administrasi	4.975	4.750
Depresiasi total	31.200	29.330
Amortisasi		
Beban riset dan pengembangan	13.840	12.690
Amortisasi total	13.840	12.690
Imbalan kerja		
Biaya pokok penjualan	61.640	57.175
Beban penjualan	7.515	7.110
Beban riset dan pengembangan	6.545	6.750
Beban umum dan administrasi	8.920	5.825
Imbalan kerja total	84.620	76.860
Kerugian penurunan nilai^(a)		
Beban penelitian dan pengembangan	1.600	1.500
Kerugian penurunan nilai <i>goodwill</i>	4.500	—
Kerugian penurunan nilai total	6.100	1.500
Penurunan nilai persediaan^(a)		
Biaya pokok penjualan	2.775	2.625
Penurunan nilai persediaan total	2.775	2.625

(a) Jumlah yang diungkapkan merepresentasikan kerugian penurunan nilai total dan pembalikan kerugian penurunan nilai serta penurunan nilai persediaan total dan pembalikan penurunan nilai persediaan.

Jumlah yang diungkapkan adalah jumlah yang diakui entitas sebagai beban dalam laporan laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk depresiasi dan imbalan kerja.

Jumlah depresiasi yang diungkapkan adalah beban tahun berjalan, dihitung sesuai dengan PSAK 216: *Aset Tetap*. Jumlah tersebut mencakup jumlah yang telah dikapitalisasi dengan memasukkannya ke dalam jumlah tercatat persediaan pada akhir periode pelaporan.

Jumlah imbalan kerja yang diungkapkan adalah biaya yang terjadi pada tahun berjalan, termasuk biaya pensiun, untuk jasa karyawan, yang dihitung sesuai dengan PSAK 219: *Imbalan Kerja*. Jumlah tersebut mencakup jumlah yang telah dikapitalisasi dengan memasukkannya ke dalam jumlah tercatat persediaan pada akhir periode pelaporan.

Catatan 2—Ukuran kinerja tetapan manajemen

CI08. Contoh ini mengilustrasikan pengungkapan Grup XYZ untuk ukuran kinerja tetapan manajemen. Untuk tujuan contoh ini Grup XYZ telah:

- (a) mengungkapkan suatu pernyataan bahwa laba operasi disesuaikan dan laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan menyediakan pandangan manajemen atas laba operasi dan laba dari operasi yang dilanjutkan Grup XYZ dan belum tentu dapat dibandingkan dengan ukuran yang mempunyai label atau deskripsi serupa yang disediakan oleh entitas lain (lihat PSAK 118 paragraf 122).
- (b) memberi label dan mendeskripsikan masing-masing ukuran kinerja tetapan manajemen dengan cara yang jelas dan mudah dipahami dengan menjelaskan bahwa entitas telah menyesuaikan laba operasi dan laba dari operasi yang dilanjutkan untuk unsur penghasilan atau beban tidak berulang yang diperkirakan tidak akan timbul untuk beberapa periode pelaporan tahunan di masa depan (lihat PSAK 118 paragraf 123 dan PP134–PP135).
- (c) menyertakan deskripsi aspek kinerja keuangan yang dikomunikasikan oleh setiap ukuran kinerja yang ditetapkan manajemen. Entitas menjelaskan bahwa, dalam pandangan manajemen, laba operasi yang disesuaikan dan laba yang disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan memberikan informasi berguna tentang kinerja keuangan Grup XYZ karena memberikan informasi yang berguna dalam memahami tren profitabilitas yang mendasarinya (lihat PSAK 118 paragraf 123(a), PP137(b) dan PP138–PP139).
- (d) menjelaskan cara menghitung laba operasi disesuaikan dan laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan dengan menjelaskan unsur penyesuai spesifik (lihat PSAK 118 paragraf 123(b), PP137(b) dan PP138–PP139). Entitas telah merujuk silang unsur penyesuai ke catatan terkait dalam laporan keuangannya dan menyediakan penjelasan rinci mengenai beban restrukturisasi dalam catatan atas laporan keuangan mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen (lihat PSAK 118 paragraf 123(a)).
- (e) menyediakan rekonsiliasi antara laba operasi dan laba operasi disesuaikan, dan antara laba dari operasi yang dilanjutkan dan laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan—yaitu, rekonsiliasi ke subtotal terdekat terbandingkan yang disajikan dalam laporan laba rugi Grup XYZ (lihat PSAK 118 paragraf 123(c) dan PP136–PP140).
- (f) memasukkan dampak pajak penghasilan, dampak pada kepentingan nonpengendali, dan jumlah yang terkait dengan setiap pos dalam laporan laba rugi Grup XYZ untuk setiap unsur penyesuainya (lihat PSAK 118 paragraf 123(d) dan PP141).
- (g) memasukkan deskripsi tentang bagaimana entitas menentukan dampak pajak penghasilan (lihat PSAK 118 paragraf 123(e)).

Ukuran kinerja tetapan manajemen Grup XYZ

Grup XYZ menggunakan ukuran kinerja tetapan manajemen, laba operasi disesuaikan, dan laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan dalam komunikasi publiknya. Ukuran ini tidak ditentukan secara spesifik oleh SAK Indonesia dan oleh karena itu mungkin tidak dapat dibandingkan dengan ukuran serupa yang digunakan oleh entitas lain.

Untuk menyediakan pandangan manajemen atas kinerja keuangan Grup XYZ, laba operasi dan laba dari operasi yang dilanjutkan telah disesuaikan untuk unsur penghasilan atau beban yang diperkirakan Grup XYZ tidak akan timbul untuk beberapa periode pelaporan tahunan di masa depan. Manajemen Grup XYZ yakin bahwa menyesuaikan laba operasi dan laba dari operasi yang dilanjutkan untuk unsur tersebut menyediakan informasi yang berguna dalam memahami tren profitabilitas pendasar Grup XYZ.

Grup XYZ umumnya menyesuaikan unsur penghasilan atau beban berikut:

- kerugian penurunan nilai (atau pembalikannya) atas aset tetap (termasuk aset hak guna) dan aset takberwujud (untuk informasi terkait penurunan nilai lihat Catatan X Aset tetap, Catatan X Aset takberwujud, dan Catatan X Beban penelitian dan pengembangan);
- beban restrukturisasi (untuk informasi terkait beban restrukturisasi lihat Catatan X Imbalan kerja dan Catatan X Beban umum dan administrasi);
- biaya litigasi tidak berulang (untuk informasi terkait biaya litigasi lihat Catatan X Provisi dan Catatan X Beban umum dan administrasi);
- keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap dan aset takberwujud (untuk informasi mengenai pelepasan aset tetap dan aset takberwujud lihat Catatan X Aset tetap, Catatan X Aset takberwujud dan Catatan X Penghasilan operasi lainnya); dan
- keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama.

Grup XYZ menilai beban litigasi takberulang atas dasar kasus per kasus. Grup XYZ secara umum mengategorikan beban litigasi yang timbul dari sengketa kekayaan intelektual, pelanggaran peraturan, dan klaim karyawan sebagai 'takberulang'. Klasifikasi ini didasarkan pada pendekatan proaktif Grup XYZ dalam menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah kejadian tersebut terjadi.

Ukuran kinerja tetapan manajemen 20X2

(dalam ribuan Rp)

	SAK Indonesia	Unsur penyesuai			Ukuran kinerja tetapan manajemen
		Kerugian penurunan nilai	Beban restrukturisasi	Keuntungan pelepasan aset tetap	
Penghasilan operasi lainnya		—	—	(1.800)	
Beban penelitian dan pengembangan		1.600	—	—	
Beban umum dan administrasi		—	3.800	—	
Kerugian penurunan nilai <i>goodwill</i>		4.500	—	—	
Laba operasi / Laba operasi disesuaikan	57.000	6.100	3.800	(1.800)	65.100
Beban pajak penghasilan		—	(589)	297	
Laba dari operasi yang dilanjutkan / Laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan	32.100	6.100	3.211	(1.503)	39.908
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali		305	161	—	
Kerugian penurunan nilai		Kerugian penurunan nilai yang timbul pada 20X2 tidak menghasilkan manfaat pajak karena tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak di Negara A dan Negara B.			
Beban restrukturisasi		Beban restrukturisasi pada 20X2 terkait dengan program restrukturisasi Grup XYZ 'Apollo 20X2'. Beban tersebut termasuk beban redundansi, beban pelatihan ulang karyawan dan beban relokasi, seluruhnya terkait dengan penutupan beberapa pabrik di Negara C. Dampak pajak dari beban restrukturisasi ini dihitung berdasarkan tarif pajak statutori yang berlaku di Negara C pada akhir 20X2 , yaitu 15,5%.			
Keuntungan dari pelepasan aset tetap		Dampak pajak atas keuntungan dari pelepasan aset tetap dihitung berdasarkan tarif pajak statutori yang berlaku di Negara D pada akhir 20X2 , yaitu 16,5%.			

Ukuran kinerja tetapan manajemen 20X1

(dalam ribuan Rp)

	SAK Indonesia	Unsur penyesuai			Ukuran kinerja tetapan manajemen
		Kerugian penurunan nilai	Beban litigasi	Keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama	
Beban penelitian dan pengembangan		1.500	—	—	
Beban umum dan administrasi		—	3.500	—	
Laba operasi / Laba operasi disesuaikan	51.800	1.500	3.500	—	56.800
Bagian laba dan keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama		—	—	(2.200)	
Beban pajak penghasilan		—	—	319	
Laba dari operasi yang dilanjutkan / Laba disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan	29.925	1.500	3.500	(1.881)	33.044
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali		75	—	—	
Kerugian penurunan nilai		Kerugian penurunan nilai yang terjadi pada 20X1 tidak menghasilkan manfaat pajak karena tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak di Negara E.			
Beban litigasi		Beban litigasi pada yang terjadi pada 20X1 tidak menghasilkan manfaat pajak karena tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak di Negara F.			
Keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama		Dampak pajak atas keuntungan dari pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama dihitung berdasarkan tarif pajak statutori yang berlaku di Negara G, pada akhir 20X1 , yaitu 14,5%.			

Catatan 3—Analisis penyesuaian reklasifikasi

Tabel ini menunjukkan penyesuaian reklasifikasi atas komponen penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi jika kondisi tertentu dipenuhi.

(dalam ribuan Rp)

	20X2	20X1
Penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi jika kondisi tertentu dipenuhi		
Selisih kurs dari translasi kegiatan usaha luar negeri	(5.600)	10.000
Kerugian atas lindung nilai atas arus kas:		
Kerugian selama tahun berjalan	(5.200)	(4.000)
Dikurangi: penyesuaian reklasifikasi untuk kerugian yang termasuk dalam laba rugi	4.000	—
	(1.200)	(4.000)

Catatan 4—Analisis dampak pajak pada setiap komponen penghasilan komprehensif lain

(dalam ribuan Rp)

	20X2			20X1		
	Jumlah sebelum pajak	Manfaat (beban) pajak	Jumlah setelah pajak	Jumlah sebelum pajak	Manfaat (beban) pajak	Jumlah setelah pajak
Penghasilan dan beban yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.500	(1.675)	2.825	(1.300)	1.150	(150)
Keuntungan (kerugian) atas pengukuran kembali program imbalan pasti	6.700	(1.675)	5.025	(4.600)	1.150	(3.450)
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(2.200)	—	(2.200)	3.300	—	3.300
Penghasilan dan beban yang akan direklasifikasi ke laba rugi jika kondisi tertentu dipenuhi	(6.800)	1.700	(5.100)	6.000	(1.500)	4.500
Selisih kurs dari translasi kegiatan usaha luar negeri	(5.600)	1.400	(4.200)	10.000	(2.500)	7.500
Kerugian lindung nilai atas arus kas	(1.200)	300	(900)	(4.000)	1.000	(3.000)
Penghasilan komprehensif lain	(2.300)	25	(2.275)	4.700	(350)	4.350

BAGIAN II—CONTOH TAMBAHAN LAPORAN LABA RUGI

CI09. Bagian II memberikan contoh tambahan laporan laba rugi untuk empat entitas:

- (a) Contoh II-1—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan pabrikan;
- (b) Contoh II-2—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan pabrikan yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama;
- (c) Contoh II-3—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan asuradur yang melakukan investasi pada aset keuangan sebagai aktivitas bisnis utama; dan
- (d) Contoh II-4—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan bank investasi dan retail yang melakukan investasi pada aset keuangan sebagai aktivitas bisnis utama dan menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama.

Untuk simplifikasi, contoh pada bagian ini tidak menampilkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali, dan laba per saham (dasar dan dilusian).

Contoh II-1—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan pabrikan

CI10. Contoh ini mengilustrasikan laporan laba rugi Grup AA. Untuk tujuan contoh ini:

- (a) Grup AA adalah pabrikan yang tidak melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, dan tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama.
- (b) sesuai dengan PSAK 118 paragraf 78, PP80–PP82 dan PP85, Grup AA telah menyimpulkan bahwa penyajian seluruh beban yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dalam kategori operasi pada laporan laba rugi menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna atas beban tersebut. Grup AA mencapai kesimpulan tersebut karena pendorong utama profitabilitasnya adalah biaya bahan baku dan ketenagakerjaan.

Grup AA—Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2

(dalam ribuan Rp)

	20X2	20X1
Pendapatan	398.700	370.900
Perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses	3.000	(3.700)
Bahan baku digunakan	(146.000)	(143.200)
Imbalan kerja	(107.000)	(104.600)
Depresiasi, amortisasi dan penurunan nilai	(37.500)	(36.300)
Beban operasi lainnya	(17.100)	(15.200)
Laba operasi	94.100	67.900
Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama	3.800	2.900
Laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan	97.900	70.800
Beban bunga atas pinjaman dan liabilitas sewa	(3.500)	(4.000)
Beban bunga atas liabilitas pensiun	(6.500)	(6.800)
Laba sebelum pajak penghasilan	87.900	60.000
Beban pajak penghasilan	(21.800)	(15.000)
LABA	66.100	45.000

Contoh II-2—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan pabrikan yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama

- CI11. Contoh ini mengilustrasikan laporan laba rugi Group BB. Untuk tujuan contoh ini:
- Group BB adalah pabrikan yang juga menyediakan pendanaan kepada pelanggannya sebagai aktivitas bisnis utama (lihat PSAK 118 paragraf 49–51 dan 65–66). Group BB tidak melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama.
 - sesuai dengan PSAK 118 paragraf 78, PP80–PP82 dan PP85, Group BB telah menyimpulkan bahwa penyajian sebagian beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan beban lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dalam kategori operasi pada laporan laba rugi memberikan ringkasan terstruktur paling berguna atas beban tersebut.
 - Kebijakan akuntansi Grup BB adalah untuk memasukkan:
 - dalam kategori pembiayaan, penghasilan dan beban dari liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana yang tidak terkait dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan (lihat PSAK 118 paragraf 65(a)(ii)); dan
 - dalam kategori investasi, penghasilan dan beban dari kas dan setara kas yang tidak terkait dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan (lihat PSAK 118 paragraf 56(b)(ii)).

Group BB—Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2

(dalam ribuan Rp)

	20X2	20X1
Pendapatan	390.000	365.000
Biaya pokok penjualan	(285.000)	(270.000)
Laba bruto dari penjualan barang	105.000	95.000
Pendapatan bunga terkait dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan	119.500	121.000
Beban bunga terkait dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan	(110.000)	(100.800)
Penghasilan bunga neto	9.500	20.200
Beban penjualan	(28.900)	(26.300)
Beban penelitian dan pengembangan	(15.800)	(15.400)
Beban umum dan administrasi	(22.900)	(23.600)
Beban operasi lainnya	(4.500)	(5.400)
Laba operasi	42.400	44.500
Penghasilan dari investasi	5.500	4.000
Laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan	47.900	48.500
Beban bunga atas pinjaman yang tidak terkait dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan	(3.800)	(3.500)
Beban bunga atas liabilitas pensiun	(3.600)	(4.200)
Laba sebelum pajak penghasilan	40.500	40.800
Beban pajak penghasilan	(10.125)	(10.200)
LABA	30.375	30.600

Contoh II-3—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan asuradur yang melakukan investasi pada aset keuangan sebagai aktivitas bisnis utama

- CI12. Contoh ini mengilustrasikan laporan laba rugi Grup CC. Untuk tujuan contoh ini:
- (a) Group CC adalah asuradur yang, sebagai aktivitas bisnis utamanya, melakukan investasi pada aset keuangan yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya Group CC lainnya (lihat PSAK 118 paragraf 49–51 dan 55–58). Group CC tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama.
- (b) sesuai dengan PSAK 118 paragraf 78, PP80–PP82 dan PP85, Group CC telah menyimpulkan bahwa penyajian sebagian beban yang diklasifikasikan menurut sifatnya dan beban lain yang diklasifikasikan menurut fungsi dalam kategori operasi pada laporan laba rugi menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna dari beban tersebut.

Grup CC—Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2

(dalam ribuan Rp)

	20X2	20X1
Pendapatan asuransi	138.200	133.800
Beban jasa asuransi	(107.000)	(106.000)
Hasil jasa asuransi	31.200	27.800
Penghasilan investasi	117.000	103.000
Kerugian penurunan nilai kredit	(5.000)	(1.500)
Beban keuangan asuransi	(85.900)	(84.000)
Hasil keuangan neto	26.100	17.500
Beban operasi lainnya	(3.100)	(4.600)
Laba operasi	54.200	40.700
Bagian laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	(5.400)	4.800
Laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan	48.800	45.500
Beban bunga atas pinjaman dan liabilitas pensiun	(2.500)	(2.200)
Laba sebelum pajak penghasilan	46.300	43.300
Beban pajak penghasilan	(10.200)	(9.000)
LABA	36.100	34.300

Contoh II-4—Laporan laba rugi untuk entitas yang merupakan bank investasi dan retail yang melakukan investasi pada aset keuangan sebagai aktivitas bisnis utama dan menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama

CI13. Contoh ini mengilustrasikan laporan laba rugi Grup DD. Untuk tujuan contoh ini:

- (a) Group DD adalah bank investasi dan retail yang:
- (i) melakukan investasi pada aset keuangan yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya Grup DD lainnya sebagai aktivitas bisnis utama (lihat PSAK 118 paragraf 49–51 dan 55–58); dan
 - (ii) menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama (lihat PSAK 118 paragraf 49–51 dan 65–66).
- (b) sesuai dengan PSAK 118 paragraf 78, PP80–PP82 dan PP85, Grup DD telah menyimpulkan bahwa menyajikan seluruh beban yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dalam kategori operasi pada laporan laba rugi memberikan ringkasan terstruktur paling berguna atas beban tersebut.
- (c) Kebijakan akuntansi Grup DD adalah mengklasifikasikan dalam kategori operasi, penghasilan dan beban dari seluruh liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana, termasuk liabilitas yang tidak berkaitan dengan pemberian pendanaan kepada pelanggan (lihat PSAK 118 paragraf 65(a)(ii)). Akibatnya, Grup DD tidak diperkenankan untuk menyajikan subtotal laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan (lihat PSAK 118 paragraf 73).

Grup DD—Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2

(dalam ribuan Rp)

	20X2	20X1
Pendapatan bunga	356.000	333.800
Beban bunga	(281.000)	(259.000)
Penghasilan bunga neto	75.000	74.800
Penghasilan <i>fee</i> dan komisi	76.800	74.300
Beban <i>fee</i> dan komisi	(45.300)	(44.800)
Penghasilan <i>fee</i> dan komisi neto	31.500	29.500
Penghasilan perdagangan neto	9.100	900
Penghasilan investasi neto	11.600	7.800
Kerugian penurunan nilai kredit	(17.300)	(19.100)
Imbalan kerja	(55.100)	(49.500)
Depresiasi dan amortisasi	(6.700)	(5.950)
Beban operasi lainnya	(5.100)	(4.550)
Laba operasi	43.000	33.900
Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama	1.800	2.100
Beban bunga atas liabilitas pensiun dan sewa	(2.200)	(1.800)
Laba sebelum pajak penghasilan	42.600	34.200
Beban pajak penghasilan	(11.200)	(9.000)
LABA	31.400	25.200

BAGIAN III—PENGUNGKAPAN MODAL

Contoh III-1—Entitas yang bukan merupakan institusi keuangan yang diregulasi

CI14. Contoh ini mengilustrasikan penerapan PSAK 118 paragraf 126–128 oleh Grup EE, suatu entitas yang bukan merupakan institusi keuangan dan tidak tunduk pada persyaratan permodalan yang diwajibkan pihak eksternal. Dalam contoh sederhana ini, Grup EE memantau modalnya menggunakan rasio utang terhadap modal disesuaikan. Entitas lain mungkin menggunakan metode berbeda untuk memantau modalnya. Grup EE memutuskan, dengan mempertimbangkan kondisinya, seberapa banyak rincian yang diberikannya untuk memenuhi persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 126–128. Dalam menentukan bentuk dan isi pengungkapan untuk memenuhi persyaratan tersebut, Grup EE juga mempertimbangkan persyaratan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 207 paragraf 44A–44E.

CI15. Grup EE memproduksi dan menjual mobil. Grup EE mencakup entitas anak lembaga keuangan yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan, terutama dalam bentuk sewa.

Pengungkapan modal Grup EE

Tujuan Grup EE dalam mengelola modalnya adalah:

- (1) untuk menjaga kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga dapat terus memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya; dan
- (2) memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menetapkan harga produk dan jasa yang sepadan dengan besarnya risiko.

Grup EE menetapkan jumlah modalnya sebanding dengan risiko. Grup EE mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko dari aset dasarnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, Grup EE dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utangnya.

Konsisten dengan entitas lain di industri ini, Grup EE memantau modal berdasarkan rasio utang terhadap modal disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai utang neto dibagi modal disesuaikan. Utang neto dihitung dari utang total (seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (yaitu, modal saham, agio saham, kepentingan nonpengendali, saldo laba, dan surplus revaluasi) selain jumlah yang terakumulasi dalam ekuitas terkait dengan lindung nilai atas arus kas, dan mencakup sebagian bentuk utang subordinasi.

Selama tahun **20X2**, strategi Grup EE, yang tidak berubah dari tahun **20X1**, adalah mempertahankan rasio utang terhadap modal disesuaikan pada kisaran bawah 6:1 hingga 7:1 untuk menjamin akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar dengan mempertahankan peringkat kredit BB. Rasio utang terhadap modal disesuaikan pada tanggal 31 Desember **20X2** dan 31 Desember **20X1** adalah:

(dalam ribuan Rp)

	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
Utang total	1.000	1.100
Dikurangi: kas dan setara kas	(90)	(150)
Utang neto	910	950
Ekuitas total	110	105
Ditambah: instrumen utang subordinasi	38	38
Dikurangi: jumlah terakumulasi di ekuitas terkait lindung nilai atas arus kas	(10)	(5)
Modal disesuaikan	138	138
Rasio utang terhadap modal disesuaikan	6.6	6.9

Penurunan rasio utang terhadap modal disesuaikan Grup EE selama tahun **20X2** terutama disebabkan oleh penurunan utang neto yang timbul dari penjualan Entitas Anak X. Penurunan utang neto ini, bersamaan dengan peningkatan profitabilitas dan penurunan tingkat piutang yang dikelola, mengakibatkan pembayaran dividen meningkat menjadi Rp2,8 juta pada **20X2** (dari Rp2,5 juta pada **20X1**).

Contoh III-2—Entitas yang belum memenuhi persyaratan modal yang diwajibkan oleh pihak eksternal

CI16. Contoh ini mengilustrasikan penerapan PSAK 118 paragraf 127(e) jika entitas belum memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh pihak eksternal selama periode pelaporan. Contoh ini tidak mengilustrasikan pengungkapan lain yang seharusnya disediakan untuk memenuhi persyaratan lain dalam PSAK 118 paragraf 126–128.

CI17. Grup FF menyediakan pendanaan kepada pelanggannya dan tunduk pada persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator X. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember **20X2** Grup FF tidak memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator X. Dalam laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember **20X2** Grup FF memberikan pengungkapan terkait ketidapatuhannya.

Pengungkapan modal Grup FF (penerapan PSAK 118 paragraf 127(e))

Grup FF menyampaikan pelaporan modal kuartalan per 30 September **20X2** yang disyaratkan regulator pada tanggal 20 Oktober **20X2**. Pada tanggal tersebut, modal Grup FF yang disyaratkan adalah sebesar Rp1 juta lebih rendah dari persyaratan modal yang ditetapkan oleh Regulator X. Oleh karena itu, Grup FF harus menyampaikan rencana kepada Regulator X yang mengindikasikan bagaimana Grup FF akan meningkatkan modal regulasi hingga jumlah yang disyaratkan. Grup FF menyerahkan rencana yang mencakup penjualan sebagian portofolio investasinya dengan jumlah tercatat sebesar Rp11,5 juta pada kuartal keempat tahun **20X2**. Pada kuartal keempat tahun **20X2** Grup FF menjual portofolio investasi bunga tetapnya seharga Rp12,6 juta dan memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan.

DRAF EKSPOSUR PSAK 118 MATERI PENDUKUNG

Bagan berikut ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari, Draf Eksposur PSAK 118. Bagan ini menggambarkan aspek Draf Eksposur PSAK 118 namun tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan interpretatif.

Bagan 1—PSAK 118 dalam 1 halaman

Bagan 2—Klasifikasi penghasilan dan beban pada laporan laba rugi untuk entitas tanpa aktivitas bisnis utama tertentu

Bagan 3—Klasifikasi penghasilan dan beban pada laporan laba rugi untuk entitas dengan aktivitas bisnis utama tertentu

Bagan 3.1—Klasifikasi penghasilan dan beban spesifik oleh entitas yang melakukan investasi aset sebagai aktivitas bisnis utama

Bagan 3.2—Klasifikasi penghasilan dan beban spesifik oleh entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama

Bagan 3.3—Klasifikasi penghasilan dan beban dari kas dan setara kas oleh entitas dengan aktivitas bisnis utama tertentu

Bagan 4—Klasifikasi penghasilan dan beban dari kontrak hibrida dengan kontrak utama liabilitas

Bagan 5—Klasifikasi keuntungan dan kerugian atas derivatif

Bagan 6—Identifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen

Bagan 7—Penentuan label informatif dan informasi untuk unsur agregasian

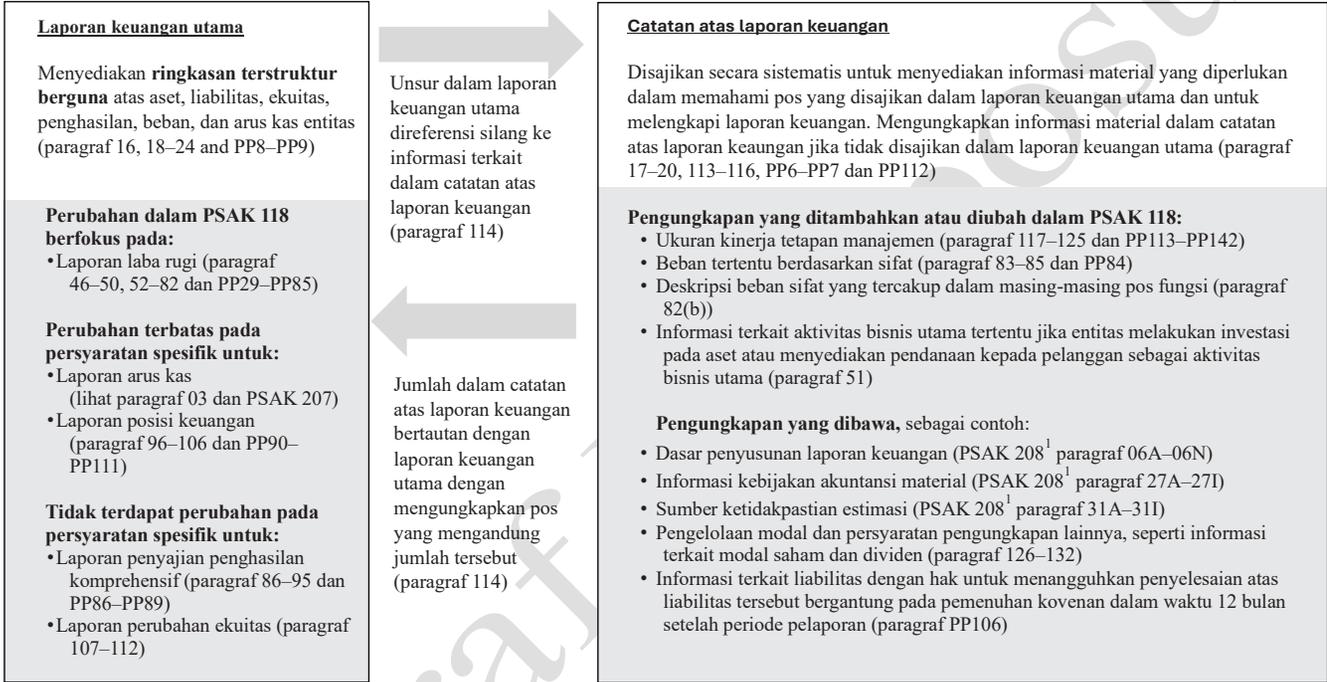
Bagan 8—Ringkasan terstruktur berguna dan proses materialitas

BAGAN 1—PSAK 118 DALAM SATU HALAMAN

Bagan 1 meringkas persyaratan dalam PSAK 118, termasuk persyaratan baru dalam PSAK 118 dan persyaratan yang dibawa dari PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan ke PSAK 118 dan dari PSAK lainnya.

Laporan keuangan

Menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban entitas pelapor yang **berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai prospek masa depan arus masuk kas neto ke dalam entitas dan dalam menilai pewelikelolaan manajemen atas sumber daya ekonomik entitas (paragraf 9)**



Agregasi dan disagregasi (paragraf 41–45 dan PP16–PP28)

- Prinsip agregasi berdasarkan pada kesamaan karakteristik dan disagregasi berdasarkan karakteristik yang tidak sama.
- Panduan untuk menemukan label informatif dan untuk mengungkapkan informasi tentang unsur agregasian

Persyaratan umum laporan keuangan (paragraf 10–14, 25–40, PP1–PP5 dan PP10–PP15)

- Laporan keuangan lengkap
- Konsistensi penyajian, pengungkapan dan klasifikasi
- Identifikasi laporan keuangan
- Informasi komparatif
- Identifikasi laporan keuangan
- Informasi komparatif

1. Paragraf tersebut dibawa dari PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan ke PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ketika PSAK 118 diterbitkan.....

BAGAN 2—KLASIFIKASI PENGHASILAN DAN BEBAN DALAM LAPORAN LABA RUGI UNTUK ENTITAS TANPA AKTIVITAS BISNIS UTAMA TERTENTU

Bagan 2 meringkas persyaratan sebagaimana diatur dalam PSAK 118 paragraf 47–68 dan PP42–PP76 untuk klasifikasi penghasilan dan beban ke dalam kategori pada laporan laba rugi untuk entitas tanpa aktivitas bisnis utama tertentu.

Kategori dan subtotal dalam laporan laba rugi¹

<p>Kategori operasi (paragraf 52 dan PP42) Penghasilan dan beban yang tidak diklasifikasikan dalam kategori lainnya</p>
<p>Laba (rugi) operasi</p>
<p>Kategori investasi (paragraf 53–54 dan PP43–PP49) Penghasilan dan beban (sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 54) dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan; • kas dan setara kas; dan • aset lainnya yang menghasilkan imbal hasil secara individual dan sebagian besar independen dari sumber daya lain entitas
<p>Laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan</p>
<p>Kategori pendanaan (paragraf 59–64 dan PP50–PP58)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan dan beban (sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 60) dari liabilitas yang timbul dari transaksi yang melibatkan hanya penggalangan dana • Penghasilan dan beban bunga serta penghasilan dan beban yang timbul dari perubahan suku bunga (sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 61) dari liabilitas yang timbul dari transaksi yang tidak hanya melibatkan penggalangan dana
<p>Kategori pajak penghasilan (paragraf 67)</p>
<p>Kategori operasi yang tidak dilanjutkan (paragraf 68)</p>
<p>Laba (rugi)</p>

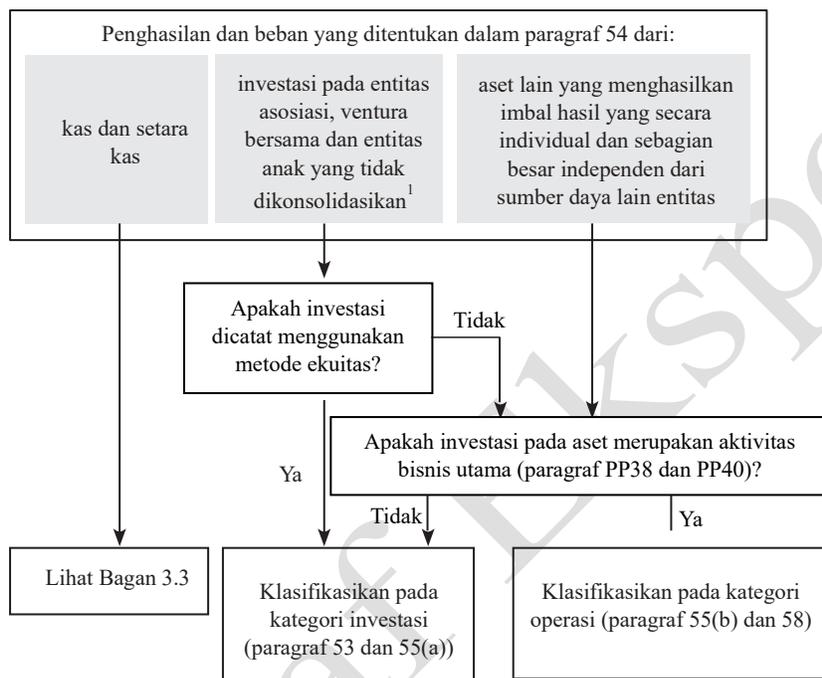
¹ PSAK 118 juga mengatur persyaratan pengklasifikasian dalam kategori pada laporan laba rugi (paragraf 48):

- Selisih kurs dan keuntungan atau kerugian posisi moneter neto (paragraf PP65–PP69); dan
- Keuntungan dan kerugian atas derivatif dan instrumen lindung nilai yang ditetapkan (paragraf PP70–PP76).

BAGAN 3—KLASIFIKASI PENGHASILAN DAN BEBAN SPESIFIK DALAM LAPORAN LABA RUGI OLEH ENTITAS DENGAN AKTIVITAS BISNIS UTAMA TERTENTU

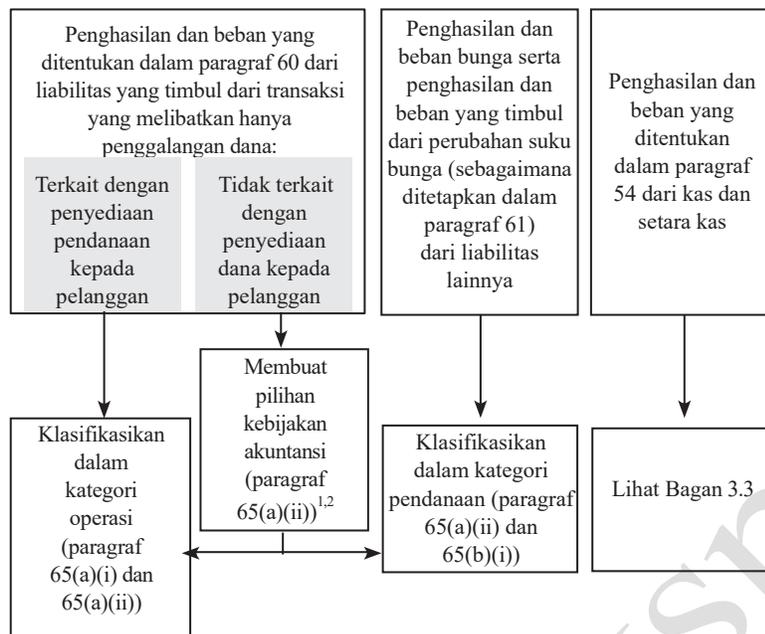
Bagan 3.1–3.3 menggambarkan aspek persyaratan bagi entitas yang melakukan investasi pada aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama sebagaimana diatur dalam PSAK 118 paragraf 55–58 dan 65–66. Entitas tersebut mengklasifikasikan sejumlah penghasilan dan beban dalam kategori operasi yang bagi entitas tanpa aktivitas bisnis utama tertentu disyaratkan untuk mengklasifikasikan dalam kategori investasi atau pendanaan.

BAGAN 3.1—KLASIFIKASI PENGHASILAN DAN BEBAN SPESIFIK OLEH ENTITAS YANG MELAKUKAN INVESTASI PADA ASET SEBAGAI AKTIVITAS BISNIS UTAMA



¹ Investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan termasuk investasi pada aset tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.

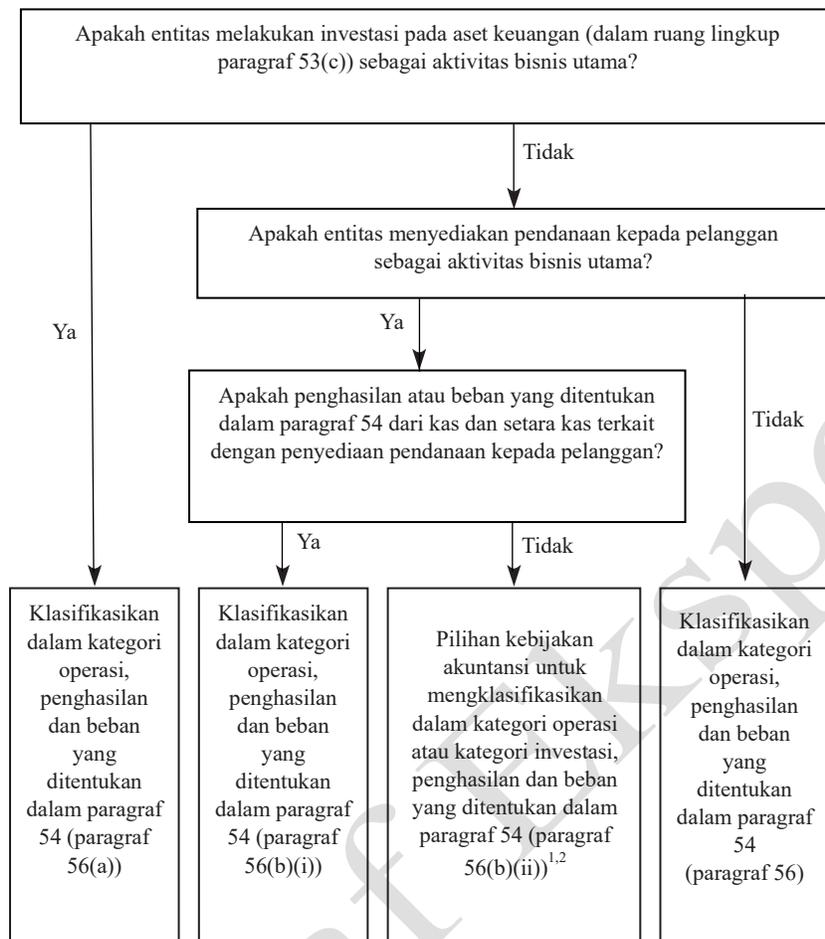
BAGAN 3.2—KLASIFIKASI PENGHASILAN DAN BEBAN SPESIFIK OLEH ENTITAS YANG MENYEDIAKAN PENDANAAN KEPADA PELANGGAN SEBAGAI AKTIVITAS BISNIS UTAMA



¹ Pilihan kebijakan akuntansi konsisten (jika dapat diterapkan) dengan yang dibuat untuk klasifikasi penghasilan dan beban dari kas dan setara kas (paragraf 65(a)(ii)) (lihat Bagan 3.3).

² Jika entitas tidak dapat membedakan liabilitas mana yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana terkait dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan, maka entitas menerapkan pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh liabilitas tersebut ke dalam kategori operasi (paragraf 66).

BAGAN 3.3—KLASIFIKASI PENGHASILAN DAN BEBAN DARI KAS DAN SETARA KAS OLEH ENTITAS DENGAN AKTIVITAS BISNIS UTAMA TERTENTU

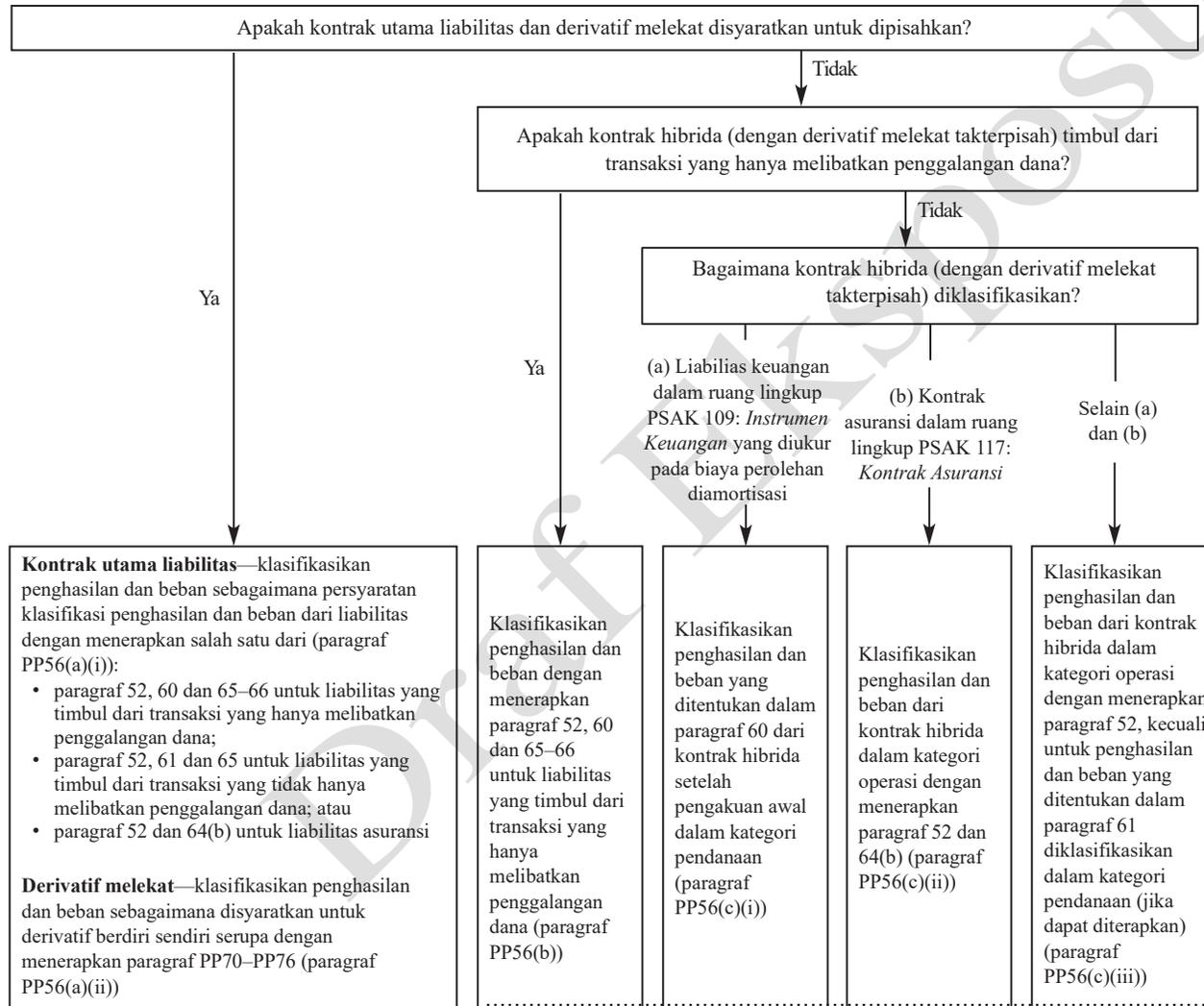


¹ Pilihan kebijakan akuntansi konsisten (jika dapat diterapkan) dengan pilihan yang dibuat untuk klasifikasi penghasilan dan beban dari liabilitas yang timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana yang tidak berkaitan dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan (paragraf 56(b) (ii)) (lihat Bagan 3.2).

² Jika entitas tidak dapat membedakan kas dan setara kas mana yang berkaitan dengan penyediaan pendanaan kepada pelanggan, maka entitas menerapkan pilihan kebijakan akuntansi untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari seluruh kas dan setara kas dalam kategori operasi (paragraf 57).

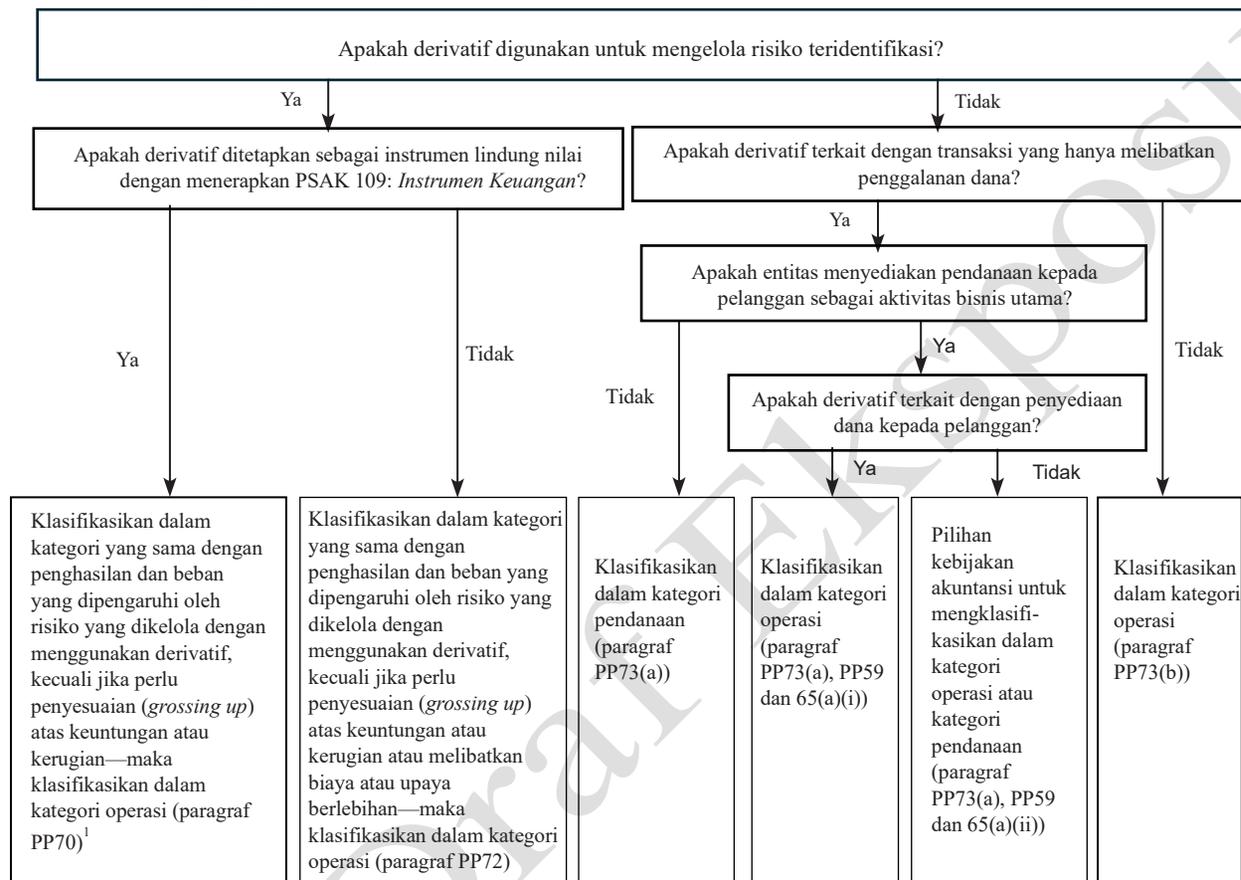
BAGAN 4—KLASIFIKASI PENGHASILAN DAN BEBAN DARI KONTRAK HIBRIDA DENGAN KONTRAK UTAMA LIABILITAS

Bagan 4 menggambarkan bagaimana entitas menerapkan persyaratan untuk kategori pendanaan pada kontrak hibrida yang mengandung kontrak utama liabilitas sebagaimana diatur dalam PSAK 118 paragraf PP56–PP57.



BAGAN 5—KLASIFIKASI KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN ATAS DERIVATIF

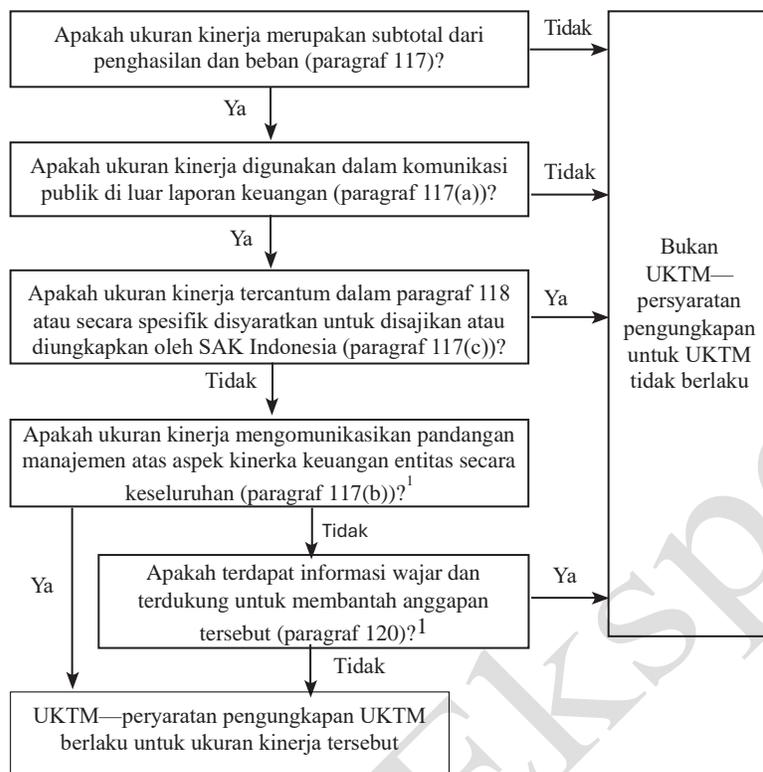
Bagan 5 menggambarkan persyaratan untuk mengklasifikasikan keuntungan atau kerugian atas derivatif sebagaimana diatur dalam PSAK 118 paragraf PP70–PP76.



¹ Paragraf PP70 juga berlaku untuk keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan selain derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dengan menerapkan PSAK 109: Instrumen Keuangan.

BAGAN 6—MENGIDENTIFIKASI UKURAN KINERJA TETAPAN MANAJEMEN

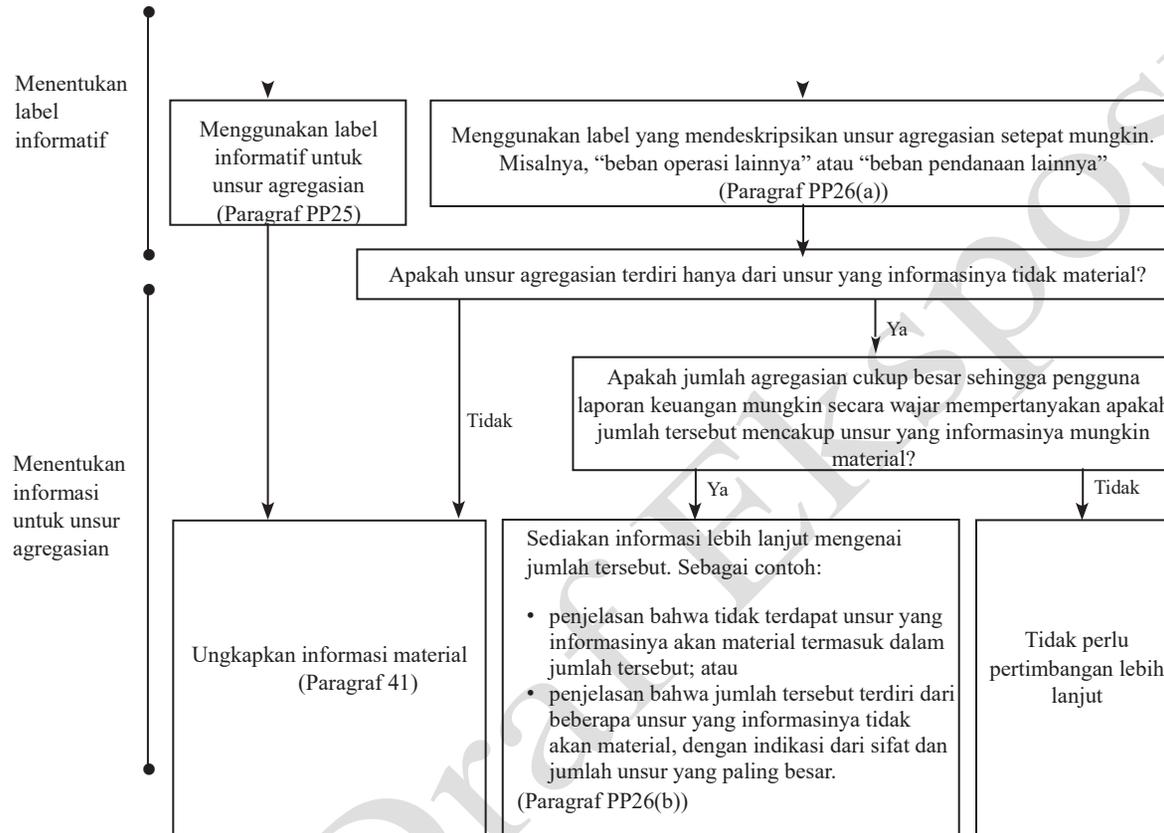
Bagan 6 menggambarkan persyaratan untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM) sebagaimana diatur dalam PSAK 118 paragraf 117–120.



¹ Terdapat anggapan bahwa subtotal dari penghasilan dan beban yang digunakan dalam komunikasi publik mengomunikasikan pandangan manajemen (paragraf 119); entitas tidak perlu mempertimbangkan apakah akan membantah anggapan tersebut.

BAGAN 7—MENENTUKAN LABEL INFORMATIF DAN INFORMASI UNTUK UNSUR AGREGASIAN

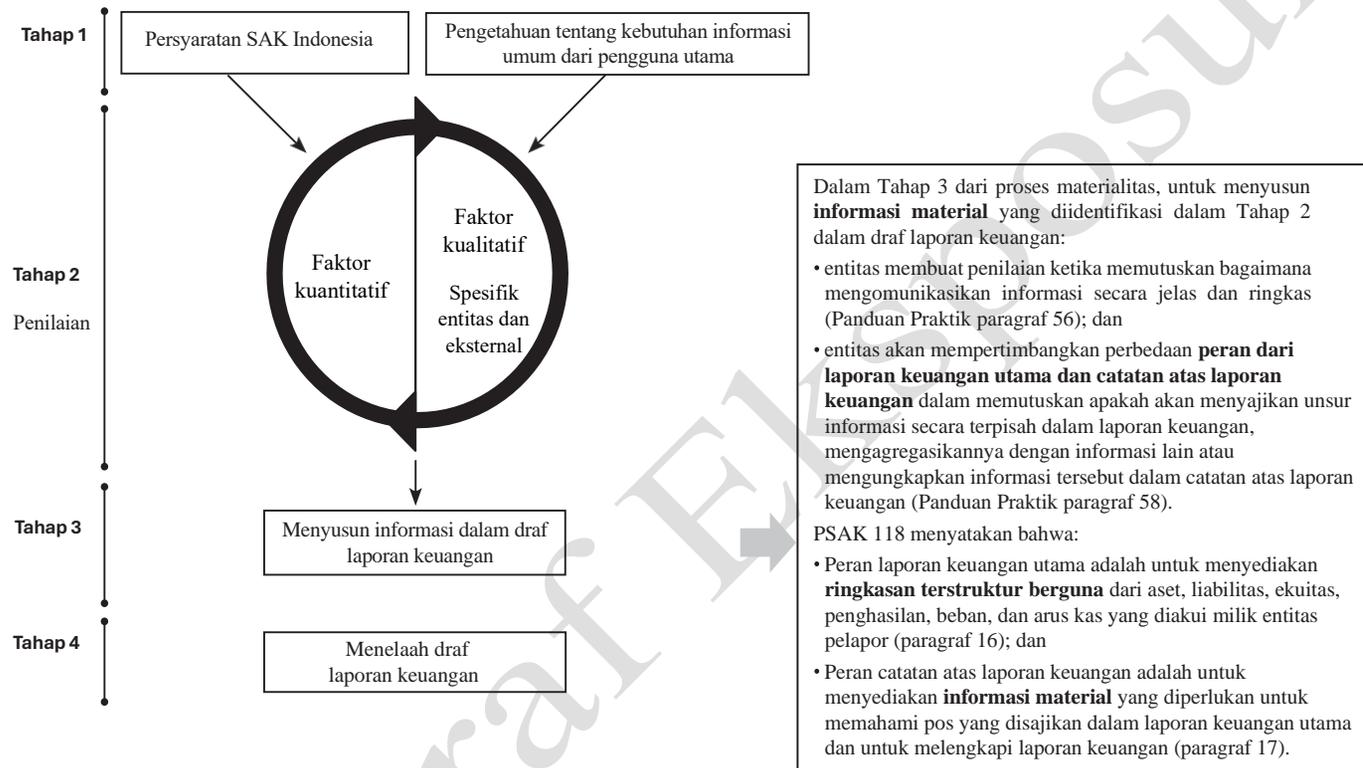
Bagan 7 menggambarkan aspek persyaratan untuk menentukan label informatif dan informasi untuk unsur agregasian sebagaimana diatur dalam PSAK 118 paragraf PP25–PP26.



BAGAN 8—RINGKASAN TERSTRUKTUR BERGUNA DAN PROSES MATERIALITAS

Bagan 8 menggambarkan bagaimana “ringkasan terstruktur berguna” berkaitan dengan proses materialitas dalam Panduan Praktik – Membuat Pertimbangan Materialitas.

Proses materialitas dalam Panduan Praktik – Membuat Pertimbangan Materialitas



LAMPIRAN

Amendemen pedoman PSAK/ISAK lainnya dan Panduan Praktik - Membuat Pertimbangan Materialitas diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan Draf Eksposur PSAK 18 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

PSAK 102: PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

PI Contoh 11 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

Pedoman implementasi PSAK 102: PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

...

TRANSAKSI PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM YANG DISELESAIKAN DENGAN INSTRUMEN EKUITAS

...

Contoh 11
<p><i>Program pembelian saham oleh karyawan</i></p> <p>...</p> <p>Penerapan persyaratan</p> <p>...</p> <p>Akan tetapi, dalam beberapa kasus, beban terkait dengan program pembelian saham oleh karyawan mungkin tidak material. PSAK 208: <u>Dasar Penyusunan Laporan Keuangan</u> Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menyatakan bahwa kebijakan akuntansi dalam SAK Indonesia tidak perlu diterapkan jika dampak dari penerapan itu tidak material (PSAK 208 paragraf 08). <u>PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</u> juga PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa informasi adalah material jika, penghilangan, salah saji atau pengaburan diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan (<u>PSAK 118, paragraf PP01-PP05</u> PSAK 201, paragraf 07). Oleh karena itu, dalam contoh ini, entitas mempertimbangkan apakah beban sebesar Rp256.000 adalah material.</p>

PSAK 105: ASET TIDAK LANCAR YANG DIKUASAI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

Contoh 11 yang melengkapi PSAK 105 dimutakhirkan. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PEDOMAN IMPLEMENTASI

PSAK 105: ASET TIDAK LANCAR YANG DIKUASAI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

...

PENYAJIAN OPERASI YANG DIHENTIKAN DALAM LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* paragraf 33 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan suatu jumlah tunggal dalam laporan laba rugi komprehensif untuk operasi yang dihentikan bersama dengan analisis dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian yang terpisah dari operasi yang dilanjutkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Contoh 11 menggambarkan bagaimana untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Contoh 11

KELOMPOK USAHA XYZ – LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X2 (diilustrasikan klasifikasi beban berdasarkan fungsi)		
(dalam ribuan rupiah)	20X2	20X1
Operasi yang dilanjutkan		
Pendapatan	X	X
Beban pokok penjualan	<u>(X)</u>	<u>(X)</u>
Laba bruto	X	X
Pendapatan <u>Penghasilan operasi lainnya</u>	X	X
Biaya distribusi	(X)	(X)
Beban administrasi	(X)	(X)
Beban <u>operasi lain-lain</u>	<u>(X)</u>	<u>(X)</u>
<u>Laba operasi</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
Biaya keuangan	(X)	(X)
Bagian laba entitas asosiasi	<u>X</u>	<u>X</u>
<u>Laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
<u>Beban bunga</u>	<u>(X)</u>	<u>(X)</u>
Laba sebelum pajak <u>penghasilan</u>	X	X
Beban pajak penghasilan	<u>(X)</u>	<u>(X)</u>
Laba periode dari operasi yang dilanjutkan	X	X

KELOMPOK USAHA XYZ – LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X2 (diilustrasikan klasifikasi beban berdasarkan fungsi)		
Operasi yang dihentikan		
Laba periode dari operasi yang dihentikan ^(a)	X	X
Laba periode	<u>X</u>	<u>X</u>
Teratribusikan pada:		
Pemilik entitas induk		
Laba periode dari operasi yang dilanjutkan	X	X
Laba periode dari operasi yang dihentikan	<u>X</u>	<u>X</u>
Laba periode yang <u>dapat</u> diatribusikan pada pemilik entitas induk	X	X
Kepentingan nonpengendali		
Laba periode dari operasi yang dilanjutkan	X	X
Laba periode dari operasi yang dihentikan	<u>X</u>	<u>X</u>
Laba periode yang <u>dapat</u> diatribusikan pada kepentingan nonpengendali	<u>X</u>	<u>X</u>
	<u>X</u>	<u>X</u>

PSAK 107: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

Paragraf PI06 dan PI12 diamendemen. Paragraf PI13 dan subjudul dihapus. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PEDOMAN IMPLEMENTASI

PSAK 107 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

...

KELAS INSTRUMEN KEUANGAN DAN LEVEL PENGUNGKAPAN (PARAGRAF 06 DAN PP01–PP03)

...

PI06. ~~PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan~~ paragraf 6C(c) ~~PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan~~ paragraf 17(e) mensyaratkan entitas untuk “memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan spesifik dalam SAK Indonesia tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.”

SIGNIFIKANSI INSTRUMEN KEUANGAN TERHADAP POSISI DAN KINERJA KEUANGAN (PARAGRAF 07–30, PP04 DAN PP05)

...

Gagal bayar dan pelanggaran (paragraf 18 dan 19)

PI12. Paragraf 18 dan 19 mensyaratkan pengungkapan jika terdapat gagal bayar atau pelanggaran atas utang pinjaman. Setiap gagal bayar atau pelanggaran dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai ~~lancar atau tidak lancar jangka pendek atau jangka panjang~~ sesuai dengan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan 201: Penyajian Laporan Keuangan*.

Total beban bunga (paragraf 20(b))

PI13. ~~Total beban bunga yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 20(b) merupakan komponen biaya keuangan di mana PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 82(b) mensyaratkan untuk disajikan terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pos untuk biaya keuangan dapat juga mencakup jumlah yang terkait dengan liabilitas nonkeuangan.~~

PI13 [dikosongkan]

PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN

Paragraf CI18 dan CI114 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

**PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN
CONTOH ILUSTRATIF**

...

PENURUNAN NILAI (BAGIAN 5.5)

PENILAIAN ATAS PENINGKATAN RISIKO KREDIT SECARA SIGNIFIKAN SEJAK PENGAKUAN AWAL

CONTOH 3—ASET KEUANGAN DENGAN AGUNAN BERNILAI TINGGI

CI18. Perusahaan H melakukan investasi pada ~~memiliki~~ aset real estat sebagai aktivitas bisnis utama (lihat PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*). Perusahaan H yang dibiayai mendanai investasinya melalui ~~dengan~~ pinjaman 5 tahun dari Bank Z dengan rasio *loan-to-value* (LTV) sebesar 50%. Pinjaman tersebut dijamin dengan sekuritas peringkat satu atas aset real estat. Pada pengakuan awal pinjaman, Bank Z tidak mempertimbangkan pinjaman menjadi pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai kredit sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan* Lampiran A.

...

REKLASIFIKASI ASET KEUANGAN (BAGIAN 5.6)

...

CONTOH 15—REKLASIFIKASI ASET KEUANGAN

...

Skenario 6: Reklasifikasi Dari Kategori Pengukuran Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Menjadi Kategori Pengukuran Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

CI114. Bank A mereklasifikasi portofolio obligasi dari kategori pengukuran diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Portofolio obligasi tetap diukur pada nilai wajar. Akan tetapi, jumlah keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*).

PSAK 113: PENGUKURAN NILAI WAJAR

Paragraph CI62 dan tabel di bawah paragraf CI62 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus.

**PSAK 113 PENGUKURAN NILAI WAJAR
CONTOH ILUSTRATIF**

...

PENGUNGKAPAN NILAI WAJAR

...

Contoh 16—Rekonsiliasi Pengukuran Nilai Wajar Yang Dikategorikan Dalam Level 3 Hierarki Nilai Wajar

...

IE62. Keuntungan dan kerugian yang dimasukkan dalam laba rugi untuk periode (di atas) disajikan dalam pos “penghasilan dari aset keuangan” ~~penghasilan keuangan~~ dan dalam pos “penghasilan dari properti investasi” ~~penghasilan nonkeuangan~~ sebagai berikut:

(Rp dalam jutaan)	<u>Penghasilan dari aset keuangan</u> Penghasilan keuangan	<u>Penghasilan dari properti investasi</u> Penghasilan nonkeuangan
Total keuntungan atau kerugian untuk periode yang tercakup dalam laba rugi	<u>(18)</u>	<u>4</u>
Perubahan dalam keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi untuk periode yang tercakup dalam laba rugi untuk aset yang dimiliki pada akhir periode pelaporan	<u>(13)</u>	<u>4</u>

(Catatan: Tabel yang serupa akan disajikan untuk liabilitas kecuali format lain dianggap lebih sesuai oleh entitas.)

PSAK 116: SEWA

Paragraphs CI09 and CI10 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PSAK 116: SEWA CONTOH ILUSTRATIF

...

PENGUNGKAPAN PENYEWA (PARAGRAF 59 DAN PP49–PP50)

CI09. Contoh 22 mengilustrasikan penyewa dengan jenis portofolio sewa yang berbeda dapat memenuhi syarat pengungkapan yang dideskripsikan dalam PSAK 116: *Sewa* paragraf 59 dan PP49 tentang pembayaran sewa variabel. Contoh ini hanya menunjukkan informasi periode kini. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi komparatif.

CI10. Contoh 23 mengilustrasikan bagaimana penyewa dengan jenis portofolio sewa yang berbeda dapat ~~mungkin~~ memenuhi syarat pengungkapan yang dideskripsikan dalam PSAK 116: *Sewa* paragraf 59 dan PP50 tentang opsi perpanjangan dan opsi penghentian. Contoh ini hanya menunjukkan informasi periode kini. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* ~~PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*~~ mengharuskan entitas menyajikan informasi komparatif.

PSAK 207: LAPORAN ARUS KAS

Contoh ilustratif yang melengkapi PSAK 207 diamendemen. Dalam contoh ilustrasi pertama (A—Laporan arus kas untuk entitas selain lembaga keuangan), judul, paragraf 01 dan 03, Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode yang berakhir 20X2, Laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun 20X2, Laporan arus kas metode langsung, Laporan arus kas metode tidak langsung, Catatan atas laporan arus kas (metode langsung dan metode tidak langsung) (khususnya, A. Memperoleh pengendalian entitas anak, D. Informasi segmen, E. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan) dan Penyajian alternatif (metode tidak langsung) diamendemen. Pada contoh ilustratif kedua (B—Laporan arus kas untuk lembaga keuangan), judul, paragraf 01, dan Laporan arus kas metode langsung diamendemen. Pada contoh ilustratif ketiga (C—Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan), paragraf 2 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

CONTOH ILUSTRATIF

...

LAPORAN ARUS KAS UNTUK ENTITAS YANG TIDAK MELAKUKAN INVESTASI PADA ASET ATAU MENYEDIAKAN PENDANAAN KEPADA PELANGGAN SEBAGAI AKTIVITAS BISNIS UTAMA BUKAN LEMBAGA KEUANGAN

01. Contoh ini hanya menampilkan jumlah periode kini. ~~Informasi komparatif Jumlah yang sesuai~~ untuk periode ~~lalu terdekat sebelumnya~~ disyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* PSAK118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

03. Informasi tambahan berikut juga relevan untuk penyusunan laporan arus kas:

- semua saham entitas anak diperoleh dengan harga Rp590. Nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas diasumsikan sebagai berikut:

	Rp
Persediaan	100
Piutang usaha <u>dan piutang lainnya</u>	100
Kas	40
Aset tetap	650
Utang usaha	100
Utang jangka panjang	200

...

- Selama periode tersebut, entitas memperoleh aset tetap dan aset hak-guna terkait aset tetap dengan ~~harga biaya perolehan agregat~~ Rp1.250, di mana Rp900 terkait aset hak-guna. Pembayaran kas sebesar Rp350 digunakan untuk membeli aset tetap.
- Depresiasi aset tetap dan amortisasi aset takberwujud untuk periode tersebut masing-masing sebesar Rp350 dan Rp100.
- Pabrik dengan biaya perolehan awal Rp80 dan akumulasi depresiasi Rp60 dijual dengan harga Rp20.
- Piutang usaha dan lainnya pada akhir 20X2 termasuk piutang bunga sebesar Rp100.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode yang berakhir 20X2^(a)

	Rp
Pendapatan Penjualan	30.650
Beban Biaya pokok penjualan	(26.450) (26.000)
Laba bruto	<u>4.200</u> 4.650
Depresiasi	(450)
Beban penjualan administratif dan penjualan	(600) (910)
<u>Beban umum dan administrasi</u>	<u>(310)</u>
<u>Laba operasi</u>	<u>3.290</u>
<u>Bagian laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama</u>	<u>50</u>
Beban bunga	(400)
Penghasilan investasi	<u>450</u> 500
<u>Kerugian selisih kurs</u>	<u>(40)</u>
<u>Laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan</u>	<u>3.750</u>
<u>Beban bunga</u>	<u>(400)</u>
<u>Kerugian selisih kurs</u>	<u>(40)</u>
Laba sebelum pajak penghasilan pajak	3.350
<u>Beban pajak penghasilan</u> Pajak penghasilan	(300)
Laba neto / <u>penghasilan komprehensif total</u>	3.050

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun 20X2

	20X2	20X1
	Rp	Rp
Aset		
<u>Aset lancar</u>		
Kas dan setara kas	230	160
Piutang usaha <u>dan piutang lainnya</u>	1.900	1.200
Persediaan	1.000	1.950
<u>Aset tidak lancar</u>		
<u>Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama</u>	<u>500</u>	<u>450</u>
<u>Investasi pada instrumen keuangan lainnya</u>	<u>2.000</u>	<u>2.050</u>
Investasi portofolio	2.500	2.500

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun 20X2

	20X2	20X1
	Rp	Rp
Aset tetap	3.730	1.910
Akumulasi depresiasi	<u>(1.450)</u>	<u>(1.060)</u>
Aset tetap (neto)	<u>1.880</u>	<u>350</u>
	<u>2.280</u>	<u>850</u>
<u>Aset takberwujud</u>	<u>400</u>	<u>500</u>
Total aset	<u>7.910</u>	<u>6.660</u>
Liabilitas		
<u>Liabilitas jangka pendek</u>		
Utang usaha	250	1.890
Utang bunga	230	100
Utang pajak penghasilan	400	1.000
<u>Liabilitas jangka panjang</u>		
Utang jangka panjang	<u>2.300</u>	<u>1.040</u>
Total liabilitas	<u>3.180</u>	<u>4.030</u>
<u>Ekuitas</u>		
Modal saham	1.500	1.250
Saldo laba	<u>3.230</u>	<u>1.380</u>
Total ekuitas	<u>4.730</u>	<u>2.630</u>
Total liabilitas dan ekuitas	<u>7.910</u>	<u>6.660</u>

Laporan arus kas: Metode langsung (paragraf 18(a))

	20X2
	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi	
Penerimaan kas dari pelanggan	30.150
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	<u>(27.600)</u>
<u>Kas dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan</u> Kas yang dihasilkan dari operasi	2.550
Pembayaran bunga	(270)
Pembayaran pajak penghasilan	<u>(900)</u>
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>1.650</u> <u>1.380</u>
Arus kas dari aktivitas investasi	
Akuisisi e Entitas a Anak X, dikurangi kas diperoleh (catatan A)	(550)
Pembelian aset tetap (catatan B)	(350)
Hasil dari penjualan peralatan	20
Penerimaan bunga	200
Penerimaan dividen	<u>200</u>
<i>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</i>	(480)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Hasil dari penerbitan modal saham	250
Hasil dari pinjaman jangka panjang	250
Pembayaran utang sewa	(90)
<u>Pembayaran bunga</u>	<u>(270)</u>
Pembayaran dividen ^(a)	<u>(1.200)</u>
<i>Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(1.060)</u> <u>(790)</u>
Kenaikan neto kas dan setara kas	110
Kas dan setara kas pada awal periode (catatan C)	<u>120</u>
Kas dan setara kas pada akhir periode (catatan C)	<u>230</u>
<small>(a) Pembayaran ini dapat juga ditampilkan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.</small>	

Laporan arus kas: Metode tidak langsung (paragraf 18(b))**20X2**

Rp

Arus kas dari aktivitas operasi

<u>Laba operasi</u>	3.290	
<u>Laba sebelum pajak</u>	3.350	
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	350450	
<u>Amortisasi</u>	100	
Kerugian selisih kurs	40	
Penghasilan investasi	(500)	
Beban bunga	400	
<u>Laba operasi sebelum depresiasi dan amortisasi</u>	3.740	
Kenaikan piutang usaha dan piutang lain	(500)	
Penurunan persediaan	1.050	
Penurunan utang usaha	(1.740)	
<u>Kas dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan</u>	2.550	
<u>Kas yang dihasilkan dari operasi</u>	2.550	
Pembayaran bunga	(270)	
Pembayaran pajak penghasilan	(900)	
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>		<u>1.650</u>
		<u>1.380</u>

Arus kas dari aktivitas investasi

Akuisisi entitas anak, dikurangi dengan perolehan kas neto diperoleh (catatan A)	(550)	
Pembelian aset tetap (catatan B)	(350)	
Hasil dari penjualan peralatan	20	
Penerimaan bunga	200	
Penerimaan dividen	200	
<i>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</i>		(480)

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Hasil dari penerbitan modal saham	250	
Hasil dari pinjaman sewa pembiayaan	250	
Pembayaran utang sewa	(90)	
<u>Pembayaran bunga</u>	(270)	

Laporan arus kas: Metode tidak langsung (paragraf 18(b))

	20X2
	Rp
Pembayaran dividen ^(a)	<u>(1.200)</u>
<i>Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(1.060)(790)</u>
Kenaikan neto kas dan setara kas	110
Kas dan setara kas pada awal periode (catatan C)	<u>120</u>
Kas dan setara kas pada akhir periode (catatan C)	<u>230</u>
<i>(a) Pembayaran ini dapat juga ditampilkan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.</i>	

CATATAN ATAS LAPORAN ARUS KAS (METODE LANGSUNG DAN METODE TIDAK LANGSUNG)**A. Perolehan pengendalian atas entitas anak**

Selama periode ini kelompok Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak Entitas Anak X. Nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	Rp
Kas	40
Persediaan	100
Piutang usaha <u>dan piutang lainnya</u>	100
Aset tetap	650
Utang usaha	(100)
Utang jangka panjang	<u>(200)</u>
Total harga beli	590
Dikurangi: Kas dari akuisisi entitas anak <u>Entitas Anak X</u> diakuisisi	<u>(40)</u>
Arus kas neto untuk memperoleh pengendalian	<u>550</u>

D. Informasi segmen

	Segmen A	Segmen B	Total
	Rp	Rp	Rp
Arus kas dari:			
Aktivitas operasi	<u>1.720</u>		<u>1.650</u>
	<u>1.520</u>	<u>(70)(440)</u>	<u>1.380</u>
Aktivitas investasi	(640)	160	(480)
Aktivitas pendanaan	<u>(770)(570)</u>	<u>(290)(220)</u>	<u>(1.060)(790)</u>
	<u>310</u>	<u>(200)</u>	<u>110</u>

E. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

	20X1	Arus kas	Perubahan nonkas			20X2
			<u>Beban bunga</u>	Akuisisi	Sewa baru	
Pinjaman jangka panjang	1.040	250	=	200	–	1.490
Liabilitas sewa	–	(90)	=	–	900	810
Utang jangka panjang	1.040	160	=	200	900	2.300
<u>Utang bunga</u>	<u>100</u>	<u>(270)</u>	<u>400</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>230</u>
	<u>1.140</u>	<u>(110)</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>900</u>	<u>2.530</u>

Alternatif penyajian (metode tidak langsung)

Sebagai alternatif, dalam laporan arus kas dengan metode tidak langsung, laba operasi sebelum perubahan modal kerja kadang-kadang disajikan sebagai berikut:

	Rp
<u>Penjualan</u> Pendapatan di luar penghasilan investasi	30.650
<u>Biaya pokok penjualan</u>	<u>(26.000)</u>
<u>Beban penjualan</u>	<u>(600)</u>
<u>Beban umum dan administrasi</u>	<u>(310)</u>
<u>Biaya operasi di luar depresiasi</u>	<u>(26.910)</u>
Laba operasi <u>sebelum depresiasi dan amortisasi</u> sebelum perubahan modal kerja	3.740

B. LAPORAN ARUS KAS UNTUK ENTITAS YANG MELAKUKAN INVESTASI PADA ASET ATAU MENYEDIAKAN PENDANAAN KEPADA PELANGGAN SEBAGAI AKTIVITAS BISNIS UTAMA LEMBAGA KEUANGAN

01. Contoh ini hanya menampilkan jumlah periode berjalan. ~~Jumlah Informasi~~ komparatif untuk periode terdekat sebelumnya disajikan sesuai dengan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan*.

...

Laporan arus kas: Metode langsung (paragraf 18(a))

20X2

Rp

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan bunga ^(a) dan komisi	28.747	
	<u>28.447</u>	
Pembayaran bunga ^(a)	(23.463)	
<u>Penerimaan dividen^(a)</u>	<u>200</u>	
Pembayaran piutang Penerimaan dari pinjaman yang sebelumnya telah dihapus	237	
Pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok	(997)	
	<u>4.224</u>	
<i>(Kenaikan) penurunan dalam aset operasi:</i>		
Dana jangka pendek	(650)	
Deposito yang dimiliki untuk tujuan pengendalian moneter	234	
Dana uang muka kepada pelanggan	(288)	
Kenaikan bersih neto piutang kartu kredit	(360)	
Efek jangka pendek lain yang diperjualbelikan	(120)	
<i>Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:</i>		
Deposito <u>Deposit</u> dari pelanggan	600	
Sertifikat deposito yang diperjualbelikan	<u>(200)</u>	
Kas neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	<u>3.940</u>	
	<u>3.440</u>	
<u>Pembayaran</u> pajak penghasilan	<u>(100)</u>	
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>		<u>3.840</u>
		<u>3.340</u>

Arus kas dari aktivitas investasi

Pelepasan Entitas Anak Y	50	
Dividen yang diterima	200	
Bunga yang diterima	300	
Hasil penjualan efek yang tidak diperjualbelikan	1.200	
Pembelian efek yang tidak diperjualbelikan	(600)	
Pembelian aset tetap	<u>(500)</u>	
<i>Kas neto dari aktivitas investasi</i>		<u>150650</u>

Laporan arus kas: Metode langsung (paragraf 18(a))

		20X2
		Rp
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerbitan modal pinjaman	1.000	
Penerbitan saham preferen oleh entitas anak	800	
Pelunasan pinjaman jangka panjang	(200)	
Penurunan neto pinjaman lain	(1.000)	
Pembayaran dividen	(400)	
<i>Kas neto dari aktivitas pendanaan</i>		200
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas		600
Kenaikan neto kas dan setara kas		4.790
Kas dan setara kas pada awal periode		4.050
Kas dan setara kas pada akhir periode		8.840
<u>(a) Entitas mengklasifikasikan masing-masing arus kas dalam satu kategori.</u>		

C. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

...

02. Contoh ini hanya menunjukkan jumlah periode berjalan. Informasi komparatif jumlah periode terdekat sebelumnya disyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan.

PSAK 208: *KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN KESALAHAN*

Judul PSAK 208 diubah. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

PSAK 208: DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN~~KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN KESALAHAN~~

Catatan kaki ditambahkan pada judul “PT Beta Disarikan dari laporan ~~laba rugi dan~~ penghasilan komprehensif ~~lain~~” pada Contoh 1- Penyajian kembali retrospektif atas kesalahan. Teks baru digarisbawah.

* Laporan penghasilan komprehensif ini tidak bertujuan untuk mengilustrasikan persyaratan dalam PSAK 118 untuk struktur laporan laba rugi.

PSAK 232: INSTRUMEN KEUANGAN: PENYAJIAN

Paragraf CI32, Contoh 7 pada paragraf CI32, paragraf CI33 dan Contoh 8 pada paragraf CI33 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

**PSAK 232: INSTRUMEN KEUANGAN: PENYAJIAN
CONTOH ILUSTRATIF**

...

**ENTITAS SEPERTI REKSA DANA DAN KOPERASI YANG MODAL SAHAMNYA BUKAN EKUITAS
SEBAGAIMANA YANG DIDEFINISIKAN DALAM PSAK 232**

Contoh 7: Entitas tanpa ekuitas

CI32. Contoh berikut mengilustrasikan format laporan ~~laba rugi dan penghasilan komprehensif lain~~ dan laporan posisi keuangan yang dapat digunakan entitas seperti reksa dana yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 232 dan yang tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama. Penggunaan format lain diperkenankan.

Laporan ~~laba rugi dan penghasilan komprehensif lain~~ untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1

	20X1	20X0
	Rp	Rp
Pendapatan	2.956	1.718
Beban (diklasifikasikan berdasarkan sifat atau fungsi, sesuai dengan PSAK 118)	<u>(644)</u>	<u>(614)</u>
<u>Laba operasi/laba sebelum pendanaan</u> Laba dari aktivitas operasi	2.312	1.104
Biaya keuangan		
<u>Beban bunga—biaya keuangan lain</u>	(47)	(47)
<u>Distribusi—distribusi kepada pemilik</u>	<u>(50)</u>	<u>(50)</u>
Perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik	<u>2.215</u>	<u>1.007</u>

Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X1

	20X1		20X0	
	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET				
Aset tidak lancar (diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 118 PSAK 201)	<u>91.374</u>		<u>78.484</u>	
Total aset lancar		91.374		78.484
Aset lancar (diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 118 PSAK 201)	<u>1.422</u>		<u>1.769</u>	
Total aset lancar		<u>1.422</u>		<u>1.769</u>
Total aset		92.796		80.253

Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X1

	20X1		20X0	
	Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS				
Liabilitas jangka pendek (diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 118 PSAK 201)	647		66	
Total liabilitas jangka pendek		(647)		(66)
Liabilitas jangka panjang kecuali selain aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik (diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 118 PSAK 201)	280		136	
		(280)		(136)
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik		91.869		80.051

Contoh 8: Entitas dengan ekuitas tertentu

CI33. Contoh berikut mengilustrasikan format laporan ~~laba rugi dan penghasilan komprehensif lain~~ dan laporan posisi keuangan yang dapat digunakan entitas yang tidak menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama dan yang berdasarkan PSAK 232, modal sahamnya bukan merupakan ekuitas. Modal saham entitas tidak diklasifikasikan sebagai ekuitas karena entitas tersebut memiliki kewajiban sewaktu-waktu untuk menebus modal sahamnya sesuai permintaan pemegangnya, tetapi tidak mempunyai seluruh fitur atau memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Penggunaan format lain diperkenankan.

Laporan ~~laba rugi dan penghasilan komprehensif lain~~ untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1

	20X1	20X0
	Rp	Rp
Pendapatan	472	498
Beban (diklasifikasikan berdasarkan sifat atau fungsi, <u>sesuai dengan PSAK 118</u>)	(367)	(396)
Laba operasi/ <u>laba sebelum pendanaan</u>	105	102
Biaya keuangan		
<u>Beban bunga—biaya keuangan lain</u>	(4)	(4)
<u>Distribusi—distribusi kepada anggota</u>	(50)	(50)
Perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik	51	48

Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X1

	20X1		20X0	
	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET				
Aset tidak lancar (diklasifikasikan sesuai dengan <u>PSAK 118</u> PSAK 201)	908		830	
Total aset tidak lancar		908		830
Aset lancar (diklasifikasikan sesuai dengan <u>PSAK 118</u> PSAK 201)	383		350	
Total aset lancar		383		350
Total aset		1.291		1.180
LIABILITAS				
Liabilitas jangka pendek (diklasifikasikan sesuai dengan <u>PSAK 118</u> PSAK 201)	372		338	
Modal saham yang dapat ditebus	202		161	
Total liabilitas jangka pendek		(574)		(499)
Total aset dikurangi liabilitas jangka pendek		717		681
Liabilitas jangka panjang (diklasifikasikan sesuai dengan <u>PSAK 118</u> PSAK 201)	187		196	
		(187)		(196)
KOMPONEN EKUITAS LAIN^(a)				
Cadangan sebagai contoh surplus revaluasi, saldo laba dan lain-lain	530		485	
		530		485
		717		681
NOTA MEMORANDUM – Total kepentingan anggota				
Modal saham yang dapat ditebus		202		161
Cadangan		530		485
		732		646

PSAK 241: AGRIKULTUR

Contoh 1 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

CONTOH ILUSTRATIF

Contoh-contoh ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK 241. Contoh ini telah dimutakhirkan dengan perubahan yang diakibatkan oleh PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

...

CONTOH 1 PETERNAKAN SAPI PERAH XYZ

...

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Pernakan Sapi Perah XYZ Laporan penghasilan komprehensif	Catatan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1
Nilai wajar susu yang diproduksi		518.240
Keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual ternak sapi perah	3	39.930
		<u>558.170</u>
Persediaan yang digunakan		(137.523)
<u>Imbalan kerja</u> Biaya pegawai		<u>(207.283)</u> (127.283)
Beban depresiasi		(15.250)
<u>Beban jasa profesional</u>		<u>(98.847)</u>
Beban operasi lain		<u>(18.245)</u> (197.092)
		<u>(477.148)</u>
<u>Laba operasi/laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan</u>		81.022
Beban pajak penghasilan		(43.194)
<u>Laba/Penghasilan komprehensif tahun berjalan total</u>		<u>37.828</u>

Laporan Perubahan Ekuitas

Peternakan Sapi Perah XYZ Laporan perubahan ekuitas	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1		
	Modal saham	Saldo laba	Total
Saldo per 1 Januari 20X1	1.000.000	865.000	1.865.000
<u>Laba/penghasilan komprehensif tahun berjalan total</u>		37.828	37.828
Saldo per 31 Desember 20X1	1.000.000	902.828	1.902.828

Laporan Arus Kas

Peternakan Sapi Perah XYZ Laporan arus kas	Catatan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan kas dari penjualan susu		498.027
Penerimaan kas dari penjualan ternak sapi perah		97.913
Pembayaran kas untuk perlengkapan dan karyawan		(460.831)
Pembayaran kas untuk pembelian ternak sapi perah		<u>(23.815)</u>
<u>Arus kas dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan</u>		111.294
<u>Pembayaran Pajak penghasilan</u>		<u>(43.194)</u>
Kas neto dari aktivitas operasi		68.100
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap		(68.100)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(68.100)
Kenaikan neto kas		0
Kas pada awal periode tahun		10.000
Kas pada akhir periodetahun		10.000

Catatan kaki pada "Laporan penghasilan komprehensif" dalam Contoh 1 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Laporan laba rugi penghasilan komprehensif ini menyajikan analisis beban yang diklasifikasikan dalam kategori operasi menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat beban. PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ~~PSAK 201 Penyajian Laporan Keuangan~~ mensyaratkan entitas, dalam kategori operasi, mengklasifikasikan dan menyajikan beban dengan cara yang menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna dari beban dengan menggunakan sifat beban dan fungsinya dalam entitas untuk menyajikan, baik dalam laporan

~~laba rugi komprehensif atau dalam catatan, analisis beban menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas. PSAK 201 menganjurkan penyajian analisis beban dalam laporan penghasilan komprehensif.~~

Draf EKSPOSUR

**ISAK 101: PERUBAHAN ATAS LIABILITAS AKTIVITAS PURNAOPERASI, RESTORASI,
DAN LIABILITAS SERUPA**

Paragraf CI04 dan CI05 dari Contoh 1 dan paragraf CI13 dari Contoh 3 yang melengkapi ISAK 101 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

CONTOH ILUSTRATIF

...

Contoh 1: Model biaya

...

CI04. Setelah penyesuaian, jumlah tercatat aset adalah Rp82.000 (Rp120.000 – Rp8.000 – Rp30.000), yang akan didepresiasi selama sisa umur manfaat 30 tahun sehingga beban depresiasi untuk tahun berikutnya sebesar Rp2.733 (Rp82.000/30). Peningkatan liabilitas biaya keuangan tahun berikutnya dari pembalikan dampak diskonto untuk (*unwinding of the discount*) menjadi Rp415 (Rp8.300 x 5%).

CI05. Jika perubahan liabilitas yang dihasilkan dari perubahan tingkat diskonto, bukan akibat perubahan estimasi arus kas, maka akuntansi untuk perubahan tersebut akan sama tetapi peningkatan liabilitas biaya keuangan untuk tahun berikutnya dari pembalikan dampak diskonto untuk *unwinding the discount* akan mencerminkan tingkat diskonto yang baru.

Contoh 3: Transisi

CI13. Contoh berikut mengilustrasikan penerapan retrospektif dari Interpretasi bagi penyusun yang ~~sia~~ telah menerapkan SAK Indonesia. Penerapan restrospektif disyaratkan dalam PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Contoh ini mengasumsikan entitas:

...

ISAK 112: PERJANJIAN KONSESI JASA

Menambahkan catatan kaki pada “Tabel 1.5 *Laporan laba rugi komprehensif (rupiah)*” dalam Contoh 1, “Tabel 2.5 *Laporan laba rugi komprehensif (rupiah)*” dalam Contoh 2 dan “Tabel 3.8 *Laporan laba rugi komprehensif (rupiah)*” dalam Contoh 3 yang melengkapi ISAK 112. Teks baru digarisbawah.

- * Laporan penghasilan komprehensif tidak bertujuan untuk mengilustrasikan persyaratan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* untuk struktur laporan laba rugi.

PANDUAN PRAKTIK SAK – MEMBUAT PERTIMBANGAN MATERIALITAS

Paragraf 5, 73, 88A, 88D–88E dan 88G diamendemen. Contoh P, Contoh S, Contoh T, Diagram 2 and dan Lampiran juga diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret. Catatan kaki pada teks tidak dituliskan kembali. Amendemen atas catatan kaki disajikan setelah amendemen Panduan Praktik ini.

KARAKTERISTIK UMUM MATERIALITAS

Definisi Material

5. *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (Kerangka Konseptual) memberikan definisi informasi material sebagai berikut (PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Lampiran A* dan paragraf PP01 PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 07 memberikan definisi serupa):

TOPIK TERTENTU

...

Kesalahan

...

73. Entitas harus mengoreksi seluruh kesalahan material, serta kesalahan tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas, untuk memastikan kepatuhan terhadap SAK. Entitas merujuk pada PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk panduan tentang bagaimana mengoreksi kesalahan.

...

Informasi Tentang Kovenan

...

Contoh P—menilai apakah informasi tentang perjanjian bersifat material

...

Penerapan

...

PSAK 118 paragraf PP106 PSAK 201 paragraf 76ZA mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan, dalam keadaan tertentu, informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas jangka panjang dengan kovenan harus dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan

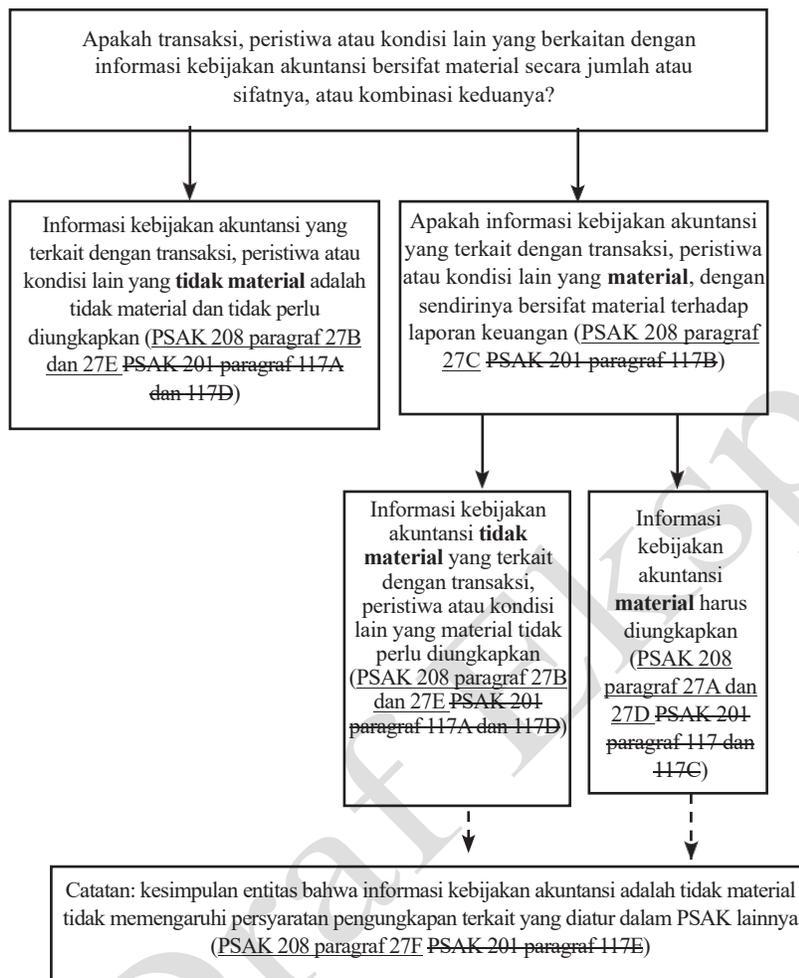
...

Informasi tentang kebijakan akuntansi

88A. PSAK 208 paragraf 27A ~~PSAK 201 paragraf 117~~ mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material.

...

Diagram 2—menentukan apakah informasi kebijakan akuntansi material



88D. PSAK 208 paragraf 27C ~~PSAK 201 paragraf 117B~~ mencakup contoh keadaan di mana suatu entitas kemungkinan mempertimbangkan informasi kebijakan akuntansi menjadi material bagi laporannya. Daftar tersebut tidak menyeluruh, namun memberikan panduan kapan entitas umumnya akan mempertimbangkan informasi kebijakan akuntansi bersifat material.

88E. PSAK 208 paragraf 27D ~~PSAK 201 paragraf 117C~~ mendeskripsikan jenis informasi kebijakan akuntansi material yang menurut pengguna laporan keuangan paling berguna. Pengguna umumnya menganggap informasi tentang karakteristik atas transaksi, peristiwa atau kondisi lain entitas—informasi spesifik-entitas—lebih berguna daripada pengungkapan yang hanya mencakup informasi terstandarisasi, atau informasi yang menduplikasi atau meringkas persyaratan SAK. Informasi kebijakan akuntansi spesifik-entitas sangat berguna ketika informasi tersebut berkaitan dengan suatu bidang di mana entitas telah melaksanakan pertimbangannya—sebagai contoh, ketika entitas menerapkan suatu PSAK secara berbeda dari entitas serupa dalam industri yang sama.

88G. ~~PSAK 208 paragraf 27E~~ ~~PSAK 201 paragraf 117D~~ menyatakan bahwa jika suatu entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material, informasi tersebut tidak boleh mengaburkan informasi material. Paragraf 56–59 memberikan panduan tentang bagaimana mengomunikasikan informasi secara jelas dan ringkas dalam laporan keuangan.

Contoh S—membuat pertimbangan materialitas dan berfokus pada informasi spesifik-entitas dengan menghindari informasi kebijakan akuntansi terstandarisasi (*boilerplate*)

...

Penerapan

...

Entitas mengevaluasi dampak pengungkapan informasi kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan keberadaan faktor kualitatif. Entitas mencatat bahwa kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan:

...

- (c) tidak dikembangkan sesuai dengan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* dalam hal tidak ada suatu PSAK yang berlaku secara spesifik; dan

...

Contoh T—membuat pertimbangan materialitas atas informasi kebijakan akuntansi yang hanya menduplikasi persyaratan dalam SAK

...

Penerapan

...

Namun, kebijakan akuntansi penurunan nilai entitas berkaitan dengan suatu bidang di mana entitas disyaratkan untuk membuat pertimbangan atau asumsi signifikan, sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 208 paragraf 27G dan 31A ~~PSAK 201 paragraf 122 dan 125~~. Mempertimbangkan keadaan spesifik entitas, entitas menyimpulkan bahwa informasi tentang pertimbangan dan asumsi signifikan yang berkaitan dengan penilaian penurunan nilai diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan entitas. Entitas mencatat bahwa pengungkapan mengenai pertimbangan dan asumsi signifikan telah mencakup informasi mengenai pertimbangan dan asumsi signifikan yang digunakan dalam penilaian penurunan nilai.

...

LAMPIRAN
REFERENSI TERHADAP KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN DAN
SAK INDONESIA

...
Kutipan dari PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf 07

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 05, 41 dan 60

Material:

Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

Materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan.

Paragraf 07

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 06

Penilaian apakah informasi diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum entitas pelapor tertentu, mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan karakteristik dari pengguna laporan tersebut dan juga mempertimbangkan keadaan entitas itu sendiri. [...] Kadang-kadang, bahkan pengguna yang terinformasi dan tekun mungkin perlu mencari bantuan penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks.

Paragraf 15

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 62

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual). Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Paragraf 17

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 10

Dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk:

- (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. PSAK 208 mengatur hirarki panduan otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara spesifik mengatur untuk suatu pos.
- (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

- ~~(e) menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa lain dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.~~

Paragraf 15

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 58

Untuk mencapai tujuan laporan keuangan (lihat paragraf 09), entitas menyajikan informasi dalam laporan keuangan utama dan mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas hanya perlu menyajikan atau mengungkapkan informasi material (lihat paragraf 19 dan PP01-PP05).

Paragraf 16

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 58

Peran laporan keuangan utama adalah untuk menyediakan ringkasan terstruktur atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang diakui entitas pelapor, yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk:

- (a) memperoleh tinjauan terpahami atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang diakui entitas;**
- (b) membuat perbandingan antarentitas, dan antarperiode pelaporan untuk entitas yang sama; dan**
- (c) mengidentifikasi unsur atau aspek di mana pengguna laporan keuangan mungkin ingin mendapatkan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan.**

Paragraf 17

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 58

Peran catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi material yang dibutuhkan:

- (a) untuk membuat pengguna laporan keuangan memahami pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama (lihat paragraf PP06); dan**
- (b) untuk melengkapi laporan keuangan utama dengan informasi tambahan untuk mencapai tujuan laporan keuangan (lihat paragraf PP07).**

Paragraf 18

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 58

Entitas menggunakan peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan, yang dijelaskan dalam paragraf 16-17, untuk menentukan apakah akan menyertakan informasi dalam laporan keuangan utama atau dalam catatan atas laporan keuangan. Peranan yang berbeda dari laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan berarti bahwa tingkat informasi yang disyaratkan dalam catatan atas laporan keuangan berbeda dari yang ada dalam laporan keuangan utama. Perbedaan tersebut berarti bahwa:

- (a) untuk menyediakan ringkasan terstruktur yang dijelaskan dalam paragraf 16, informasi yang disediakan dalam laporan keuangan utama lebih teragregasi daripada informasi yang disediakan dalam catatan atas laporan keuangan; dan**
- (b) untuk menyediakan informasi yang dijelaskan dalam paragraf 17, informasi lebih rinci atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas, termasuk *disagregasi* informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, disediakan dalam catatan atas laporan keuangan.**

Paragraf 19

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 10

PSAK atau ISAK tertentu dalam SAK Indonesia menentukan informasi yang disyaratkan untuk disajikan dalam laporan keuangan utama atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak perlu menyediakan penyajian atau pengungkapan spesifik yang disyaratkan SAK Indonesia jika informasi yang dihasilkan dari penyajian atau pengungkapan tersebut tidak material. Hal ini juga berlaku meskipun SAK Indonesia mencakup daftar persyaratan spesifik atau mendeskripsikannya sebagai persyaratan minimum.

Paragraf 20

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 10

Entitas mempertimbangkan untuk menyediakan pengungkapan tambahan ketika kepatuhan atas persyaratan spesifik dari SAK Indonesia tidak cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi, kejadian dan kondisi lain terhadap laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Paragraf 41

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 28, 57 dan 69

Untuk tujuan Pernyataan ini, suatu unsur adalah aset, liabilitas, instrumen atau cadangan ekuitas, penghasilan, beban, atau arus kas, atau agregasi atau disagregasi atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, atau arus kas tersebut. Suatu pos adalah unsur yang disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan utama. Informasi material lain mengenai unsur diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kecuali jika penerapan hal tersebut akan menafikan persyaratan spesifik agregasi atau disagregasi dalam SAK Indonesia, maka entitas (lihat paragraf PP16–PP23):

- (a) mengklasifikasikan dan mengagregasikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban atau arus kas ke dalam unsur berdasarkan kesamaan karakteristik;**
- (b) mendisagregasikan unsur berdasarkan karakteristik yang tidak sama;**
- (c) mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur untuk menyajikan pos dalam laporan keuangan utama yang memenuhi peran laporan keuangan utama dalam memberikan ringkasan terstruktur berguna (lihat paragraf 16);**
- (d) mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur untuk mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memenuhi peran catatan atas laporan keuangan dalam memberikan informasi material (lihat paragraf 17); dan**
- (e) memastikan bahwa agregasi dan disagregasi dalam laporan keuangan tidak mengaburkan informasi material (lihat paragraf PP03).**

Paragraf 42

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 43

Dengan menerapkan prinsip dalam paragraf 41, entitas mendisagregasikan unsur ketika informasi yang dihasilkan material. Jika, dengan menerapkan paragraf 41(c), entitas tidak menyajikan informasi material dalam laporan keuangan utama, maka entitas mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf PP79 dan PP111 memerinci contoh penghasilan, beban, aset, liabilitas, dan unsur ekuitas yang mungkin memiliki karakteristik cukup takserupa sehingga penyajiannya dalam laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk menyediakan informasi material.

Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas item serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri item yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material.

Paragraf 30A

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 28, 57 dan 69

Ketika menerapkan Pernyataan ini dan SAK, entitas menentukan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang terkait, bagaimana entitas menggabungkan informasi dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak mengurangi keterpahaman atas laporan keuangan dengan mengaburkan informasi material dengan informasi tidak material atau dengan menggabungkan item material yang memiliki sifat atau fungsi berbeda.

Paragraf 31

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 10

SAK menentukan informasi yang disyaratkan untuk dicakup dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu PSAK jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material. Hal ini juga berlaku meskipun PSAK tersebut mencakup daftar persyaratan spesifik atau mendeskripsikannya sebagai persyaratan minimum. Entitas juga mempertimbangkan untuk memberikan pengungkapan tambahan jika pemenuhan atas persyaratan spesifik dari suatu PSAK tidak cukup membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa lain dan kondisi lain terhadap laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Paragraf 31~~38~~

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 67 dan 70

Kecuali jika SAK Indonesia memperkenankan atau mensyaratkan lain, entitas menyediakan informasi komparatif (yakni, informasi untuk periode pelaporan lalu terdekat) untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode kini. Entitas memasukkan informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif jika diperlukan untuk pemahaman atas laporan keuangan periode kini (lihat paragraf PP13).

Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Entitas menyajikan informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Paragraf 32~~38A~~

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 67

Entitas menyajikan pelaporan periode kini dan periode lalu terdekat dalam setiap laporan keuangan utama dan dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf PP14-PP15 mengatur persyaratan terkait tambahan informasi komparatif.

Entitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait.

Lampiran A

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 5, 41, dan 60

informasi material:

Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu

Paragraf PP02

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 05, 41, dan 60

Materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan.

Paragraf PP04

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 06

Penilaian apakah informasi diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum entitas pelapor tertentu mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan karakteristik dari pengguna laporan tersebut dan juga mempertimbangkan keadaan entitas itu sendiri.

Paragraf PP05

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 06

...Kadang-kadang, bahkan pengguna yang berpengetahuan luas dan tekun mungkin perlu mencari bantuan penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks.

Paragraf PP1438C

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 69

Entitas dapat menyediakan informasi komparatif sebagai tambahan atas informasi komparatif yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan SAK Indonesia. Informasi komparatif tambahan ini dapat terdiri dari satu atau lebih laporan keuangan utama yang dirujuk dalam paragraf 10, tetapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Dalam kasus ini, entitas mengungkapkan informasi untuk laporan keuangan utama tambahan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang dirujuk pada paragraf 10, tetapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut.

Paragraf 117

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88A dan 88C

Entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material (lihat paragraf 07). Informasi kebijakan akuntansi adalah material jika, ketika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang tercakup dalam laporan keuangan entitas, informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut.

Paragraf 117A

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C

Informasi kebijakan akuntansi yang terkait dengan transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang tidak material adalah tidak material dan tidak perlu diungkapkan. Namun demikian, informasi kebijakan akuntansi mungkin material karena sifat dari transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang terkait, meskipun jika jumlahnya tidak material. Namun, tidak semua informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material adalah dengan sendirinya material.

Paragraf 117B

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C dan 88D

Informasi kebijakan akuntansi diperkirakan menjadi material jika pengguna laporan keuangan entitas membutuhkannya untuk memahami informasi material lainnya dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, suatu entitas kemungkinan mempertimbangkan informasi kebijakan akuntansi material untuk laporan keuangannya jika informasi tersebut berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material, dan:

- (a) entitas mengubah kebijakan akutansinya selama periode pelaporan dan perubahan ini mengakibatkan perubahan material terhadap informasi dalam laporan keuangan;
- (b) entitas memilih kebijakan akuntansi dari satu atau lebih opsi yang diizinkan oleh SAK—situasi tersebut dapat timbul jika entitas memilih untuk mengukur properti investasi pada biaya historis daripada nilai wajar;
- (c) kebijakan akuntansi dikembangkan sesuai dengan PSAK 208 dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku;
- (d) kebijakan akuntansi berkaitan dengan bidang yang entitas disyaratkan untuk membuat pertimbangan atau asumsi yang signifikan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, dan entitas mengungkapkan pertimbangan atau asumsi tersebut sesuai dengan paragraf 122 dan 125; atau
- (e) akuntansi yang disyaratkan untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain tersebut bersifat kompleks dan pengguna laporan keuangan entitas tidak akan memahami transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang material tersebut—situasi tersebut dapat timbul jika entitas menerapkan lebih dari satu PSAK pada suatu kelas transaksi material.

Paragraf 117C

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C dan 88E

Informasi kebijakan akuntansi yang berfokus pada bagaimana suatu entitas telah menerapkan persyaratan dalam SAK untuk keadaanya sendiri memberikan informasi spesifik entitas yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan daripada informasi terstandarisasi, atau informasi yang hanya menduplikasi atau meringkas persyaratan dalam SAK.

Paragraf 117D

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C dan 88G

Jika entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material, maka informasi tersebut tidak boleh mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

Paragraf 117E

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C

Kesimpulan entitas bahwa informasi kebijakan akuntansi adalah tidak material tidak memengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang ditetapkan dalam PSAK lainnya.

**KUTIPAN DARI PSAK 208: DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN KESALAHAN**

Paragraf 05

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 72 dan 78

Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:

- (a) tersedia ketika laporan keuangan untuk periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
- (b) diperkirakan secara wajar dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Paragraf 06A

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 62

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual). Penerapan SAK Indonesia, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian wajar laporan keuangan.

Paragraf 06C

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 10

Dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian wajar dengan memenuhi SAK Indonesia terkait. Penyajian wajar juga mensyaratkan entitas untuk:

- (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan Pernyataan ini. Pernyataan ini mengatur hierarki pedoman otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara spesifik mengatur suatu unsur.
- (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, terbandingkan, dan terpahami.
- (c) menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dalam SAK Indonesia tidak cukup memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain pada posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas

Paragraf 08

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 08

SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan tidak material dari SAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas.

Paragraf 27A

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88A dan 88C

Entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material (lihat paragraf 05). Informasi kebijakan akuntansi adalah material jika ketika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang tercakup dalam laporan keuangan entitas, informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum yang dibuat atas dasar laporan keuangan tersebut.

Paragraf 27B

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C

Informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak material adalah tidak material dan tidak perlu diungkapkan. Namun demikian, informasi kebijakan akuntansi dapat menjadi material karena sifat dari transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang terkait, meskipun jumlahnya tidak material. Namun, tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material dengan sendirinya adalah material.

Paragraf 27C

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C dan 88D

Informasi kebijakan akuntansi diperkirakan menjadi material jika pengguna laporan keuangan entitas akan membutuhkannya untuk memahami informasi material lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Sebagai contoh, suatu entitas kemungkinan mempertimbangkan informasi kebijakan akuntansi material untuk laporan keuangannya jika informasi tersebut berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material dan:

- (a) entitas mengubah kebijakan akuntansinya selama periode pelaporan dan perubahan ini mengakibatkan perubahan material terhadap informasi dalam laporan keuangan;
- (b) entitas memilih kebijakan akuntansi dari satu atau lebih opsi yang diizinkan oleh SAK Indonesia - situasi tersebut dapat timbul jika entitas memilih untuk mengukur properti investasi pada biaya historis daripada nilai wajar;
- (c) kebijakan akuntansi telah dikembangkan sesuai dengan Pernyataan ini dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku;
- (d) kebijakan akuntansi berkaitan dengan bidang di mana entitas disyaratkan untuk membuat pertimbangan atau asumsi signifikan dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dan entitas mengungkapkan pertimbangan atau asumsi tersebut sesuai dengan paragraf 27G dan 31A; atau
- (e) akuntansi yang disyaratkan untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain tersebut bersifat kompleks dan pengguna laporan keuangan entitas tidak akan memahami transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material tersebut - situasi tersebut dapat timbul jika entitas menerapkan lebih dari satu PSAK atas suatu kelas transaksi material.

Paragraf 27D

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C dan 88E

Informasi kebijakan akuntansi yang berfokus pada bagaimana entitas telah menerapkan persyaratan dalam SAK Indonesia untuk keadaan entitas itu sendiri menyediakan informasi spesifik entitas yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan daripada informasi terstandarisasi, atau informasi yang hanya menduplikasi atau meringkas persyaratan dalam SAK Indonesia.

Paragraf 27E

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C dan 88G

Jika entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material, maka informasi tersebut tidak boleh mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

Paragraf 27F

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 88C

Kesimpulan entitas bahwa informasi kebijakan akuntansi adalah tidak material tidak memengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang diatur dalam PSAK lainnya.

Paragraf 41

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 73

Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan elemen laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Akan tetapi, kesalahan material kadangkala tidak ditemukan sampai periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebelumnya dikoreksi pada informasi komparatif yang disajikan pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut (lihat paragraf 42–47).

KUTIPAN DARI PSAK 234: LAPORAN KEUANGAN INTERIM

...

Paragraf 20

Merujuk pada Panduan Praktik paragraf 85

Laporan keuangan interim mencakup laporan keuangan interim (ringkas atau lengkap) untuk periode sebagai berikut:

- (a) laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan dan laporan posisi keuangan komparatif per akhir tahun buku terdekat sebelumnya.
- (b) laporan kinerja keuangan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode interim berjalan dan secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim, dengan laporan kinerja keuangan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode interim yang dapat dibandingkan (periode berjalan dan awal tahun buku sampai tanggal pelaporan) dari tahun buku terdekat sebelumnya. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK 118 PSAK 201, laporan interim dapat menyajikan untuk setiap periode laporan kinerja keuangan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain baik digabung maupun dipisah.
- (c) laporan perubahan ekuitas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim, dengan laporan perubahan ekuitas komparatif untuk periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya.
- (d) laporan arus kas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim, dengan laporan arus kas komparatif untuk periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya.

...

Pada paragraf 5, catatan kaki pada akhir kalimat pertama diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

* Lihat PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Lampiran A dan paragraf PP02 PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 07.

Pada paragraf 6, catatan kaki pada akhir paragraf diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 118 Lampiran A dan paragraf PP04 PSAK 201 paragraf 07.

Pada paragraf 8, catatan kaki pada akhir paragraf diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 08.

Pada paragraf 10, catatan kaki pada akhir paragraf diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 208 paragraf 6C(c) dan PSAK 118 paragraf 19-20 PSAK 201 paragraf 17(e) dan 31.

Pada paragraf 28, catatan kaki pada akhir paragraf diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 118 paragraf 41 PSAK 201 paragraf 30A.

Pada paragraf 41, catatan kaki pada akhir kalimat pertama diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 118 Lampiran A dan paragraf PP02 PSAK 201 paragraf 07.

Pada paragraf 43, catatan kaki setelah “seberapa rinci informasi tersebut” diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 118 paragraf 42 PSAK 201 paragraf 29.

Pada paragraf 57, catatan kaki setelah “dikaburkan” diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 118 paragraf 41 PSAK 201 paragraf 30A.

Pada paragraf 60, catatan kaki setelah “informasi lain, adalah material” diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 118 Lampiran A dan paragraf PP02 PSAK 201 paragraf 7.

Pada paragraf 62(d), catatan kaki tambahan pada akhir subparagraf diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 208 paragraf 6A PSAK 201 paragraf 15.

Pada paragraf 67, catatan kaki pada akhir kalimat pertama, kedua, ketiga dan keempat diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Kecuali jika SAK Indonesia mengizinkan atau mensyaratkan sebaliknya. Lihat PSAK 118 paragraf 31 PSAK 201 paragraf 38.

† Lihat PSAK 118 paragraf 31 PSAK 201 paragraf 38.

‡ Lihat PSAK 118 paragraf 32 PSAK 201 paragraf 38A.

§ PSAK 118 paragraf 10(g) PSAK 201 paragraf 10(f) juga mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali item-item dalam laporan keuangannya secara

retrospektif, atau ketika entitas mereklasifikasi item-item dalam laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 118 ~~paragraf 37-40 PSAK 201 paragraf 40A-40D~~.

Pada paragraf 69, catatan kaki setelah “dengan SAK” dan catatan kaki pada akhir kalimat ketiga diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 118 paragraf PP14 ~~PSAK 201 paragraf 38~~.
- Lihat PSAK 118 paragraf 41 ~~PSAK 201 paragraf 30A~~.

Pada paragraf 70, catatan kaki setelah “laporan keuangan periode berjalan” diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

- * Lihat PSAK 118 paragraf 31 ~~PSAK 201 paragraf 38~~.

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan merupakan bagian dari, Draf Eksposur PSAK 118.

Draf Eksposur PSAK 118 menggantikan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan. Ketika PSAK 201 direvisi pada tahun 2018, PSAK 201 dilengkapi dengan Dasar Kesimpulan yang meringkas pertimbangan DSAK IAI dalam mengambil keputusan dalam revisi PSAK tersebut. Untuk kemudahan, DSAK IAI menyertakan paragraf dalam Dasar Kesimpulan PSAK 201 yang tidak dipertimbangkan kembali, dan Dasar Kesimpulan tersebut diberi nomor yang diawali DKZ. Dalam paragraf tersebut, referensi silang ke PSAK 201 dimutakhirkan ke paragraf terkait dalam Draf Eksposur PSAK 118 dan dilakukan perubahan editorial minor yang diperlukan.

Judul Laporan Keuangan (paragraf 11)

DK01. Pada tahun 2018, DSAK IAI menerbitkan Draf Eksposur Amendemen PSAK 1¹: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang *Judul Laporan Keuangan*.

DKZ02. Intensi DSAK IAI melakukan amendemen terhadap PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dengan membuka opsi atas penggunaan judul laporan keuangan selain yang digunakan dalam PSAK 201 (sekarang dalam PSAK 118) adalah untuk mengembalikan pengaturan ke *principle based* sebagaimana yang diatur dalam IAS 1 *Presentation of Financial Statements*. Secara prinsip, opsi atas penggunaan judul laporan keuangan dibuka, namun demikian, entitas diharapkan dapat memberikan judul atas laporan keuangan yang merepresentasikan secara tepat fungsi dan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri.

DKZ03. DSAK IAI juga mempertimbangkan bahwa dengan dibukanya opsi bagi entitas untuk menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*, maka amendemen ini menjadi sejalan dengan pengaturan dalam PSAK 201 paragraf 05 (sekarang dalam PSAK 118 paragraf 06) bahwa entitas dengan aktivitas nonlaba dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangannya sendiri, misalnya dengan menyesuaikan judul 'laporan perubahan ekuitas' menjadi 'laporan perubahan aset neto' karena dinilai lebih sesuai.

DKZ04. DSAK IAI menerima tanggapan publik yang menyatakan bahwa selama ini, dengan penggunaan judul 'laporan posisi keuangan' atau 'laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain' maka tidak ada perbedaan persepsi atas laporan keuangan tertentu yang diadopsi dalam diskusi, sehingga hal ini memudahkan komunikasi dengan pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, dengan variasi atas judul laporan keuangan dikhawatirkan akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pengguna laporan keuangan. Berdasarkan pertimbangan DSAK IAI dalam hal komunikasi dengan pengguna laporan keuangan, maka pengguna laporan keuangan seharusnya memiliki pengetahuan yang memadai sebagaimana dijelaskan dalam *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)*² paragraf 3.32 yaitu bahwa "Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomik serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Terkadang, bahkan pengguna yang telah terinformasikan dengan baik dan tekun juga perlu mencari bantuan dari seorang penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks."

DKZ05. Terdapat tanggapan publik yang merasa khawatir jika DSAK IAI membuka opsi atas penggunaan judul laporan keuangan, maka judul 'laporan posisi keuangan' yang telah digunakan saat ini dimungkinkan diubah menjadi 'neraca'. Sebagaimana tercantum dalam *Basis for Conclusions (BC) IAS 1 Presentation of Financial Statements* paragraf 16 (sekarang dalam BC IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* paragraf BZC21),

¹ Pada tahun 2024, dengan judul yang sama, nomenklatur PSAK 1 diubah menjadi PSAK 201. Perubahan nomenklatur tidak mengubah isi pengaturan dalam PSAK terkait.

² Referensi terhadap *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)* ini adalah KKPK yang telah disahkan oleh DSAK IAI dalam rapatnya pada tanggal 28 September 2016.

International Accounting Standards Board (IASB) menegaskan bahwa judul 'laporan posisi keuangan' tidak hanya mencerminkan fungsi atas laporan dengan lebih baik tetapi konsisten dengan *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (KKPK), yang menyebutkan beberapa referensi ke "posisi keuangan". KKPK³ paragraf 1.12 menyatakan bahwa:

"Laporan keuangan bertujuan umum memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yang merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomik entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomik dan klaim entitas."

IASB juga mempertimbangkan bahwa penggunaan judul 'neraca (*balance sheet*)' secara sederhana mencerminkan bahwa double entry bookkeeping mensyaratkan debit sama dengan kredit. Hal tersebut tidak mengidentifikasi isi atau tujuan dari 'laporan posisi keuangan'. Selain itu, DSAK IAI juga melihat bahwa "posisi keuangan" adalah istilah yang telah dikenal dan diterima karena telah digunakan dalam opini auditor saat ini. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan IASB, DSAK IAI menganjurkan menggunakan judul 'laporan posisi keuangan' dan tidak menggunakan judul 'neraca'.

DKZ06. DSAK IAI menerima tanggapan publik bahwa perubahan judul laporan keuangan bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi atau perubahan estimasi akuntansi sebagaimana yang diatur dalam PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*⁴. Oleh karena itu, tanggapan publik tersebut mengusulkan jika entitas mengubah judul laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan perubahan tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

DKZ07. DSAK IAI mencermati tidak terdapat perubahan lain selain judul laporan keuangan dalam amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang judul laporan keuangan. Oleh karena itu, intensi ketentuan transisi secara retrospektif dalam amendemen ini adalah entitas menyajikan perubahan judul tersebut secara komparatif dalam 2 (dua) laporan keuangannya, pada: (a) akhir periode berjalan dan (b) akhir periode terdekat sebelumnya. Komparabilitas tersebut diharapkan akan membawa pemahaman yang lebih baik dan, oleh karena itu, akan membawa manfaat yang lebih besar bagi pengguna laporan keuangan.

³ Referensi terhadap Framework yang digunakan dalam BC IAS 1 paragraf 16 adalah Framework yang disahkan IASB Board dan dirujuk oleh IASB pada tahun 2001. Sedangkan referensi KKPK dalam Dasar Kesimpulan ini adalah KKPK yang telah disahkan oleh DSAK IAI dalam rapatnya pada tanggal 28 September 2016 (setara dengan *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan IASB tahun 2010).

⁴ Pada saat PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* diterbitkan, judul PSAK 208 diubah menjadi *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

Tabel perbandingan paragraf dalam draf eskposur PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* dengan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan**

Paragraf dalam Draf Eksposur PSAK 118	Paragraf dalam PSAK 201
1	1
2	2
3	47, 111
4	3
5	4 (sebagian)
6	5
7	6
8	13, 14
9	9
10	10
11	8, 10 (sebagian)
12	10A
13	Tidak ada
14	11
15–18	Tidak ada
19–20	31
21–23	Tidak ada
24	55A, 85A, 85B
25	49
26	50
27	51
28	36
29	37
30	45
31	38
32	38A
33	41
34	42
35	43
36	44
37	40A
38	40B
39	40C

* Hanya sebagai informasi, bukan merupakan bagian dari draf eskposur PSAK 118

Paragraf dalam Draf Eksposur PSAK 118	Paragraf dalam PSAK 201
40	40D
41	Tidak ada
42	29, 77, 97
43	Tidak ada
44	32
45	33
46	88
47-68	Tidak ada
69	81A (sebagian)
70-74	Tidak ada
75	82
76	81B (sebagian)
77	Tidak ada
78	99-101
79	Tidak ada
80	102
81	103
82	Tidak ada
83	104
84-85	Tidak ada
86	81A (sebagian)
87	81B (sebagian)
88-89	82A
90	92
91	93
92	94
93	90
94-95	91
96	60
97	61
98	56
99-100	66
101-102	69
103-104	54
105	Tidak ada
106	57

Paragraf dalam Draf Eksposur PSAK 118	Paragraf dalam PSAK 201
107	106
108	110
109	106
110	107
111	108
112	109
113	112
114	113
115	116
116	138
117–125	Tidak ada
126	134
127–128	135
129	136
130	79
131	80
132	137
PP1–PP5	7
PP6–PP9	Tidak ada
PP10	52
PP11	53
PP12	46
PP13	38B
PP14	38C
PP15	38D
PP16–PP26	Tidak ada
PP27	34
PP28	35
PP29–PP78	Tidak ada
PP79	98
PP80	105
PP81–PP85	Tidak ada
PP86	89
PP87	7 (sebagian)
PP88	95

Paragraf dalam Draf Eksposur PSAK 118	Paragraf dalam PSAK 201
PP89	96
PP90	62
PP91	63
PP92	64
PP93	65
PP94	67
PP95	68
PP96	70
PP97	71
PP98	72
PP99	72A
PP100	72B
PP101	73
PP102	74
PP103	75
PP104	75A
PP105	76
PP106	76ZA
PP107	76A
PP108	76B
PP109	58, 59
PP110	Tidak ada
PP111	78
PP112	114
PP113–PP142	Tidak ada
C01–C08	Tidak ada

CA!
Tentukan
Kesuksesanmu



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310**
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777